# IMPLIKASI TINGKAT LITERASI TERHADAP INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGGUNAKAN PRODUK BMT MASYARAKAT PESISIR PANTAI UTARA KABUPATEN TUBAN

### **TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

**JOHAN** 

NIM. F02418144

# PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Johan

NIM : F02418144

Program : Magister (S-2) Ekonomi Syariah

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Agustus 2020 Saya yang menyatakan



Johan

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul "Implikasi Tingkat Literasi Terhadap Inklusi Keuangan Syariah Dalam Menggunakan Produk BMT Masyarakat Pesisir Pantai Utara Kabupaten Tuban" yang ditulis oleh Johan ini telah disetujui pada tanggal 09 Juni 2020

## Oleh:

**Pembimbing I** 

**Pembimbing II** 

Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag

NIP. 1955111819810310003

Dr. Mugiyati, MEI

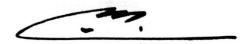
NIP. 197102261997032001

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis berjudul "Implikasi Tingkat Literasi Terhadap Inklusi Keuangan Syariah Dalam Menggunakan Produk BMT Masyarakat Pesisir Pantai Utara Kabupaten Tuban" yang ditulis oleh Johan ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 30 Juni 2020

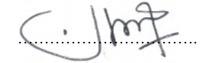
# Tim Penguji:

 Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag NIP.195511181981031003

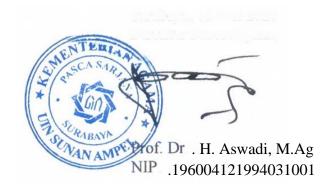


- 2. Dr. Mugiyati, MEI NIP.197102261997032001
  - 3. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag NIP.195005201982031002

4. Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM NIP.196212141993031002



Surabaya, 13 Agustus 2020 Direktur,





# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas ak bawah ini, saya:	ademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di
Nama	: Johan
NIM	: F02418144
Fakultas/Jurusan	: EKONOMI SYARIAH
E-mail address	: johanjio65@gmail.com
1 0	ngan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas
,	Tesis Desertasi Lain-lain ()

# yang berjudul: IMPLIKASI TINGKAT LITERASI TERHADAP INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGGUNAKAN PRODUK BMT MASYARAKAT PESISIR PANTAI UTARA KABUPATEN TUBAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juni 2020 Penuli

Johan

### Abstrak

Tesis yang berjudul "Implikasi Tingkat Literasi Terhadap Inklusi Keuangan Syariah Dalam Menggunakan Produk BMT Masyarakat Pesisir Pantai Utara Kabupaten Tuban". Dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dimensi dan mendiskripsikan tingkat literasi keuangan syariah masyarakat pesisir pantai utara Kabupaten Tuban, untuk mengetahui indikator dan mendiskripsikan tingkat Inklusi keuangan syariah masyarakat pesisir pantai utara Kabupaten Tuban dan untuk mengetahui Implikasi tingkat literasi terhadap inklusi keuangan syariah masyarakat pesisir pantai utara Kabupaten Tuban.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi dan teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penyipulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah di pesisir pantai Utara Tuban masih tergolong tatanan rendah karena kurangnya edukasi keuangan syariah oleh lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Rendahnya literasi tidak mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan produk-produk LKMS baik tabungan dan pembiayaan karena kebutuhan modal untuk pengembangan usaha sangat besar. Peningkatan inklusi dapat dilihat dari jumlah nasabah BTM Surya Utama yang terus meningkat dari Tahun 2018 ke Tahun 2019 sebesar 16%, sedangkan dari BMT Surya Rahardja mengalami peningkatan sebesar 19%. Tujuan dari inklusi keuangan adalah untuk membuka kran eksklusivitas bagi masyarakat pesisir Tuban dan memberikan kelayakan untuk mendapatkan permodalan dari lembaga jasa keuangan syariah melalui program yang mampu memberikan dampak positif pada spiritual, agama dan ekonomi sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir Tuban.

Kata Kunci: Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
PENGESAHAN TIM PENGUJI	IV
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	V
TRANSLITERASI	V
MOTTO	VI
PERSEMBAHAN	VII
ABSTRAKKATA PENGANTAR	X
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR GAMBAR	XV
DAFTAR TABEL	XV
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Penelitian	14
G. Penelitian Terdahulu	15
H. Kerangka Teoritis	22
1. Literasi Keuangan Syariah	22
2. Inklusi Keuangan Syariah	24
3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah	25
I. Metode Penelitian	31
1. Jenis Penelitian	31
2. Pendekatan Penelitian	31
3. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
4. Jenis dan Sumber Data	33
5. Teknik Pengumpulan Data	34
6. Teknik Validasi Data	36
7. Teknik Analisa Data	39

J. Sistematika Pembahasan	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Literasi Keuangan Syariah	43
1. Pengertian Literasi Keuangan Syariah	43
2. Tujuan Literasi Keuangan Syariah	44
3. Tingkat Literasi Keuangan Indonesia	47
4. Tahap-Tahap Dalam Perencanaan Keuangan Syariah	48
5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan Syariah.	50
6. Indikator Literasi Keuangan Syariah	51
B. Keuangan Inklusi Syariah	53
1. Pengertian Inklusi Keuangan Syariah	53
2. Visi, Misi, dan Tuj <mark>ua</mark> n <mark>Inkl</mark> usi K <mark>euang</mark> an Syariah	57
3. Manfaat Inklusi <mark>Keu</mark> angan Sya <mark>riah</mark> Dalam Perekonomian	61
4.Strategi Nasio <mark>nal Inklus</mark> i Keua <mark>nga</mark> n Syariah Dalam	
Mensejahteraka <mark>n M</mark> as <mark>yaraka</mark> t	62
5. Regulasi Nasional Tentang Inklusi Keuangan	70
6. Inplementasi Inklusi Keuangan	72
C. Lembaga Keuangan Syariah	76
1. Pengertian dan Peran Lembaga Keuangan Syariah	76
2. Pengertian dan Produk-Produk BMT	79
3. Peran Dan Fungsi BMT	80
D. Perekonomian Masyarakat Pesisir	83
1. Pengertian Masyarakat Pesisir	83
2. Karakteristik Perekonomian Masyarakat Pesisir	86
3. Potensi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis	
Lembaga Keuangan Syariah	91
BAB III HASIL DATA PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi dan Obyek Penelitian	94
1. Desa Glodog	94
2. Desa Karanggagung	97

3. BMT Surya Rahardja	
4. Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM) Surya Utama	
B.Tingkat Literasi Masyarakat Pesisir Pantai Utara Kabupaten Tuban	
C.Tingkat Inklusi Keuangan Syariah Masyarakat Pesisir Tuban	
Dalam Menggunakan Produk BMT	119
D.Implikasi Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah	
Masyarakat Pesisir Pantai Utara Kabupaten Tuban Dalam	
Menggunakan Produk BMT	129
BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN	
A. Tingkat Literasi Dalam Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pentai	
Utara Kabupaten Tuban	138
B. Tingkat Inklusi Ke <mark>uangan</mark> Syaria <mark>h M</mark> asyarakat Pesisir Pantai	
Utara Kabupaten Tu <mark>ban</mark>	146
C. Implikasi Tingkat <mark>L</mark> iter <mark>asi Terhad</mark> ap In <mark>kl</mark> usi Keuangan Syariah	
Masyarakat Pesisir <mark>Tu</mark> ban	156
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	168
B. Saran	170
DAFTAR PUSTAKA	172
LAMPIRAN-LAMPIRAN	179
- Surat Penelitian	
- Transkip Wawancara	
- Dokumentasi Wawancara	

# **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Cara Kerja Perputaran Dana BMT	30
Gambar 2.1 Program Inklusi Keuangan	75
Gambar 3.1 Struktur Desa Glodog	96
Gambar 3.2 Skruktur Desa Karangagung	98
Gambar 3.3 Struktur BMT Surya Raharja	100
Gambar 3.4 Struktur BTM Surya Utama	106
Gambar 4.1 Akses Masyarakat	148
Gambar 4.2 Pertumbuhan Anggota	151
Gambar 4.3 Hasil Literasi Masyarakat Pesisir	159

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Koding Informan	110
Tabel 3.2 Data Anggota BTM Surya Utama dan BMT Surya Rahardja	119
Tabel 4.1 Pengukuran Inklusi Keuangan	152
Tabel 4.2 Kesejahteraan Masyarakat Sebelum Dan Sesudah	
Melakukan Pembiayaan	164



### BAB I

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang sekitar 10,2% penduduknya berada di bawah garis kemiskinan. Bahkan dibeberapa daerah angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka secara nasional. Salah satunya Kabupaten Tuban yang pada Tahun 2017 angka kemiskinan berada di 16,87%. Angka tersebut menempatkan Kabupaten Tuban pada urutan ke lima dengan jumlah warga miskin terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Masalah kemiskinan tentunya berkaitan dengan masalah daya beli dan ekonomi masyarakat, sedangkan daya beli dan perekonomian yang kurang baik salah satunya kurangnya permodalan atau akses masyarakat untuk mendapatkan pendanaan. Sebaliknya semakin tinggi dan semakin mudah masyarakat lapisan bawah mendapatkan akses keuangan kemakmuran masyarakat akan tercapai dan begitu juga perekonomian akan dinamis. Masalah satunya permodalan atau akses masyarakat akan tercapai dan begitu juga perekonomian akan dinamis.

Masyarakat yang rentan kesejahteraan disebabkan kurangnya memahami akses dan pengelolaan keuangan, terbiasa dengan pola hidup yang boros, tidak bisa mengelola keuangan dengan baik dan memiliki pola hidup konsumtif, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bps, "Persentase Penduduk Miskin September 2017 Mencapai 10,2%. (Online)" (<a href="https://www.Bps.Go.Id/Pressrelease/2018/01/02/1413/Persentase-Penduduk-Miskin-September-2017-Mencapai-10-12-Persen.Html">https://www.Bps.Go.Id/Pressrelease/2018/01/02/1413/Persentase-Penduduk-Miskin-September-2017-Mencapai-10-12-Persen.Html</a>, Diakses Tanggal 03 Februari 2020)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Imron," *Kemiskinan Tuban Rangking Lima Se- Jawa Timur*. (Online)", (<u>Http://Suarabanyuurip.Com/Kabar/Baca/Kemiskinan-Tuban-Rangking-Lima-Se-Jatim</u>, Diakses Tanggal 03 Februari 2020).

Wihandono, "Angka Kemiskinan Turun Tipis, Tuban Tetap 5 Kabupaten Termiskin Di Jawa Timur. (Online)", (<u>Https://Www.Bangsaonline.Com/Berita/40865/Angka-Kemiskinan-Turun-Tipis-Tuban-Tetap-5-Besar-Kabupaten-Termiskin-Di-Jatim, Diakses Tanggal 03 Februari 2020).</u>

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), 2.

persiapan atau berjaga-jaga saat musim sepi/paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder, akibatnya mengalami kesulitan keuangan dan berhutang pada tempat yang kurang tepat. berhutang kepada lintah darat, yang justru semakin memperberat kondisi keuangan. Krisis keuangan dan berbagai problem yang berkaitan dengan ketidak mampuan mengelola keuangan.

Untuk mencapai kesejahteraan diperlukan cara mendapatkan dana yang cukup, pengelolaan keuangan keuangan yang baik maka diperlukanlah pengetahuan tentang literasi keuangan dan selanjutnya akan diikuti dengan inklusi keuangan yang bijaksana sesuai kebutuhannya.

Literasi keuangan merupakan informasi dan pengetahuan mengenai konsep dan produk-produk keuangan dapat juga memberikan pengaruh terhadap penggunaan produk investasi keuangan. Di Indonesia, program literasi keuangan dilakukan oleh OJK. Selain itu, keuangan inklusif telah menjadi agenda penting di tingkat internasional maupun nasional. Keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan inklusi ekonomi yang berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah.

Sesuai Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan yang memberikan amanah kepada OJK untuk melakukan edukasi dan perlindungan konsumen masyarakat melaui pelaksanaan program Literasi Keuangan yang terarah dan terukur, diharapkan

masyarakat bukan hanya menjadi *well literate* dalam masalah keuangan, melainkan juga menggunakan produk dan jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan keuangannya<sup>5</sup>

Dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am dijelaskan bahwa literasi atau pengetahuan itu sangat penting bagi seorang muslim, dengan demikian seorang muslim harus mampu membedakan hal-hal yang dibolehkan dan dilarang oleh Islam. Sebagaimana ayat dibawah ini:

"Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas" (QS. Al-An'am: 119).

Dalam ayat lain juga menjelaskan tentang pentingnya pengetahuan, yaitu Surah Al-Mujadilah ayat 11.

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orangorang yang beriman diantaramu dan orangorang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Surah Al-Mujadilah: 11).

Ayat diatas, menjelaskan akan pentingnya ilmu pengetahuan karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang memiliki pengetahuan di surganya nanti. Oleh sebab itu, literasi keuangan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> OJK, Strategi Nasio\nal Literasi Keuangan Indonesia (Jakarta: 2014), 11.

syariah adalah kemampuan seseorang dalam mengetahuan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mencapai kesejahteraan yang sesuai dengan landasan hukum Islam yaitu al Qur'an dan al Hadist.

Literasi keuangan dan inklusi keuangan merupakan pilar yang sangat berperan penting dalam memperkuat layanan jasa keuangan. Salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya untuk mengakses sektor jasa keuangan adalah karena kurangnya pengetahuan dan informasi ataupun dikarenakan masih mahalnya produk dan layanan yang tersedia. Kegiatan literasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi pada masyarakat sehingga masyarakat memiliki kemampuan atau keyakinan untuk memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan guna meningkatkan kesejahteraan. Literasi keuangan adalah kemampuan masyarakat untuk memproses informasi ekonomi dan membuat keputusan tentang perencanaan keuangan, akumulasi kekayaan pensiun dan utang.

Tingkat literasi keuangan yang rendah memberikan gambaran bahwa terdapat persoalan dalam pengetahuan keuangan. Rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat tidak hanya merupakan persoalan saat ini namun juga akan menjadi problem masyarakat dimasa yang akan datang. Sehingga pengelolaan keuangan menjadi hal yang sangat penting dewasa ini, mengingat saat ini pertumbuhan komsumsi masyarakat yang terus meningkat seiring

.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Atkinson, A. Dan Messy, F. Promoting Financial Inclusion Through Financial Education: Oecd/Infe Evidence, Policies And Practice. Oecd Working Papers On Finance, Insurance And Private Pensions, No. 34, (2013), Oecd Publishing.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Lusardi, A., & Mitchell, O. S. 2007. Financial Literacy Around The World: An Overview. *Journal Of Pension Economics And Finance*, 10 (04), 497-508.

dengan mengingkatnya pendapatan masyarakat dan pertumbuhan perekonomian yang semakin membaik.

Pemberian literasi keuangan sebagai upaya dari pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, serta memberikan sarana pada masyarakat untuk kemudahan dalam mengakses layanan perbankan, serta tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong cara berpikir masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Literasi keuangan dan inklusi keuangan merupakan program Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatasi rendahnya akses masyarakat di pedesaan terhadap layanan jasa keuangan formal. Gerakan literasi keuangan menjadi program nasional yang bersifat jangka panjang dan dalam implementasinya melibatkan banyak pihak. Program pembangunan literasi keuangan syariah sesungguhnya merupakan upaya strategis mendukung pemerintah (OJK) dalam mewujudkan program nasional dalam membangun dan meningkatkan Literasi Keuangan yang telah dicanangkan Presiden Soesilo Bambang Yudoyono diakhir tahun 2013 lalu.

Literasi yang baik (*well literate*) masyarakat tentunya harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia termasuk literasi tentang keuagan syariah. Industri keuangan syariah global cukup pesat ditegah ketidakpastian pemulihan pasar keuangan dunia sata ini, *Global Islamic Economy Report* 2016/2017 menyebutkan bahwa asset keuangan syariah global tahun 2015 mencapai USD 2 triliun dan diproyeksikan nilainya menjadi USD 3,5 Triliun ditahun 2021 (Thomson Reuters, 2016). Indonesia masih menduduiki peringkat Sembilan sebagai *Top Islamic Finance Countries*, jauh dibawah Malaysia yang berada

ditingkat pertama negara penduduk muslim terbanyak, Indonesia dapat dikatakan terlambat dalam mengaplikasikan ekonomi syariah. Indonesia tertinggal jauh dibandingkan Malaysia, Mesir, Sudan, inggris dan arab Saudi yang sudah lebih dari satu dekade menerapkan ekonomi anti riba<sup>8</sup>.

Menurut Survey OJK pada tahun 2019 tentang literasi dan inklusi keuangan menemukan bahwa literasi keuangan pada tahun 2019 mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan mencapai 76,19%. Angka tersebut lebih meningkat jika dibandingkan pada tahun 2013 yaitu sebesar 29,7% untuk literasi keuangan dan 67,% untuk inklusi keuangan. Dengan demikian, dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan pemahaman masyarakat tentang literasi keuangan sebesar 8,33% dan inklusi keuangan sebesar 8,39%. Jika berdasarkan strata wilayah, untuk perkotaan indeks literasi keuangan mencapai 41,41% dan inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 83,60%, sementara indeks literasi keuangan masyarakat perdesaan sebesar 34,53% dan 68,49% untuk inklusi keuangan pada masyarakat perdesaan.

Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah, OJK, kementrian, industri jasa keuangan dan berbagai pihak lainnya yang sama-sama berusaha untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat. sinergisitas dan kerja keras yang berikan oleh pihak terkait telah mampu mencapai target strategi nasional keuangan inklusi (SNKI) sebesar 75% berdasarkan Perpres Nomor 82 tahun 2016 tentang literasi dan inklusi keuangan. Dengan kata lain, keyakinan masyarakat kepada lembaga jasa

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Kusumaningtuti, Cecep Setiawan, *Literasi Dan Inklusi Keuangan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 220.

<sup>9</sup> www.OJK.co.id, di Akses pada 28 Apri 2020.

keuangan sebagai perusahaan yang menawarkan jasa dan produknya adalah untuk perbaikan taraf hidup masyarakat.

Prinsip operasional lembaga keuangan syariah ada dua yaitu prinsip ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan. Sebagaimana yang firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 2:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. Al-Maidah: 2)

Kegiatan tolong menolong tidak terlepas dari sebuah kerjasama anatra beberapa pihak yang memiliki keterikatan baik dalam penentuan regulasi dan eksekusi regulasi. Partisipasi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan inklusif keuangan bisa dilaksanakan dengan mengembangkan program yang tidak hanya mementingkan usaha pada penghimpunan dana dan pembiayaan, akan tetapi harus ikut aktif mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan keluarga khususnya di pedesaan dengan akses lembaga keuangan syariah yang lebih luas bagi keluarga dipedesaan terlebih keluarga menenga kebawah.

Lembaga Keuangan (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan

-

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Bukan Hanya Solusi Mengahadapi Krisis Namun Solusi Menghadapai Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global* (Jakarta: PT bumi Aksara, 2010), 297

masyarakat, pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan<sup>11</sup>, salah satunya lembaga keuagan mikro syariah adalah Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mat wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil antara lain dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya<sup>12</sup>. Sistem pembiayaan BMT antara lain: Mudharabah, Musyarokah, Murabahah, Salam, Istishna, Ijarah, Rahn.

Kecamatan Palang adalah salah satu wilayah yang penduduknya sebagian berada diwilayah pesisir pantai utara kecamatan di Kabupaten Tuban yang berada dibagian timur kota berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lamongan, terdapat 4 desa yang berada di pesisir pantai utara Kecamatan Palang Kabupaten Tuban antara lain Desa Karangagung, Desa Glodog, Desa Palang dan Desa Gesikharjo yang memiliki jumlah penduduk usia produktif sebanyak 25.414 jiwa, dalam akses layanan keuangannya terdapat 4 (empat) lembaga keuangan syariah non bank (BMT) yakni BMT Surya Raharja, BMT Bina Insan Mandiri, BMT Teratai, dan Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM) Surya Utama, untuk memenuhi kebutuhan finansialnya Masyarakat pesisir pantai utara kecamatan Palang sejak 10 Tahun yang lalu telah menggunakan

<sup>11</sup> Otoritas jasa Keuangan,"Lembaga Keuangan Mikro" <a href="https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx">https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx</a> (23 Desember 2018) <a href="https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx">https://www.

produk dan jasa layanan BMT tersebut. Masyarakat Pesisir pantai utara Kecamatan Palang menggunakan produk dan layanan baik pembiayaan dan Tabungan yang ditawarkan lembaga keuangan mikro syariah tersebut.

Masyarakat yang literasinya bagus akan bijak dalam menentukan produk dan jasa layanan keuangan syariah sesuai kondisi keuangan dan usahanya. Terdapat 5 (lima) komponen untuk membentuk literasi keuangan pengetahuan keuangan, keyakinan keuangan, sikap keuangan, dan perilaku keuangan, untuk dapat mengambil keputusan keuangan dan mencapai kesejahteraan keuangan<sup>13</sup>. Pengetahuan keuangan berhubungan dengan tingkat pemahaman setiap individu akan lembaga keuangan formal dan produk dan layanan keuangan termasuk produk dan layanan keuangan, yaitu risiko, manfaat serta hak dan kewajibannya sebagai nasabah. Ketrampilan keuangan merupakan kemampuan individu untuk melakukan perhitungan sederhana, termasuk dalam menghitung return dari produk dan layanan keuangan syariah (Margin). Kepercayaan dalam mengelola keuangan disini kepercayaan individu dalam menggunakan produk dan jasa keuangan dan percaya dalam mengelola keuangannya. Kemudian sikap keuangan berhubungan dengan sikap membuat rencana keuangan pribadi, sedangkan prilaku keuangan berhubungan dengan tujuan penggunaan dana yang diperoleh guna mencapai kesejahteraan.

Tingkat literasi yang tinggi diharapkan dimiliki oleh masyarakat yang berada di pesisir pantai utara Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Pemahaman akan literasi keuangan sangat diperlukan bagi para pelaku usaha

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ibid 46-47

khususnya masyarakat pesisir di Kecamatan Palang. Supaya masyarakat pesisir pantai utara Kecamatan Palang kabupaten Tuban mempunyai tingkat literasi yang tinggi diharapkan Lembaga-lembaga keuangan Syariah dalam hal ini BMT yang berada didaerah tersebut juga memberikan edukasi literasi tentang keuangan syariah, supaya masyarakat sekitar paham betul tentang produk-produk dan akad pembiayaan dan tabungan yang ditawarkan lembaga keuangan syariah yang berada di pesisir pantai utara Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tersebut.

Tingginya literasi yang dimiliki masyarakat akan diikuti dengan tingkat inklusi keuangan. Pembangunan inklusi di artikan sebagai pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang baru tetapi juga menjamin aksesibilitas yang sama terhadap peluang yang tercipta untuk semua kalangan atau segmen khususnya masyarakat produktif berpenghasilan masyarakat, Kemudahan akses dapat berupa rendahnya biaya transaksi, jarak yang dekat dengan lembaga keuangan syariah, rendahnya agunan/jaminan untuk memperoleh akses pendanaan/pembiayaan. Mudahnya akses unyuk memperoleh pendanaan/pembiyaan dari lembaga keuangan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dan mengurangi hambatan masyarakat dalam memperoleh modal pembiayaan yang produktif sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri maupun masyarakat sekitar yang bisa membawa kemakmuran dan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat miskin.

Selain itu, akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan merupakan hal penting dalam upaya peningkatan partisipasi seluruh lapisan masyarakat pesisir pantai utara kecamatan Palang Kabupaten Tuban dalam perekonomian. Melalui gerakan literasi dan inklusi keuangan syariah, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman mengenai Lembaga Jasa Keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan syariah, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan syariah. Dengan demikian literasi keuangan diharapkan mampu mendorong individu untuk melakukan keputusan yang tepat dalam mengelola keuangannya. Literasi yang tinggi akan Pada literasi dan inklusi keuangan akan dianggap berhasil jika ada kenaikan tingginya tabungan dan investasi, jika tabungan dan investasi masyarakat rendah maka pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut juga rendah. Peningkatan pemahaman dan kemampuan seseorang dalam literasi dan inklusi keuangan syariah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang selanjutnya akan berujung pada turunnya tingkat kemiskinan di masyarakat.

Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah di pesisir pantai utara Kecamatan Palang Kabupaten Tuban ini beroperasi lebih dari sepuluh tahun silam tentunya masyarakat di daerah pesisir pantai utara Kecamatan Palang ini telah menggunakan produk dan jasa layanan keuangan yang ditawarkan, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah masyarakat sudah paham betul tentang produk-produk pembiayaan, tabungan, dan jasa keuangan lainnya

yang disediakan oleh lembaga keuangan tersebut, berapa tingkat pengetahuan, ketrampilan, keyakinan, sikap dan perilaku keuangan yang masyarakat pantai utara Kecamatan Palang miliki, dan tingkat inklusi keuangannya. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul "Implikasi Tingkat Literasi Terhadap Inklusi Keuangan Syariah Dalam Menggunakan Produk BMT Masyarakat Pesisir Pantai Utara Kabupaten Tuban.

### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang berhasil di identifisir adalah sebagai berikut:

- 1. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban masih mencapai 16,87% di Tahun 2017 terutama didaerah pesisir pantai utara Kabupaten Tuban.
- Masyarakat Pesisir masih ada yang mengakses pinjaman dan layanan dari bank harian dan renternir.
- 3. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan dalam mengelola keuangan sehingga tingkat kesejahteraan sulit tercapai.
- 4. Masyarakat memanfaatkan produk dan layanan lembaga keuangan syariah tetapi kurang memahami produk dan layanan keuangan tersebut.
- 5. Rendahnya sikap keuangan dalam mengelola dana dari lembaga keuangan
- 6. Rendahnya tingkat ketrampilan masyarakat dalam menghitung tingkat suku bunga (*Margin*) pinjaman/pembiayaan.

- Rendahnya tingkat akses dan layanan masyarakat pesisir pantai utara Kecamatan Palang terhadap industri Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Syariah.
- 8. Tingkat Literasi Keuangan Syariah masyarakat pesisir pantai utara Kabupaten Tuban.
- 9. Tingkat Inklusi Keuangan syariah masyarakat pesisir pantai utara Kabupaten Tuban.
- Implikasi tingkat literasi terhadap inklusi keuangan syariah masyarakat pesisir pantai utara Kabupaten Tuban.

### C. Batasan Masalah

Agar kajian ini d<mark>an</mark> tuntas bah<mark>asa</mark>nnya maka masalah dibatasi sebagai berikut:

- Tentang tingkat literasi Keuangan syariah masyarakat pesisir pantai utara Kabupaten Tuban.
- Tentang tingkat inklusi Keuangan syariah masyarakat pesisir pantai utara Kabupaten Tuban.
- 3. Tentang Implikasi tingkat literasi terhadap inklusi keuangan syariah masyarakat pesisir pantai utara Kabupaten Tuban.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil dari batasan masalah agar mudah dicarikan jawabannya maka dirumuskan dengan bahasa pertanyaan sebagai berikut:

 Bagaimana tingkat literasi keuangan syariah masyarakat pesisir pantai Kabupaten Tuban?

- 2. Bagaimana tingkat Inklusi keuangan syariah masyarakat pesisir pantai utara Kabupaten Tuban?
- 3. Bagaimana Implikasi tingkat literasi terhadap inklusi keuangan syariah masyarakat pesisir pantai utara Kabupaten Tuban?

## E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui dimensi dan mendiskripsikan tingkat literasi keuangan syariah masyarakat pesisir pantai utara Kabupaten Tuban.
- 2. Untuk mengetahui indikator dan mendiskripsikan tingkat inklusi keuangan syariah masyarakat pesisir pantai utara Kabupaten Tuban.
- 3. Untuk mengetahui Implikasi tingkat literasi terhadap inklusi keuangan syariah masyarakat pesisir pantai utara Kabupaten Tuban.

### F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat antara lain:

- Dari segi keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu khususnya yang berkaitan dengan literasi dan inklusi keuangan syariah.
- Hasil penelitian ini digunakan oleh praktisi dan pemerhati gerakan ekonomi syariah untuk memberikan edukasi tentang literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat tentunya di wilayah pantai utara Kabupaten Tuban
- 3. Digunakan pemangku kebijakan supaya memberikan arahan atau perintah supaya lembaga keuangan syariah mengadakan sosialisasi tentang literasi

dan inklusi kepada masyarakat tentunya di wilayah pantai utara Kabupaten Tuban

### G. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan tema yang serupa.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Nasution dan Fatira pada tahun 2019 mengenai Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan dan Perbakan Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Alat bantu analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis faktor. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa program studi keuangan dan perbankan syariah di Sumatera Utara. Jumlah sample penelitian ini sebanyak 219 mahasiswa dengan menggunakan teknik random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi kesadaran literasi keuangan mahasiswa program studi keuangan dan perbankan syariah di Sumatera Utara. Faktor pertama yaitu orang tua, faktor kedua yaitu pengetahuan, faktor ketiga yaitu perilaku ekonomi, dan faktor keempat yaitu gender dan teknologi informasi. Sedangkan faktor utama yang dapat membangun kesadaran literasi keuangan mahasiswa program studi keuangan dan perbankan syariah di Sumatera Utara adalah pendidikan ayah, pendidikan ibu, dan pendapatan orang tua. 14

Penelitian yang telah dilakukan oleh Hamzah pada tahun 2019 mengenai Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Syariah di Kalangan

1

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Nasution, Anriza Witi., Fatira, Marlya, "Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan dan Perbakan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 7, Nomor 1, (2019), 40 - 63.

Tenaga Pendidik Kabupaten Kuningan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji indikator literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah. Objek penelitian ini adalah tenaga kependidikan di Kabupaten Kuningan. Teknik pengumpulan data menggunakan model angket dengan tekni random sampling sebanyak 200 responden. Metode penelitian adalah kuantitatif dan alat analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan Software Lisrel. Hasil penelitian ini adalah sikap keuangan positif signifikan terhadap inklusi keuangan syariah, perilaku keuangan positif signifikan pada inklusi keuangan syariah, dan pengetahuan keuangan positif signifikan pada inklusi keuangan syariah. 15

Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan dan Febru Winaro Tahun 2019, Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Nelayan Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Tingkat literasi keuangan syariah nelayan desa Pahlawan masih rendah diperlukan sosialisasi oleh lembaga keuangan syariah untuk memberikan edukasi dan sosialisasi tentang lembaga Keuangan sariah<sup>16</sup>

Poppy Alvianolita Sanistasya, Kusdi Rahardjo, Mohammad Iqbal.<sup>17</sup> Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kalimantan Timur Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Hamzah, Amir. 2019. Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Syariah di Kalangan Tenaga Pendidik Kabupaten Kuningan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. Volume 7(2), 175-187.

Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan dan Febru Winaro, "Analisis Tingkat Literasi Literasi Keuangan Syariah Pada Nelayan Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara" *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 3, No. 2, (2019),1

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Poppy Alvianolita Sanistasya, Kusdi Rahardjo, Mohammad Iqbal, "Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kalimantan Timur", *Jurnal Economia*, Volume 14, Nomor 1, (April 2019), 48.

pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha kecil, dan pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja usaha kecil. Jenis penelitian ini adalah penelitian explanatory. Sampel penelitian adalah 100 UMKM yang ada di Kalimantan Timur. Sampel dikumpulkan menggunakan teknik non probability sampling dengan pendekatan sensus yaitu mengambi seluruh UMKM yang beroperasi di Kalimantan Timur untuk dijadikan sampel dan dilakukan pengujian untuk menjawab isu penelitian yang diangkat. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan alat analisis PLS (Partial Least Square). Level unit analisis penelitian ini adalah pelaku usaha kecil di Kalimantan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja usaha kecil dan inklusi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja usaha kecil.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Budiman, dkk pada tahun 2018 mengenai Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Lingkungan Perguruan Tinggi: Studi Pada Politeknik Negeri Banjarmasin. penelitian ini bertujuan mengungkapkan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Politeknik Negeri Banjarmasin. Metode penelitian bersifat kuantitatif-deskriptif dengan menggunakan survei sebagai cara pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pegawai Poliban relatif sudah cukup baik, sedangkan tingkat inklusinya masih rendah. 18

Penelitian yang telah dilakukan oleh Hamdani pada tahun 2018 mengenai Analisis Tingkat Literasi Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap

1

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Budiman, Mochammad Arif., Mairijani., Mahyuni., Herlinawati, Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Di Lingkungan Perguruan Tinggi: Studi Pada Politeknik Negeri Banjarmasin. *Prosiding Seminar Nasional*. Banjarmasin: Politeknik Negeri Banjarmasin, (2018).

Perilaku Keuangan Pada Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Terbuka. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis tingkat literasi keuangan dan pengaruhnya terhadap perilaku keuangan pada mahasiswa Prodi Manajemen universitas Terbuka. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 500 mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Terbuka. Data dianalisis menggunakan metode Partial Least Square (PLS) dan menggunakan tools SmartPLS. Hasil dari penelitian ini adalah nilai signifikasi terbesar pada variabel literasi keuangan pada mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Terbuka adalah memiliki tabungan yang cukup untuk pengeluaran tidak terduga. Nilai t-statistik pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan sebesar 46.011197, nilai ini lebih besar dari nilai t-tabel 1.98 untuk level signifikan 0.05 (5%) yang menunjukkan signifikansi pengaruh antar variabel laten. Nilai R-square untuk variabel laten Keputusan Berkunjung didapatkan nilai sebesar 0.598824, hal ini menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan berpengaruh sebesar 59.8824% terhadap perilaku keuangan.<sup>19</sup>

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sofuan Jauhari mengenai keuangan inklusi untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro (studi kasus di lembaga manajemen infaq kota Kediri) menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengambilan datanya menggunaka wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis induktif dimana penelitian ini menganalisiis pola-pola yang bersifat umum berdasarkan fakta yang

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Hamdani, Mailani. 2018. Analisis Tingkat Literasi Keuangan Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Keuangan Pada Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Terbuka. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*. Vol. 1, No. 1. Pp 139-145.

kemudian di analisis kepada pola-pola yang bersifat khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keuangan inklusif di LMI kota Kediri di implementasikan melalui program KUBerdaya. Dana pembiayaan diberikan kepada kaum dhuafa' yang kekurang mdal agar bisa di produktifkan dengan menggunakan akad qordhul hasan dan hibah. Program ini cukup berhasil membuat masyarakat berdaya tetapi program ini belum berjalan secara efisien karena indikator kinerja sepenuhnya belum tercapai. Indikator kinerja meliputi indikator keseiaan akses, indikator penggunaan dan indikator kualitas. Inplikasi dari program KUBerdaya sangat positif karena sebagian besar masyarakat yang menerima program tersebut telah merasaan manfaat.<sup>20</sup>

Penelitian yang telah dilakukan oleh Setiawan pada tahun 2016 mengenai Analisis Keterkaitan Inklusi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Personal Masyarakat di Wilayah Kota Dan Kabupaten Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang ada adalah 38 kota/kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sampel yang digunakan adalah 31 kota/kabupaten yang terdiri atas 9 kota dan 22 kabupaten diambil menggunakan teknik stratified random sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis indeks inklusi keuangan dan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan masing-masing kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur berbeda-beda. Seluruh wilayah kota mayoritas memiliki indeks inklusi keuangan yang tinggi, sedangkan wilayah

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Soufwan Jauhari, keuangan inklusif untuk pemberdayaan Masyarakat melalui pengembangan usaha Mikro (Studi Kasus di Lembaga Manajemen Infaq Kota Kediri) (*Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), 109.

kabupaten memiliki indeks inklusi keuangan yang rendah. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa indeks inklusi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku keuangan personal.<sup>21</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Husnul Khotimah tentang analisis efektivitas inklusi keuangan di BMT Syariah Riyal menunjukkan bahwa strategi inklusi keuangan yang di terapkan berdampak positif pada peningkatan inklusi keuangan khususnya di wilayah Kota Bekasi, bahkan BSR telah mengembangkan luasan pemasaran serta layanannya hingga ke Kabupaten Bekasi karena BMT melakukan kerjasama dengan ketua RT, ketua RW, majelis taklim, sekolah, konstituen DPRD setempat. Sistem yang digunakan adalah jemput bola dan memperkuat SDM, memperkuat jaringan dan internal perusahaan sehingga target mampu dicapai dengan baik.<sup>22</sup>

Penelitian yang dilakuakan oleh Bintan Badriatul Ummah, dkk yang berjudul Analisis inklusi keuangan dan pemerataan pendapatan di Indonesia menunjukkan bahwa Hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki tingkat inklusi keuangan rendah. Rata-rata indeks inklusi keuangan antar provinsi di Indonesia berkisar antara 0,1-0,33, kecuali Provinsi Jakarta yang tergolong tinggi yang mencapai 0,8. Tingkat inklusi keuangan di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi dan infrastruktur. Inklusi keuangan memiliki hubungan searah dengan pemerataan pendapatan di Indonesia. Distribusi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Setiawan, Moh. Agung. 2016. Analisis Keterkaitan Inklusi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Personal Masyarakat di Wilayah Kota dan Kabupaten Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Feb. Vol 3, No 2. Pp 1-19.s

Husnul khotimah, analisis efektivitas inklusi keuangan di bmt syariah riyal. *Jurnal ilmiah ekonomi manajemen dan kewirausahaan "optimal"* •vol.10, no. 2• september 2016, 20.

pendapatan di suatu daerah mempengaruhi tingkat inklusi keuangan di daerah tersebut, tetapi tidak sebaliknya.<sup>23</sup>

Penelitian Implikasi Tingkat Literasi Terhadap Inklusi Keuangan Syariah Dalam Menggunakan Produk BMT Masyarakat Pesisir Pantai Utara Kabupaten Tuban, belum pernah ada penelitian sebelumnya, tetapi penelitian terdahulu bisa dibuat acuan penelitian lebih lanjut. Penilitian ini menekankan pada implikasi tingkat literasi dan inklusi masyarakat pesisir pantai utara Kecamatan Palang Kabupaten Tuban terhadap pemanfaatan produk dan jasa layanan lembaga keuangan Mikro syariah (BMT) di wilayah tersebut.

### H. Kerangka Teoritik

### 1. Literasi Keuangan Syariah

## a. Pengertian Literasi Keuangan

Literasi keuangan adalah seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seorang individu untuk membuat keputusan dan efektif dengan semua sumber daya keuangan mereka.<sup>24</sup> OJK mendefinisikan literasi keuangan sebagai tingkat pengetahuan, keterampilan dan keyakinan masyarakat pada lembaga keuangan serta produk dan jasanya, yang dituangkan dalam parameter atau ukuran indeks. Indeks literasi keuangan ini sangat penting untuk melihat peta sesungguhnya mengenai tingkat pengetahuan masyarakat terhadap fitur,

-

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Bintan Badriatul Ummah, dkk. Analisis inklusi keuangan dan pemerataan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembanguan*, Vol 4, No 1, 2015, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Manurung, Adler Haymans, *Reksa Dana Investasiku*, (Jakarta: Kompas, 2012), 24.

manfaat dan resiko, hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna produk dan jasa keuangan.<sup>25</sup>

Ada 5 (lima) Komponen literasi keuangan menurut OJK:

- 1) Penetahuan Keuangan : pengetahuan terhadap lembaga keuangan syariah yang memberikan pelayanan keuangan, produk-produk pembiayaan serta layanan formal, mengetahui hak dan kewajiban nasabah, dan mengetahu cara memperoleh produk pembiayaan serta simpanan
- Ketrampilan Keuangan: keampuan masyarakat dalam menghitung tingkat margin (Bagi Hasil) pembiayaan, inflasi dan bagi hasil investasi (Return)
- 3) Keyakinan Keuangan: alasan keyakinan masyarakat akan lembaga keuangan baik lembaga keuangan formal maupun lembaga keuangan non formal
- 4) Sikap Keuangan: sikap masyarakat terhadap dana pembiayaan yang diperoeh dengan berbagai tujuan semisal untuk melakukan usaha, memenuhi kebutuhan pokok, mempertahankan hidup, biaya pendidikan ataupun persiapan hari tua
- 5) Perilaku keuangan: mempunyai tujuan menggunakan produk dan layanan keuangan, untuk mencapai tujuan dengan menabung dan mempunyai rencana keuangan yang baik.
- b. Tujuan dan Manfaat Literasi Keuangan

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, 2013.

Literasi Keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya less literate atau not literate menjadi well literate.
- 2) Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan. Bagi masyarakat, Literasi Keuangan memberikan manfaat yang besar, seperti:<sup>27</sup>
- 1) Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan.
- 2) Memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik.
- Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas.

## 2. Inklusi Keuangan Syariah

a. Pengertian Inkluasi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan penyampaian akses keuangan dengan biaya yang terjangkau yang ditujukan bagi individu berpendapatan rendah.  $^{28}$  Begitu pula dengan Reserve Bank of India yang mendefinisikan inklusi keuangan sebagai suatu proses yang menjamin akses terhadap produk dan jasa keuangan dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Siregar, Rizal Ma'ruf Amidy, "Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pedagang Pasar Di Kota Padang Sidimpuan", Jurnal Iqtisaduna, Vol. 4, No. 2, (2018).

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Leeladhar, V, "Taking Banking Services To The Common Man-Financial Inclusion. India: Reserve Bank Of India Bulletin, (2006).

miskin atau berpendapatan rendah.<sup>29</sup> Inklusi keuangan adalah suatu proses untuk menjamin masyarakat dalam mengakses layanan jasa keuangan secara menyeluruh seperti tabungan, pinjaman, asuransi, pembayaran, dan lain-lain.<sup>30</sup>

Menurut OJK beberapa indikator untuk mengukur inklusi keuangan syariah:

- Indikator Akses: keterjangkauan layanan keuangan letak, hambatan masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan syariah dikarenakan biaya maupun informasi seperti jumlah layanan kantor, mesin ATM dan Jumlah Agen layanan keuangan.
- 2) Penggunaan: penggunaan layanan produk dan jasa produk-produk syariah yang ditawarkan seperti pembiayaan dan simpanan.
- 3) Kualitas: pemenuhan kebutuhan yang dilakukan lembaga keuangan syariah terhadap masyarakat seperti edukasi produk dan layanan dan jumlah penyelesaian pengaduan nasabah.

## 3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman/pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan,

<sup>30</sup> Agrawal, Amol, "Economic Research: The Need For Financial Inclusion With An Indian Perspective. Mumbai: Idbi Gilts Paper, (2008)

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Joshi, Deepali Pant, "Financial Inclusion And Financial Literacy. Rbi-Oecd Seminar. India: Reserve Bank Of India, (2011).

maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak sematamata mencari keuntungan<sup>31</sup>.

### a. Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mat wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil antara lain dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya<sup>32</sup>

BMT mempunyai dua fungsi utama: Baitul Tamwil (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam Meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan cara mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi, baitul mal (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba-modal pada segolongan orang kaya, melainkan lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam, akad dan produk dana BMT antara lain: Giro Wadi'ah, Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah<sup>33</sup>

-

Otoritas jasa Keuangan,"Lembaga Keuangan Mikro" <a href="https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx">https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx</a> (23 Desember 2018)

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> M.Nur Riyanto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2017), 391 <sup>33</sup> Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam;Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 364.

Sistem pembiayaan pada Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) antara  $\mbox{lain}^{34}$ 

# 1) Mudharabah

Akad mudharabah akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (pemilik dana atau shahibul maal) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana atau mudharib) bertidak selaku pengelola dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana.<sup>35</sup>

# 2) Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerjasama di antara para pemilik modal yang menggabungkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra secara bersama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerjasama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan kepada pihaklain tanpa seizin mitra lainnya. 36

# 3) Murabahah

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*marjin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Hery, *Akuntansi Syariah* (Jakarta:PT Grasindo, Anggota IKAPI, 2018), 1.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> *Ibid*, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Ibid, 18.

penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli mengenai harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkan. Dalam hal ini, pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran marjin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan<sup>37</sup>

# 4) Salam

Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjual-belikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang dilakukan kemudian hari. 38

### 5) Istishna

Akad Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu, dengan kreteria dan persyaratan tertentu pula yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat). Pembuat akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dimana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain (istishna parallel).<sup>39</sup>

# 6) Ijarah

Ijarah sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindah tangankan bukan hak kepemilikannya melainkan hak guna atau manfaat, yaitu manfaat dari suatu asset atau dari jasa (pekerjaan). Asset yang

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> *Ibid*, *36*.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Ibid, 54.

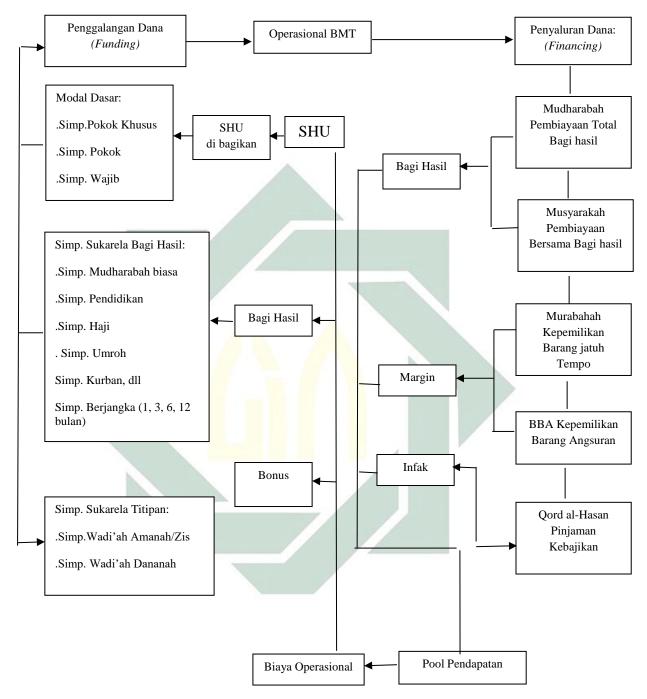
<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Ibid, 66.

disewakan (obyek ijarah) dapat berupa rumah, mobil, peralatan, perabot dan lain sebagainya<sup>40</sup>

Kegiatan Usaha Baitul Maal Wat tanwil (BMT), menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkannya. Cara kerja perputaran dana BMT secara sederhana terdapat pada gambar berikut:



<sup>40</sup> Ibid, 77.



Gambar: 1.1 Cara kerja perputaran dana BMT

#### I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Menurut Sugiono, penelitian tindakan merupakan penelitian terapan yang bertujuan ganda dengan cara memperbaiki situasi kerja dan mengembangkan ilmu tindakan, penelitian tersebut tidak semata-mata untuk mempelajari sesuatu, melainkan bagaiman peneliti sedang melakukan risert yang lebih baik<sup>41</sup> oleh karena itu peneliti bermaksud mengumpulkan data dan berpartisipatif aktif dilapangan Implikasi Tingkat Literasi Terhadap Inklusi Keuangan Syariah Dalam Menggunakan Produk BMT Masyarakat Pesisir Pantai Utara Kabupaten. Informasi yang diperoleh berupa hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan bahan dari internet dan bahan lain tentang kehidupan manusia secara individu maupun kelompok.<sup>42</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan strategi analisis data Diskriptif kualitatif dengan analisis induktif. Analisis kualitatif cenderung menggunakan logika induktif, dimana silogisme dibangun pada hal-hal yang khusus atau data di lapangan dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum. Diskriptif kualitatif lebih banyak menganalisis permukaan data, hanya memperhatikan proses-proses kejadian suatau fenomena, bukan kedalaman atau makna data<sup>43</sup> Dalam teori induktif menjadikan data sebagai pijakan awal

\_

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (kualitatif, Kuantitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan), (Bandung: IKAPI, 2019), 818.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 74.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Burhan Mugin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan ilmu social lainnya* (Jakarta: Putra Grafika, 2007), 151.

melakukan penalitian, dan data adalah segala-galanya untuk memulai sebuah penelitian<sup>44</sup>

Keaneragaman masalah menjadikan format penelitian ini semakin kaya akan model kontruksi yang akan dibangun, peneliti bebas menentukan model penelitian, model analisis, model teorisasi, model pembahasan sampai dengan model kontruksi laporan penelitiannya. Keunggulan model deduktif penelitian ini dilakukan pada tingkat yang paling mendasar (*Grounded*) sehingga mempunyai 4 (empat) kemampuan antara lain: menerima teori karena mendukung eori, meragukan teori kemudian mengkritiknya, membantah teori kemudian menolaknya, membangun teori baru yang sebelumnya belum pernah ada.

# 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Karangagung dan Desa Glodog yang berada di wilayah pesisir pantai utara Kabupaten Tuban dan BMT Surya Raharda dan BTM Surya Utama yang berada di Desa Karangagung dan Desa Glodog Waktu penelitian dilakukan dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.

### 4. Jenis dan Sumber Data

- a. Jenis Data
  - 1) Data primer

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Ibid, 27.

Data tingkat literasi keuangan syariah masyarakat pesisir pantai utara Kabupaten Tuban, Data tingkat inklusi keuangan syariah masyarakat pesisir pantai utara Kabupaten Tuban, Implikasi tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat pesisir pantai utara Kabupaten Tuban

# 2) Data Sekunder

Profil Masyarakat Pesisir Kabupaten Tuban yaitu Desa Karangagung dan Desa Glodog dan Profil Lembaga Keuangan Syariah Non Bank antara lain: BMT Surya Raharja dan Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM) Surya Utama.

# b. Sumber Data

### 1) Sumber Primer

Sumber primer diperoleh dari wawancara langsung dari masyarakat di Desa Karangagung dan Desa Glodog yang berada di wilayah pesisir pantai utara Kabupaten Tuban, dan ke Lembaga Keuangan Syariah Non Bank yang diantaranya BMT Surya Raharja dan Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM) Surya Utama.

### 2) Sumber Sekunder

Data sekunder berupa referensi dari hasil penelitian sebelumnya, buku, jurnal yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan<sup>45</sup>. Sumber data dari buku dan materi yang ditulis

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Lexyj. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 135.

oleh orang lain sebagai acuan terhadap obyek penelitian/obyek yang dituju oleh peneliti untuk menjadi bahan pelengkap dalam menyusun penelitain tesis.

# 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang benar akan mendapatkan keakuratan dan kredibilitas tinggi data yang diperoleh<sup>46</sup>. Tahap pengumpulan data harus dilakukan dengan cermat dan sesuai prosedur penelitian. Supaya tidak terjadi kesalahan dan berakibat fatal yakni data tidak memiliki kredibilitas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya lebih-lebih jika dipakai sebagai dasar pembuat kebijakan publik.

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi merupakan teknik memperoleh secara langsung dilapangan mengenai gambaran peristiwa batau kejadian yang bisa menjawab pertanyaan penelitian, perilaku manusia untuk dievaluasi dengan melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut<sup>47</sup>. Observasi ini dilakukan di 4 (empat) tempat yaitu di BMT Surya Raharja, Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM) Surya Utama, Desa Karangagung dan Desa Glodog untuk mengetahui, mendengarkan, mencatat subyek yang diteliti

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2015), 30.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> *Ibid*, 32.

yaitu masyarakat yang datang untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan di lembaga keuangan tersebut.

### b. Wawancara

Wawancara pada awal pengumpulan data harus ditentukan topiknya secara spesifik, kemudian dikembangkan pertanyaan mendalam untuk memperoleh data yang akurat dan benar<sup>48</sup>. pada hakekatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai isu atau tema yang diangkat dalam penelitian<sup>49</sup>. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, karena peneliti sudah mengetahui informasi apa saja yang akan diperoleh oleh karena itu peneliti menggunakan instrumen dalam melakukan wawancara dan pengumpulan data berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah dipersiapkan. Dalam penelitian ini informannya adalah masyarakat dan BMT yang ada pesisir pantai utara Kabupeten Tuban.

### c. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen<sup>50</sup>. Bahan dokumenter terbagi beberapa macam yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku dan catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah dan swasta, data di server dan flasdish,

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Afifudin & Beni Ahmad Soebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 132.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> *Ibid*, 31.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2015), 32-33.

data tersimpan di website dan lain-lain. Data jenis ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa menggali informasi silam. Data dokumentasi ini berupa masyarakat yang datang ke lembaga keuangan syariah, data catatan anggota berupa jumlah masyarakat pesisir pantai utara yang melakukan pembiayaan, tabungan, dan jasa lainnya.

#### 6. Teknik Validasi Data

Data yang valid adalah data "yang tidak berbeda" antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian, bila peneliti membuat laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada obyek maka data tersebut dapat dinyatakan tidak valid<sup>51</sup>. Terdapat dua macam validitas penelitian yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai sedangkan valliditas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil. Bila penelitian representative, instrument penelitian valid dan reliable, cara mengumpulkan data dan analisis benar, maka penelitian akan memiliki validitas eksternal yang tinggi.

### a. Credibility (Validitas Internal)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan triangulasi.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Sugiyono, Metode penelitian kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), 509.

# 1) Perpanjangan pengamatan

Dalam uji perpanjangan peneliti turun tangan kelapangan kembali untuk melakukan pengamatan, wawancara dengan sumber data, dengan uji perpanjangan pengamatan ini akan membuat peneliti dengan nara sumber akan semakin akurat, setelah dianggap cukup peneliti akan mengolah data dengan melakukan pengecekan keabsahan data, menyusun data, mengklasifikasikan data, dan mengoreksi jawaban wawancara yang kurang jelas

# 2) Ketekunan dalam penelitian

Melakukan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.peneliti meningkatkan ketekunan dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil peneliti dan dokumen yang terkait dengan yang diteliti. Dengan membaca peneliti akan mempunyai wawasan yang lebih luas dan tajam, sehingga dapat memeriksa data yang ditemukan itu benar/terpercaya atau tidak.

# 3) Triangulasi

Triangulasi diartikan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Diantaranya adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa

sumber data, kemudian data yang diperoleh dianalisis peneliti sehingga dapat menghasilkan kesimpulan dan kesepakatan.

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Sedangkan triangulasi waktu adalah pada saat wawancara dilakukan dipagi hari akan berbeda dengan hasil wawancara di siang maupun sore hari karena berhubungan dengan suasana hati informan.

# b. Transferability (Validitas Eksternal)

Validitas Eksternal (transferability) menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Niali transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga penelitian ini dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi yang berbeda, peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ketempat lain.

#### 7. Teknik Analisa Data

Menurut Mudjiraharjo analisi data adalah sebuah kegiatan untuk mengukur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan

mengkatagorikannya, sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab<sup>52</sup>

Menurut Miles (1994 dan Faisal (2003) ada beberapa tahapan menganalisis data antara lain:

# a. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang diperoleh direduksi. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok,dan difokuskan pada hal-hal yang penting, dibuang hal-hal yang tidak perlu sehingga akan memberikan gambaran yang jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dan mencarinya lagi bila data tersebut diperlukan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu<sup>53</sup>

# b. Penyajian Data (Data Display)

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya

# c. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut setelah kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi disajikan

.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Ibid 34-35

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2017), 486-487.

secara sistematis akan disimpulkan sementara. Biasanya kesimpulan diperoleh pada tahap awal kurang jelas, tetapi pada tahap berikutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan adalah trigulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

# d. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diperoleh dari kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan akhir ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.

### J. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini dibagi beberapa bab dan tiap bab terdapat sub bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** pada bab ini akan diuraikan tentanglatar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA, pada bab ini terdapat tiga bagian yaitu pertama penelitian dan pengajian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penellitian ini. Kedua, landasan teori yang berisi uraian telaah literature, referensi, jurnal, artikel dan lain-lain, yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Referensi ini juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap masalah. Ketiga, kerangka pemikiran berisi kesimpulan dan telaah literature yang digunakan unuk

menyusun asumsi dan hipotesis yang selanjutnya disambung hipotesis yang dirumuskan

**BAB III METODE PENELITIAN**, pada bab ini akan dibahas tentang metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitain, Jenis dan Sumber Data, teknil pengumpulan data, teknik validasi data, dan teknik analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN,pada bab ini akan ditampilkan mengenai gambaran umum dari obyek penelitian yaitu masyarakat Pesisir di Kabupaten Tuban, di 2 (dua) Desa dengan 4 (empat) obyek penelitian yaitu Desa Karangagung, Desa Glodog, Pemerintah Desa Karangagung dan Pemerintah Desa Glodog, deskriptif analitik, uji kualitas data, dan pengumpulan hipotesis. Mengetahui Implikasi Tingkat Literasi Terhadap Inklusi Keuangan Syariah Dalam Menggunakan Produk BMT Masyarakat Pesisir Pantai Utara Kabupaten Tuban.

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN pada bab ini akan menguraikan data dan pembahasan yang didapatkan dari hasil penelitian dengan analisis Diskriptif Kualitatif. Dengan reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi serta kesimpulan akhir.

**BAB VI PENUTUP** pada bab ini akan disimpulkan hasil penelitian dan saransaran

### **BAB II**

### KAJIAN PUSTAKA

### A. Literasi Keuangan

# 1. Pengertian Literasi Keuangan

Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan penekanan mengenai pentingnya inklusi finansial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari literasi finansial. Pengertian inklusi finansial sendiri adalah sebuah proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan, dan penggunaan sistem keuangan formal untuk semua individu.

Literasi finansial sebagai salah satu literasi dasar menawarkan seperangkat pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif untuk kesejahteraan hidup sekaligus kebutuhan dasar bagi setiap orang untuk meminimalisasi, mencari solusi, dan membuat keputusan yang tepat dalam masalah keuangan. Literasi finansial juga memberikan pengetahuan tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya sebagai amunisi untuk pembentukan dan penguatan sumber daya manusia Indonesia yang kompeten, kompetitif, dan berintegritas dalam menghadapi persaingan di era globalisasi dan pasar bebas dan juga sebagai

warga negara dan warga dunia yang bertanggung jawab dalam pelestarian alam dan lingkungan dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan.<sup>54</sup>

Terdapat 3 (tiga) dimensi dari literasi keuangan yaitu (1) keterampilan menghitung, (2) pemahaman tentang keuangan dasar, dan (3) sikap terhadap keputusan keuangan. Pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh seseorang tersebut kemudian berkembang menjadi keterampilan keuangan, dimana keterampilan keuangan itu sendiri didefinisikan sebagai kemampuan dalam menerapkan pengetahuan keuangan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan keuangan memungkinkan seseorang untuk dapat mengambil keputusan yang rasional dan efektif terkait dengan keuangan dan sumber ekonominya. <sup>55</sup>

# 2. Tujuan Literasi Keuangan Syariah

Tujuan program pembangunan literasi keuangan syariah adalah untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan peran serta masyarakat dalam penggunaan produk dan jasa keuangan syariah. Literasi keuangan syariah diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat serta mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan secara lebih baik, mampu dan cerdas memilih investasi yang halal dan menguntungkan, mampu mencegah masyarakat mengikuti investasi bodong.

Pembangunan literasi keuangan dalam jangka panjang bertujuan meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not litarate* 

<sup>54</sup> Didik Suhardi DKK, *Literasi Financial* (Jakarta :Kemendikbud, 2017).5

Otoritas Jasa Keuangan, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) revisit (2017), 16.

menjadi *well literate*, dan meningkatkan jumlah pengguna produk dan Jasa Keuangan. Tujuan ini juga tentu berlaku bagi pembangunan literasi keuangan syariah. Maka, tujuan dari literasi keuangan syariah adalah agar konsumen dan masyarakat luas dapat menentukan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka, memahami dengan benar manfaat dan resikonya, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan jasa keuangan yang dipilih tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka berdasarkan prinsip syariah yang halal dan menguntungkan.<sup>56</sup>

Program pembangunan literasi keuangan syariah memiliki manfaat yang cukup besar, baik untuk masyarakat, jasa keuangan syariah dan pemerintah. Manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari adanya program pembangunan literasi keuangan syariah antara lain:

- a. Masyarakat mampu memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai kebutuhan mereka,
- b. Masyarakat mampu melakukan perencanaan keuangan (*Financial Planning*) secara syariah dengan lebih baik,
- c. Masyarakat terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas (investasi bodong),
- d. Masyarakat mendapat pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan jasa keuangan syariah. Literasi keuangan syariah juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan syariah, mengingat masyarakat adalah pengguna produk dan jasa keuangan syariah.

Masyarakat dan lembaga jasa keuangan syariah saling membutuhkan satu sama lain, sehingga semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah masyarakat,

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Anriza Witi Nasution, Marlya Fatira AK. Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan dan Perbakan Syariah, *Jurnal Equilibrum* Volume 1 Nomor 7 (2019)40-63

maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah. Dalam hal ini, potensi keuntungan yang akan diperoleh lembaga jasa keuangan syariah juga semakin besar. Literasi keuangan syariah mendorong industri jasa keuangan untuk terus mengembangkan dan menciptakan produk dan jasa keuangan yang lebih inovatif, bervariasi, dan lebih terjangkau, sesuai dengan kebutuhan semua golongan masyarakat.<sup>57</sup>

# 3. Tingkat Literasi Keuangan Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk di atas rata rata pertumbuhan penduduk dunia, pertumbuhan penduduk di indonesia periode 1971-2010 mencapai 1,78% per tahun, lebih tinggi dari pada pertumbuhan penduduk dunia yang mencapai 1,61% sebesar 142,54 juta jiwa (59,98%) dari penduduk indonesia berada pada usia produktif (15-54 tahun) yang merupakan segmen sangat potensial bagi produk jasa keuangan. Dilihat dari sisi pendapatan per kapita maka masyarakat indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, pada tahun 2000 pendapatan nasional masih sekitar 6,8 juta dan pada tahun 2012, pendapatan per kapita penduduk indonesia mencapai 33,9 juta per tahun, berarti naik lima kali lipat.

Untuk jasa pegadaian, ada 15 dari 100 orang yang mengetahui jasa pegadaian dengan tingkat well literate, kalau kita bandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, tingkat literasi masyarakat terhadap jasa pegadaian sudah cukup baik. Untuk tingkat utilitas, yaitu tingkat

-

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Agustianto, Membangun Literasi Keuangan Syariah di Indonesia, dalam www.iqtishadconsulting.com, diakses pada tanggal 5 April 2020 pukul 11.00 WIB.

penggunaan maka terlihat hanya 5 orang dari 100 orang penduduk yang menggunakan jasa pegadaian, dibandingkan perbankan dengan tingkat utilitas yang mencapai 57% maka tingkat utilitas pegadaian masih sangat rendah, namun perlu difahami mengapa tingkat utilitas perbankan lebih tinggi dari tingkat well literate nya, karena banyak dari masyarakat yang menggunakan jasa perbankan karena menjadi karyawan, misalnya karyawan pegadaian sendiri yang pembayaran penghasilannya langsung di transfer ke rekening bank meskipun mungkin tidak begitu memahami mengenai manfaat, risiko, hak dan kewajibannya sebagai nasabah bank tersebut.<sup>58</sup>

Disisi lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di dalam Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia sudah menetapkan visi, misi dan prinsip literasi keuangan. Menurut OJK visi literasi keuangan Indonesia adalah: "mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi (well literate) sehingga masyarakat dapat memilih dan memanfaatkan keuangan guna meningkatkan kesejahteraan.<sup>59</sup>

# 4. Tahapan-Tahapan Dalam Perencanaan Keuangan

Dalam kehidupan modern ini, terdapat berbagai tawaran dari berbagai industri di sekeliling kita yang membujuk untuk membeli produkproduknya. Di lain pihak, kita memiliki "kemampuan keuangan" yang bukan "kemampuan tanpa batas". Oleh karena itu, kita diwajibkan untuk memiliki kebijakan dalam memilih produk sangat penting untuk dibeli yang

Apriliani Roetanto, *Literasi Keuangan* (Yogyakarta : Istana Media, 2017), 5.
 OJK.go.id

tentu saja harus berdasarkan pada perencanaan pengeluaran uang. Perencanaan pengeluaran kita dibentuk berdasarkan pertimbangan akan perencanaan keuangan dalam konteks pencapaian tujuan hidup. Perencanaan Keuangan menurut *Financial Planning Standards Board* Indonesia adalah "Proses mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana." Perencanaan keuangan meliputi:

- a. Manajemen arus kas
- b. Perencanaan investasi
- c. Perencanaan pengelolaan risiko dan asuransi
- d. Perencanaan hari tua
- e. Perencanaan pajak
- f. Perencanaan distribusi kekayaan, hibah dan waris.

Dalam melaksanakan perencanaan keuangan, ada beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan, sebagai berikut:

- a. Mendefinisikan tujuan keuangan yang akan dicapai;
- b. Memeriksa kondisi keuangan saat ini;
- c. Mengumpulkan informasi data yang relevan guna pencapaian tujuan keuangan dengan mempertimbangkan kesenjangan antara kondisi keuangan saat ini dengan tujuan keuangan yang ingin dicapai
- d. Membuat rencana keuangan, yaitu membuat rencana tentang apa saja yang harus dilakukan agar tujuan keuangan dapat tercapai

- e. Melaksanakan rencana-rencana keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya
- f. *Review* perkembangan pencapaian target keuangan, yang dilakukan secara periodik, apakah setahun sekali atau setiap bulan, disesuaikan dengan etujuan keuangan dan target waktu yang ingin dicapai. <sup>60</sup>

# 5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan

Menurut *Program for International Student Assessment* (PISA) dalam Litbang Kemendikbud aspek-aspek yang terdapat pada literasi keuangan yaitu:

- a. Uang dan transaksi
- b. Perencanaan dan pengelolaan keuangan
- c. Risiko dan keuntungan
- d. Financial landscape.

Kemampuan empat aspek *financial literacy* tersebut tentunya dipengaruhi oleh banyak hal, seperti yang dinyatakan Lusardi dkk dalam Imawati dkk bahwa ada tiga hal yang memberikan pengaruh terhadap kemampuan literasi keuangan yaitu:

 a. Sosiodemography Ada perbedaan kepahaman antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dianggap memiliki kemampuan financial literacy lebih tinggi daripada perempuan. Begitu juga dengan kemampuan kognitifnya

.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> OJK, Perencanaan Keuangan Seri Literasi Keuangan (2019), 26.

- b. Latar belakang keluarga Pendidikan seorang ibu dalam sebuah keluarga berpengaruh kuat pada literasi keuangan , khususnya ibu yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi. Mereka unggul 19 persen lebih tinggi daripada yang lulusan sekolah menengah.
- c. Kelompok pertemanan Kelompok atau komunitas seseorang akan memengaruhi financial literacy seseorang, memengaruhi pola konsumsi dan penggunaan dari uang yang ada".61

### 6. Indikator Literasi Keuangan

- a. Pengetahuan: Pengetahuan adalah salah satu aspek yang umum sekaligus harus dimiliki dalam konsep literasi keuangan. Agar dapat mengelola uang seseorang harus memiliki pengetahuan tentang keuangan. Seseorang dapat meningkatkan kesejahteraan finansial individu ketika orang tersebut memiliki pengetahuan.
- b. Kemampuan Seseorang yang memiliki literasi keuangan tinggi didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki informasi tentang keuangan cukup banyak. Dengan banyaknya informasi tersebut, mengkomunikasikannya seseorang mampu sehingga mampu menciptakan keputusan keuangan yang efektif. Pengambilan keputusan keuangan menjadi salah satu implikasi yang paling penting pada literasi keuangan. Literasi keuangan tidak dapat diuji kecuali dengan melihat bagaimana seseorang mampu membuat keputusan keuangan yang efektif.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Lusardi Et Al, Financial Literacy Among The Young, Journal Of Consumer Affairs Volume 44 Issue 2, (2010), 50-51.

- c. Sikap Sikap dalam memanajemen keuangan pribadi berarti seseorang mampu untuk mengetahui sumber uang tunai dan membayar kewajiban pribadi, pengetahuan tentang membuka rekening di bank dan mengajukan pinjaman di bank, dan perencanaan keuangan pribadi di masa dating
- d. Kepercayaan Tidak semua orang mampu memasukkan unsur kepercayaan diri ketika sedang merencanakan kebutuhan keuangan di masa datang.Kepercayaan diri dalam merencanakan kebutuhan keuangan jangka panjang merupakan cerminan dari 16 ketrampilan seseorang dalam melakukan perencanaan kebutuhan keuangan jangka pendek.<sup>62</sup>

# B. Keuangan Inklusi

# 1. Pengertian Inklusi Keuangan

Financial inclusion atau inklusi keuangan dugunakan untuk memasuki kondisi maysrakat bawah sejak krisis 2008, yang didasari atas kelompok in the bottom of the pyramid (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju. 63 Inklusi keuangan didifinisikan sebagai kondisi ketika masing-masing anggota masyarakat mempunya akses terhadap lembaga keuangan dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka

-

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Veny Oktavianti, Pengaruh Literasi Keuangan Dan Persyaratan Kredit Terhadap Akses Kredit Formal Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Surabaya, (*Tesis*, Fakultas Teknologi Industri, 2017), 16.

<sup>63</sup> www.bi.go.id, diakses 13 April 2020.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>64</sup> Masyarakat kecil menengah diharapkan mampu menjangkau lembaga keungan tanpa dibatasi oleh kekuarangan modal serta adanya hambatan yang lainnya.

lnklusi keuangan memiliki dua kata utama, yaitu inklusi dan keuangan. Inklusi, secara harfiah diartikan sebagai memasukkan. Sementara itu, keuangan secara harfiah diartikan sebagai hal-hal yang terkait dengan uang. Kedua makna tersebut akan menghasilkan makna baru yang akan melibatkan agenda global jika disentralkan dalam bentuk satu kesatuan. Agenda besar dibentuknya inklusi keuangan adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola resiko, pemanfaatan uang, dan menghasilkan profit serta memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitarnya. Financial Inclusion (Keuangan Inklusif) didefinisikan sebagai upaya mengurangi segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Keberhasilan yang diharapkan dari masyrakat semata-mata adalah untuk membuka lapangan pekerjaan baru dan mengurangi angka pengangguran yang terjadi di masyarakat.

Definisi lain terkait *Financial Inclusion* menurut *World Bank* (2008) yang dikutip dalam Supatoyo dan Kasmiati adalah sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan

.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Bank Indonesia, "Plot Project Peningkatan Akses keuangan kelompok masyarakat atau kelompok pelaku usaha melalui pemanfaatan produk/jasa layanan keuangan syariah", 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Irfan Syauki Beik, Laili Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 221.

<sup>66</sup> Halim Alamsyah, "Pentingnya Keuangan Inklusif dalam Meningkatkan Akses Masyarakat dan UMKM terhadap Fasilitas Jasa Keuangan Syariah", diakses Tanggal 30 April 2020.

baik dalam bentuk harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan. <sup>67</sup> Banyaknya masyarakat miskin serta minimnya jaminan yang tersedia membuat sebagian besar masyarakat kesulitan dalam melakukan akses terhadap lembaga keuangan. Oleh sebab itu, dibentuklah inklusi keuangan untuk lebih menjangkau masyarakat kalangan bawah. Harga yang tinggi serta jarak yang relatif jauh juga menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan.

Menurut Kamalesh Shailesh mengatakan Financial Inclusion meminimalisir pemborosan serta membudayakan menabung, meningkatkan konsumsi akses kredit, baik kewira<mark>us</mark>aahaan maupun memungkinkan mekanisme pembayaran yang efisien. Berdasarkan alasan tersebut lembaga keuangan akan mampu meberikan manfaat ekonomi dengan menyediakan pembayaran yang efisien, efektif dan alokatif. Banyak negara-negara dengan total populasi penduduk yang besar masih belum mempunyai akses luas bagi masyarakat untuk menjangkau lembaga keungan akan menunjukkan rasio kesenjangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, inklusi keuangan menjadi sebuah keharusan dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses modal baik digunakan untuk berwirausaha ataupun konsumsi dengan perbankan sebagai motorik utama dalam mengimplementasikan inklusi keuangan.<sup>68</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Strategi Nasional Keuangan Inklusif, www.fiskaldepkeu.go.id, diakses 30 April 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Novia Nengsih, Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia, *Jurnal Etikonomi*, Vol 14 No 2 (Oktober 2015), hal 223-224

Negara-negara dengan populasi yang relatif tinggi akan mengoptimalkan layanan jasa keuangannya agar mudah dijangkau oleh lapisan masyarakat yang paling kecil. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Salah satu bentuk pengoptimalan layanan jasa keuangan adalah dengan menumbuhkan inklusi keuangan yang nantinya akan mampu meningkatkan akses kredit dan memberikan kemudahan dalam mekanisme pembayaran.

Dalam perspektif syariah, inklusi keuangan syariah memiliki arti tersendiri yaitu mengupayakan peningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sehingga masyarakat mampu mengelola dan mendistribusikan sumber keuangan sesuai prinsip syariah. Inklusi keuangan syariah merupakan sarana untuk mendorong keterlibatan yang lebih tinggi dari masyarakat terhadap praktik keuangan syariah. <sup>69</sup> Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar memeluk Islam secara kaffah, yang dimaksud dengan kaffah adalah melaksanakan segala syariat Islam secara keseluruhan (totalitas) tidak memilah-milah antara aturan agama yang satu dengan yang lainnya. Seharusnya sebagai ummat muslim masyarakat Indonesia tidak mengalami kesulitan untuk mengakses lembaga keuangan syariah untuk menunjang kegiatan ekonomi mereka karena lembaga keuangan syariah di Indonesia sudah sangat komplek.

Sistem keuangan yang inklusif harus memiliki peminat yang relatif lebih banyak. oleh sebab itu, sistem keuangan yang inklusif harus

<sup>69</sup> Irfan Syauki Beik, Laili Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syaria*, 222.

menjangkau secara luas dikalangan masyarakat baik menegah dan bagian bawah. Kuntet.al menyatakan bahwa semakin inklusif lembaga keuangan maka akan semakin besar peluang bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan keuangan seperti halnya mereka mendapatkan tunjangan atau jaminan bagi orang-orang miskin dan kelompok masyarakat yang kurang mampu.<sup>70</sup> Keuangan syariah dengan karakteristik yang mendukung adanya inklusifitas, kesetaraan, kerja sama dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat, bisa membantu pengurangan kesenjangan di antara negara berkembang. Program inklusi keuangan sendiri, merupakan agenda utama bagi negara berkembang karena bisa menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Untuk itu, prinsip keuangan syariah yang sejalan dengan program inklusi keuangan bisa saling bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pada dasarnya keuangan inklusi memilki manfaat bagi perekonomian agar segala sumber daya masyarakat yang produktif mampu difasilitasi dengan kemudahan akses layanan keuangan sehingga memberikan kemanfaatan bagi kehidupan sehari-hari. Keuangan inklusi juga dapat membantu sistem pembiayaan yag bersumber dari pihak yang memiliki legalitas hukum yang jelas agar lebih mudah diawasi langsung oleh instansi pemerintah.

# 2. Visi, Misi dan Tujuan Inklusi Keuangan Syariah

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Asli Demirguc Kunt, dkk. (Islamic Finance and Financial Inclusion), 3.

Inklusi keuangan secara garis besar memiliki visi mewujudkan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, pemerataan pendapatan dan terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Visi tersebut akan terwujud jika masyarakat memiliki kepercayaan dan keyakinan akan eksistensi lembaga keuangan syariah yang bebas riba dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Adapun misi inklusi keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan agar tercipta kesejahteraan pada lapisan masyarakat menegah dan bawah.
- b. Menyediakan produk dan jasa keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga tidak terjerat dengan praktek-praktek nonformal.
- c. Meningkatkan pengetahuan dan rasa aman masyarakat dalam penggunaan layanan keuangan sehingga menimbulkan keyakinan bahwa layanan jasa keuangan hadir dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat.
- d. Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
- e. Mendorong pengembangan keuangan inklusi untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

Adapun tujuan inklusi keuangan dijaabarkan dalam beberapa tujuan sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Kelompok miskin yang marjinal merupakan kelompok yang memiliki keterbatasan akses pada jasa layanan keuangan karena beberapa kendala yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, keuangan inlusif memiliki tujuan yaitu membuat strategi untuk mencapai pembangunan ekonomi yang lebih luas dengan megurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyrakat. Jasa keuangan diberikan akses yang lebih besar agar mampu meng-cover masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan dalam mensejahterakan hidupnya.
- b. Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep keuangan inklusif harus dapat memenuhi semua kebutuhan yang berbeda dari segmen penduduk yang berbeda melalui serangkaian layanan holistik yang menyeluruh.
- c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan. Hambatan utama dalam keuangan inklusif adalah tingkat pengetahuan keuangan yang rendah. Pengetahuan ini penting agar masyarakat merasa lebih aman berinteraksi dengan lembaga keuangan. Salah satu upaya

71 Grup Pengembangan Keuangan Inklusif, *Booklet Keuangan Inklusif*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2014), 5-6.

\_

- yang paling mudah adalah memberika edukasi langsung kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan aparatur pemerintah setempat.
- d. Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan dengan mempermudah dalam menemukan lembaga keuangan serta kemudahan dalam mengurus syarat administrasi. Hambatan bagi orang miskin untuk mengakses layanan keuangan umumnya berupa masalah geografis dan kendala administrasi. Menyelesaikan permasalahan tersebut akan menjadi terobosan mendasar dalam menyederhanakan akses ke jasa keuangan.
- e. Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non bank demi tercapainya program pembangunan pemerintah. Pemerintah harus menjamin tidak hanya pemberdayaan kantor cabang, tetapi juga peraturan yang memungkinkan perluasan layanan keuangan formal. Oleh karena itu, sinergi antara Bank, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi penting khususnya dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan.
- f. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan layanan keuangan agar lebih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat menengah kebawah. Teknologi dapat mengurangi biaya transaksi dan memperluas sistem keuangan formal melampaui sekedar layanan tabungan dan kredit. Namun, pedoman dan peraturan yang jelas perlu ditetapkan untuk menyeimbangkan perluasan jangkauan dan risikonya.

# 3. Manfaat Iinklusi Keuangan Dalam Perekonomian

Masyarakat masih menganggap lembaga keuangan sebagai lembaga eklusif yang hanya bisa dijangkau oleh orang-orang kaya. Untuk membantah persepsi tersebut maka pemerintah memberikan terobosan melalui program inklusif keuangan. Kondisi masyarakat yang tergolong unbanked (belum tersentuh oleh dunia perbankan) merupakan masalah cukup penting. Ada berbagai alasan menyebabkan masyarakat menjadi *unbanked*.<sup>72</sup> Dari sisi *suplay* dan *demand* yaitu karena *price barrier* (mahal), *information barrier* (tidak mengetahui), *design product barrier* (produk yang cocok) dan *channel barrier* (sarana yang sesuai). Keuangan Inklusif mampu menjawab alasan tersebut dengan memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah dan pihak swasta, antara lain sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. Meningkatkan efisiensi ekonomi
- b. Mendukung stabilitas sistem keuangan
- c. Mengurangi shadow banking atau irresponsible finance
- d. Mendukung pendalaman pasar keuangan
- e. Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan
- f. Mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI) Indonesia.
- g. Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> lihat http://www.aboutbanking.com, Di Akses 29 April 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Husnuk Khatimah, analisa efektivitas inklusi keuangan di BMT syariah Riyal, *jurnal ilmiah ekonomi manajemen dan kewirausahaan OPTIMAL*" Vol 10, No 2, September 2016.

h. Mengurangi kesenjangan (inequality) dan rigiditas low income trap, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.<sup>74</sup>

Inklusi keuangan memiliki ketergantungan kepada tingkat pendapatan masyarakat, dimana saat pendapatan masyarakat meningkat maka ada kemungkinan masyarakat menabung. Sedangkan pendapatan sendiri tergantung pada lapangan pekerjaan yang tersedia. Indonesia mengupayakan terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat agar pendapatannya semakin meningkat. Adapun lapangan pekerjaan diantaranya adalah pertanian, kelauta<mark>n, dan kehutanan. K</mark>ondisi tersebut perlu diciptakan secapatnya karena masyarakat Indonesia sedang mengalami masalah kemiskinan yang absolut dan struktural.

# 4. Strategi Nasional Inklusi Keuangan Dalam Mesejahterakan Masyarakat

Tingkat ekslusivitas keuangan di Indonesia tergolong tinggi sehingga perlunya trobosan baru dalam meningkatkan jasa layanan keuangan. Tercatat pula sejumlah pegawai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih belum bisa memperoleh akses layanan yang memadai terhadap jasa keuangan padahal pegawai tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk menurunkan pengganguran, meningkatkan keuangan yang inklusif serta kedepannya dapat mengurangi kemiskinan.<sup>75</sup> Peran lembaga keuangan sebagai intermediasi bagi masyarakat memegang

<sup>74</sup> www.bi.go.id. Di Akses 29 April 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Mardani, D. A. (2018, January). Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia. al-Afkar Journal for Islamic Studies, 1, 104- 119. doi:10.5281/zenodo.1161568

peranan yang setrategis dalam mendukung program-program pemerintah. Lembaga keuangan syariah dengan karakteristiknya memiliki potensi bagi keuangan nasional dalam mewujudkan inklusifitas untuk masyarakat.<sup>76</sup> Dengan adanya keuangan inklusif program-program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah akan lebih optimal.

Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan tertinggi di Indonesia mengeluarkan strategi peningkatan inklusi keuangan karena malihat banyaknya manfaat yang dirasakan dari inklusi keuangan. Salah satu manfaatnya adalah kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan ekonomi negara menjadi stabil karena setiap lapisan masyarakat mampu mengakses lembaga keuangan dengan mudah. Strategi nasional inklusi keuangan merupakan hasil kerjasama dari Bank Indonesia, tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan dan kementrian keuangan. Strategi Nasional Inklusi Keuangan terdiri dari 6 (enam) pilar utama yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, kebijakan pertauran pendukung, fasilitas intermediasi dan saluran edukasi, dan perlindungan konsumen.<sup>77</sup>

a. Edukasi keuangan adalah memberikan edukasi berupa wawasan dan pengeahuan tentang jasa layanan keuangan, serta kesadaran berkaitan dengan produk dan pentingnya jasa keuangan. Ruang lingkupnya

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Umar, A. I., Index Of Syariah Financial Inclusion In Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 20 july 2017, 100-126

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Group Pengembangan Keuangan Inklusif Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Nasional, *Strategy for Financial Inclusion Fastering Economic Growth and Accelerating Poverty Red uction*, Juni 2012, 8.

- meliputi edukasi terhadap variasi produk/jasa keuangan, edukasi resiko dari pengguanaan jasa keuangan, edukasi tentang perlindungan nasabah, dan edukasi tentang keterampilan mengelola keuangan.
- b. Fasilitas keuangan publik adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Inisiatif dalam pilar ini berupa pemberian subsidi dan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan UMKM.
- c. Pemetaan informasi keuangan. Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat terutama yang sebenarnya dikategorikan tidak layak untuk menjadi layak atau dari *unbankable* menjadi *bankable* oleh intitusi keuangan normal, terutama kaum miskin produktif serta usaha mikro kecil. Inisiatif pilar ini meliputi: Peningkatan kapasitas melalui penyediaan pelatihan dan bantuan teknis, Sistem jaminan alternatif, Penyediaan layanan kredit yang lebih sederhana, identifikasi nasabah potensial.
- d. Kebijakan peraturan pendukung adalah kebijakan yang dibuat pemerintah dalam rangka mendorong kegiatan sosialisasi produk atau jasa keuangan sekaligus menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, juga membuat kebijakan untuk mendorong perubahan ketentuan. Disamping itu juga, pemerintah menyusun mekanisme penyaluran dana bantuan dari perbankan, memperkuat landasan hukum untuk perlindungan konsumen, serta menyusun kajian tentang inklusi keuangan untuk menentukan arah kebijakan ekonomi sebuah negara.

- e. Fasilitas intermediasi saluran ditribusi. Bertujuan dan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen potensial di masyarakat dan memperluas jangkauan layanan jasa keuangan dengan memanfaatkan metode distribusi alternatif. Beberapa aspek pada pilar ini meliputi Fasilitas forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga keuangan dengan kelompok masyarakat produktif (layak dan unbanked) untuk mengatasi masalah informasi yang asimetri, Peningkatan kerjasama antar lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha, dan Eksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa, dan saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian.
- f. Perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan, serta memiliki prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Kelima pilar SNKI ini harus ditopang oleh tiga fondasi sebagai berikut:

a. Kebijakan dan regulasi yang kondusif Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi dari Pemerintah dan otoritas/regulator.

- b. Infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung Fondasi ini diperlukan untuk meminimalkan informasi asimetris yang menjadi hambatan dalam mengakses layanan keuangan.
- c. Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif Keberagaman pelaku keuangan inklusif memerlukan organisasi dan mekanisme yang mampu mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan secara bersama dan terpadu.

Perkembangan aktivitas inklusi keuangan dapat dilihat dari satuan ukuran kerja. Adapun indikator yang dapat dijadikan acuan pengukuran inklusi keuangan adalah:<sup>78</sup>

- a. Ketersedianya akses: mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal dalam hal keterjangkauan fisik dan harga sehingga masyarakat nmampu memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik. Pengukurannya dapat dilakukan dengan
  - 1) Jumlah kantor layanan keuangan formal per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa.
  - 2) Jumlah mesin ATM/EDC/*Mobile* POS lainnya per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa.
  - 3) Jumlah agen layanan keuangan per 100.000 (seratus ribu) penduduk dewasa.
- b. Penggunaan: mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan. Penggunaan tersebut lebih kearah implementasi

-

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, Booklet Keuangan Iklusif, 14.

dalam mengaplikasikan produk ke dalam kebutuhan masyarakat. Indikator yang diukur sebagai beriku:

- Jumlah rekening tabungan di lembaga keuangan formal per
   1.000 (seribu) penduduk
- Jumlah rekening kredit di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk dewasa
- 3) Jumlah rekening uang elektronik terdaftar (*registered*) pada agen Layanan Keuangan Digital (LKD)
- 4) Persentase kredit/pembiayaan UMKM terhadap total kredit/pembiayaan di lembaga keuangan formal
- 5) Jumlah rekening kredit UMKM di lembaga keuangan formal per 1.000 (seribu) penduduk dewasa
- 6) Persentase peningkatan jumlah lahan yang bersertifikat
- 7) Jumlah penerima bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai.
- c. Kualitas: mengukur apakah atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan. Produk-produk lembaga keuangan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat baik yang berskala besar ataupun yang skala kecil. Yang diukur dengan indikator:
  - 1) Indeks literasi keuangan
  - 2) Jumlah pengaduan layanan keuangan
  - 3) Persentase penyelesaian layanan pengaduan.

d. Kesejahteraan: mengukur dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa, masyarakat sebagai pelaku yang menggunakan jasa layanan keuangan tentu akan merasakan dampak yang positif ataupun yang negatif. Tergantung bagaimana lembaga keuangan bijaksana daalm menyikap kemauan masyarakat dan masyarakat harus mampu memenuhi segala ketentuan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan.<sup>79</sup>

Sedangkan indikator berdasarkan metodologi yang dikembangkan oleh Fair Finance Guide International (FFGI) dalam buku Pemeringkatan Bank, mengenai keuangan inklusif yang harus dilakukan oleh perbankan dalam hal pemberian kredit. Indikator keuangan inklusif tersebut seperti lembaga keuangan memiliki kebijakan, layanan dan juga produk yang secara spesifik ditujukan kepada masyarakat miskin dan kelompok marginal; lembaga keuangan memiliki cabang di daerah pedesaan, tidak hanya di perkotaan; besarnya kredit yang diberikan ke sektor UMKM diatas 10% dari total keseluruhan dana kucuran kredit lembaga

keuangan; lembaga keuangan tidak mengharuskan adanya jaminan bagi para pelaku UMKM yang mengajukan pinjaman kredit; serta lembaga

\_

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Hairatunnisa Nasution, Analisis Financial Inclusion Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Medan (Studi Kasus Pembiayaan Mikro Sumut Sejahtera Ii Di Bank Sumut Syariah), *TESIS*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2017. 57

keuangan memiliki standar dan menyediakan informasi yang jelas mengenai rentang waktu proses pemberian kredit.<sup>80</sup>

Jika pengukuran kerja tersebut mampu dipenuhi dengan baik maka kesejahteraan masyarakat akan terjamin, karena dengan adanya inklusi keuangan peran dan fungsi lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi akan lebih dirasakan manfaatnya. Hal yang paling penting perlu dipahami adalah Strategi Keuangan Inklusif bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi, sehingga keterlibatan dalam Keuangan Inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas demi mencapai kesejahteraan nasional. Diharapkan dengan adanya strategi nasional inklusi keuangan akan tercipta kolaborasi antara lembaga keuangan dan pemangku kebijakan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.

## 5. Regulasi Nasional Tentang Inklusi Keuangan

Landasan Hukum *Financial Inclusion* ialah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 2011 yang berisi tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Pemerintah Indonesia menyadari betul akan pentingnya "proteksi" kebijakan kepada kelompok masyarakat miskin, agar konflik antara kelompok 1% dengan kelompok 99%, dapat diminimalisir, hal ini dilakukan melalui berbagai strategi, pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui strategi

-

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> OJK & Kemendagri, Buku Pedoman Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta, 2016.

MP3EI guna menciptakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, sedangkan percepatan penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, dilakukan melalui kemudahan akses pada lembaga keuangan. Adapun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /POJK.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat.

Bagian ketiga Rencana Inklusi Keuangan pasal 19 yang berisi:

- a. PUJK wajib melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.
- b. Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencantumkan:
  - Ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
  - 2) Sasaran kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan
  - 3) Target pengguna produk dan/atau layanan jasa keuangan
  - 4) Jadwal dan wilayah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan
  - Parameter dan bentuk pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.

Urgensi penyusunan regulasi terkait literasi dan inklusi keuangan ini antara lain:

- a. Untuk menjamin komitmen PUJK dalam menjalankan kegiatan literasi dan inklusi keuangan karena berdasarkan regulasi
- b. Kegiatan literasi dan inklusi keuagan yang dilakukan oleh PUJK lebih fokus, terarah, dan berkesinambungan sehingga memiliki hasil yang lebih signifikan dalam rangka peningkatan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat
- c. Perlunya peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat indonesia untuk mencapai masyarakat yang termasuk dalam kategori well literate
- d. Perlunya ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta perluasan akses keuangan bagi masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan dan layanan jasa keuangan oleh berbagai lapisan masyarakat.

PUJK wajib memberikan perluasan akses produk dan layanan jasa keuangan kepada masyarakat, serta menyediakan produk termasuk penciptaan skim atau pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen atau masyarakat. PUJK wajib menyusun dan menyampaikan laporan rencana dan laporan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan kepada OJK.

6. Implementasi Inklusi Keuangan di Indonesia

Inklusi keuangan menjadi resolusi yang mulai dikembangkan oleh pemerintah melalui lembaga keuangan demi terselenggaranyya program pembangunan secara optimal. Manfaat dari inklusi keuangan pada pembangunan ekonomi tidak hanya berupa semakin mampunyai masyarakat berpendapatan rendah untuk mengatur risiko keuangan dan meredam gejolak finansial, namun juga memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif dengan mempercepat penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan investasi pada pendidikan. Pemerintah menyadari bahwa untuk melayani mereka yang kurang terjangkau dunia perbankan (underserved) tidak hanya menguntungkan kelompok masyarakat tersebut melainkan juga menguntungkan perekonomian secara keseluruhan. Golongan underserved tidak hanya terdiri dari golongan miskin dan rentan secara perekonomian tetapi juga termasuk usaha mikro dan kecil yang mengalami banyak hambatan untuk mengakses produk jasa keuangan.

Penyambutan positif terhadap keuangan inklusif karena mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah sehingga masyarakat mampu mengelola dan mendistribusikan sumber keuangan sesuai prinsip syariah. Keuangan inklusif syariah merupakan upaya untuk mendorong keterlibatan yang lebih tinggi dari masyarakat terhadap praktik keuangan syariah. Keuangan syariah muncul karena melihat adanya ketidakadilan sistem keuangan akibat praktek-praktek yang memberatkan masyarakat. Ide inklusi keuangan tidak terlepas dari latar

.

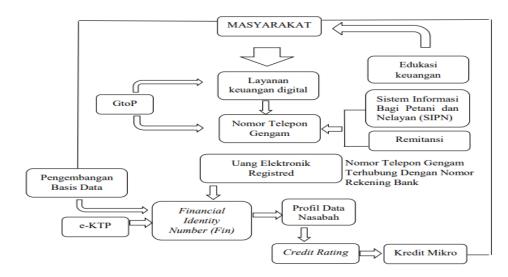
<sup>81</sup> Irfan S. Beik dan Laily D. A., Ekonomi Pembangunan Syariah, 221

belakang ketimpanan *funding* dan *financing* dalam keuangan sehingga masyarakat tidak mempunyai akses pada jasa layanan keuangan.

Inklusi keuangan di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan Negara-negara ASEAN lainnya. Sebagaimana dilaporkan oleh Bank Dunia pada Database Inklusi Keuangan Global 2015, persentase penduduk Indonesia di atas 15 tahun yang memiliki rekening pada inklusi keuangan1 hanya sebesar 35%, jauh di bawah Thailand (78%), Malaysia (81%), dan Singapura (96%). Selain mengetahui rendahnya tingkat inklusi keuangan di Indonesia, pemerintah juga telah menyadari adanya hubungan sebab-akibat yang kuat antara sistem keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan setiap individu. Implementasi inklusi keuangan di Indonesia sudah sudah diterapkan dalam berbagai bentuk program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat seperti pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dan pengembangan BMT. KUR sendiri merupakan sebuah program berbasis kredit usaha bagi UMKM dan koperasi yang sudah memenuhi standar kelayakan tetapi tidak disertai oleh agunan seperti yang sudah ditetapkan oleh perbankan. Melalui program KUR diharapkan mampu meningkatkan akses UMKM terhadap lembaga keuangan. 82 Berikut juknis program inklusi keuangan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Nusron Wahid, *keuangan inklusif membongkar hegemoni keuangan* (Jakarta: Gramedia, 2014), 110.



Gambar: 2.1 Program inklusi keuangan<sup>83</sup>

Mekanisme juknis inklusi keuangan di rancang oleh bank Indonesia pada dasarnya diperuntukkan untuk masyarakat yang mana pemerintah sebagai penyedia fasilitas (GtoP) memberikan edukasi keuangan serta iformasi tentang layanan keuangan melalui teknologi dan sistem perbankan untuk mempermudah dalam basis pengembangan data dan profil nasabah penguna layanan supaya dapat mempermudah akses ke keuangan/kredit dalam pengembangan mikro hal usaha, denga terkoneksinya berbagai transaksi masyarakat dalam penggunaan layanan keuangan maka akan mudah bagi sistem perbankan melakukan pemecahan permasalahan yang kemungkinan di dapatkan dalam aktifitas operasional bank.84

<sup>84</sup> Ibid.

\_

Deri Ofit Rodika, implementasi inklusi keuangan melalui pembiayaan warung mikro di bank syariah mandiri ke curup, *Skripsi* Jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (iain), 2018, 96.

Dengan juknis tersebut diharapkan impementasi inklusi keuangan lebih terstruktur dan sistematis agar mampu tepat sasaran. Masyarakat sebagai objek pengembangan harus mampu memahami dan menyakini bahwa inklusi keuangan adalah win solution dalam menyelesaikan kesenjangan diantara masyarakat, sehingga masyarakat lebih optimis dalam menggunakan jasa layanan keuangan terutama keuangan syariah yang terbebas dari praktek ribawi.

## C. Lembaga Keuangan Syariah

## 1. Pengertian dan Peran Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berup<mark>a penghimpunan</mark> dana, penyaluran dana dan kegiatan jasa lainnya. Dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan kovensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga konvensional baik dari tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggungjawabannya.<sup>85</sup>

Lembaga keuangan syariah merupakan tombakan bagi pelaku keuangan untuk menjalankan berbagai produk yang ada dalam operasional bank syariah. Sehingga lembaga keuangan disini menjadi intermediasi bagi

85 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2009), 29.

masyarakat untuk menjalankan usahanya guna mendapatkan kemaslahatan baik dari lembaga tersendiri maupun secara umum yakni nasabah di berbagai lembaga keuangan islam. Adanya lembaga keuangan berbasis syariah menjadi harapan ummat untuk turut membantu meluruskan transaksi keuangan yang telah lalu berada dijurang ribawi, namun keberadaannya menjadi tugas yang sangat besar untuk bisa mengalihkan kebiasaan mereka dari sistem bunga menjadi sistem syariah.

Menurut Jeni Susyanti Penekanan pada lembaga keuangan keuangan syariah (LKS) dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong pengembangan LKS dengan memperhatikan bahwa mayoritas umat islam di Indonesia pada saat ini menantikan suatu sistem LKS yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan LKS yang sesuai dengan prinsip Syariah. Sehingga, diperlukan adanya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang luas, serta mempunyai komitmen kuat untuk menerapkannya secara konsisten.<sup>86</sup>

Mempertimbangkan pandangan Jeni Susyanti dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah bahwa dalam sistem ajaran islam terlihat bahwa sistem muamalah meliputi berbagai aspek ajaran, dimulai dari persoalan hak atau hukum (*the right*) sampai kepada urusan lembaga keuangan. Dalam hal ini, lembaga keuangan diadakan dalam rangka mewadahi aktivitas konsumsi, simpanan dan investasi. Dapat juga dikatakan dalam fiqh

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah* (Malang: Empat Dua, 2016), 32.

muamalah merupakan aturan Allah yang wajib ditaati dan mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>87</sup>

Untuk dapat mendukung aktivitas perekonomian secara efektif dan efisien, sistem keuangan syariah harus memiliki struktur yang mendukung seluruh pelaku dalam melaksanakan transaksi keuangan. Secara umum, di dalam sistem keuangan syariah terdapat sistem perbankan syariah yang berperan sebagai lembaga intermediasi, industri asuransi syariah, industri gadai syariah, reksa dana syariah, perusahaan pembiayaan syariah, pemerintah, dan voluntary sector. Pada saat ini, industri keuangan syariah masih berada pada tahapan awal perkembangan, dimana lembaga keuangan syariah dan masyarakat pengguna masih dalam periode pembelajaran untuk mendapatkan bentuk sistem keuangan syariah yang paling efisien dan optimal dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Pada praktiknya, lembaga keuangan syariah akan menghadapi berbagai tipe investor dan portofolio sebagai tujuan investasinya. Lembaga keuangan syariah memiliki kemungkinan untuk menerima dana dari investor yang memiliki orientasi syariah (*religius type*) maupun yang tidak memiliki orientasi syariah (*non religius type*). Jenis investor yang tidak memiliki orientasi syariah hanya sensitif terhadap kesesuaian kegiatan operasional lembaga keuangan terhadap prinsip syariah. Dalam hal ini

\_

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Said Insya Mustafa, *Reformasi Lembaga Keuangan Usaha Mikro Menuju Pola Syariah* (Malang : Empat Dua, 2018), 45.

investasi, lembaga keuangan syariah dibatasi oleh kesepakatan dalam bentuk fatwa yang mengarahkan kegiatan investasi selalu berada dalam koridor syariah.<sup>88</sup>

# 2. Pengertian dan Produk-Produk BMT

Dalam perkembangan lembaga keuangan syariah, dikenal tiga institusi keuangan yang menggunakan istilah yang hampir sama, yaitu *baitul maal, baitul tamwil,* dan *baitul maal wat tamwil* (BMT). Menurut Ahmad Hasan Ridwan BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *baitul maal wat tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha usaha produktif dan investasi dengan meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi bawah dengan mendorong melalui produk tabungan dan pembiayaan yang bisa mengangkat ekonomi masyarakat. BMT juga merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat. <sup>89</sup>

Menurut Neni Sri Imaniyati BMT adalah kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan. BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu baitul tamwil dan baitul maal. Baitul tamwil

<sup>88</sup> Darsono Dkk, *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia* (Yogyakarta : Sinar Grafika, 2015), 114.

-

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen BMT* (Jawa Barat : CV Pustaka Setia, 2013), 23.

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil dan bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Sementara *baitul maal* menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanah nya. <sup>90</sup>

3. Peran dan Fungsi BMT Bagi Perekonomian Masyarakat

Baitul Mal Wat Tamwil juga memiliki beberapa fungsi, yaitu:91

- a. Penghimpunan dan penyaluran dana, dengan menyimpan uang di BMT,
   uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus
   (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban untuk lembaga/ perorangan
- c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- e. Sebagai satu lembaga keuangan mikro yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro dan juga koperasi dengan kelebihan

90 Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010), 74.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 364.

tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha mikro kecil tersebut.

BMT bersifat terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar terutama usaha mikro dan fakir miskin. Peran BMT dimasyarakat adalah sebagai berikut: 92

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi nonsyariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang islami, misalnya bukti transaksi, dilarang mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), 379-380.

d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

## D. Perekonomian Masyarakat Pesisir

## 1. Pengertian Masyarakat Pesisir

perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat membuat pemerintah melakukan perhatian lebih pada masyarakat pesisir. Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Kearah darat wilayah pesisiir meliputi bagian darat baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan kearah laut dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh aktivitas manusia di darat, seperti penggundulan hutan dan pencearan. Dengan kata lain, batas wilayah pesisir hanyalah garis khayal yang letaknya ditentukan oleh kondisi dan situasi setempat. 93 Dalam pendangan ekonom wilayah pesisir akan dilihat dari perspektif sosial ekonominya, artinya pendekatan yang dilakukan tidak hanya sebatas pada biologis dan

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Supriharyono, konservasi ekosistem sumberdaya hayati di wilayah pesisir dan laut tropis (Yogyakarta, pustaka pelajar, 2007), 14.

lingkungan, tetapi juga erat kaitannya dengan pemukiman dan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Dalam keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor : KEP.10/MEN/2002 tentang pedoman umum merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana 12 mil arah laut dari garis pantai untuk provinsi. Menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per. 07/Men/2008, tentang Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan, masyarakat pesisir adalah masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir dengan mata pencaharian terkait langsung maupun tidak langsung, dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri atas nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil perikanan, industri dan jasa maritim.

Pengertian nelayan sendiri adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan atau binatang air lainnya atau tanaman air. Penangkapan yang dilkukan bisa menggunakan alat modern atau alat tradisional dalam artian, masyarakat modern adalah masyarakat yang dalam mengerjakan sesuatu menggunakan mesin, sedangkan masyarakat tradisional tidak menggunakan mesin. Nelayan diklasifikasikan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Satria, A. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 2002).
125.

berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan atau pemeliharaan, antara lain sebagai berikut:<sup>95</sup>

- a. Nelayan atau petani ikan penuh adalah orang yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan atau pemeliharaan ikan atau tanaman air.
- b. Nelayan atau petani ikan sambilan utama adalah orang yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan atau pemeliharaan ikan atau tanaman air.
- c. Nelayan atau petani ikan sambilan tambahan adalah orang yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan atau pemeliharaan ikan atau tanaman air.

Adapun berbagai tipe pekerjaan dari masyarakat yang hidup dan tinggal di wilayah pesisir adalah sebagai berikut:<sup>96</sup>

- a. Nelayan penangkap ikan dan hewan-hewan laut lainnya
- b. Petani ikan (budidaya air payau atau tambak dan budidaya laut)
- c. Pemilik atau pekerja perusahaan perhubungan laut
- d. Pemilik atau pekerja industri pariwisata
- e. Pemilik atau pekerja pertambangan dan energi
- f. Pemilik atau pekerja industri maritim (galangan kapal, *coastal and ocean engineering*)

<sup>95</sup> Afrian Andrianto, Tingkat Kemiskinan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus di Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran). *Skripsi*. Fakultas Pertanian Universitas Lampung Bandar Lampung 2017, 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Ali Imron, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Klaster Ikan (Studi pada Masyarakat Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung). *Skripsi*. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas lampung bandar lampung 2017, 66

Kehidupan masyarakat pesisir sanggat unik dan komplek karena banyaknya potensi pekerjaan yang bisa dilakukan, walaupun ruang lingkupnya selalu bersinggungan dengan laut. Permasalahan hari ini adalah, untuk usaha skala besar mayoritas dikuasai oleh investor diluar daerah sehingga masyarakat pribumi hanya mampu mengerjakan skala kecil dan profit oriented yang relatif sangat minim. Oleh sebab itu, perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah dan para pemangku kebijakan serta stakekholder untuk bersama-sama mengembangkan dan memberikan kehidupan yang lebih memadai kepada masyarakat pesisir, baik secara ekonomi, sosial dan budaya.

# 2. Karakteristik Perekonomian Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir meiliki karakteristik yang berbeda dangan masyarakat agraris. Masyarakat agraris menghadapi sumber daya yang terkontrol dengan pola pengelolaan lahan untuk produksi sebuah komuditas dengan hasil yang reltif bisa di prediksi. Krakteristik tersebut sangat berbedan dengan masyarakat nealayan, dimana pola pengelolaan sumber daya tidak terkontriol. Dengan kata lain, pengelolaannya harus berpindah-pindah dari tempat satu dengan tempat lainnya karena kondisi alam yang tidak tetap, perpindahan tersebut juga diikuti oleh tingkat risiko yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, seorang nelayan memiliki kepribadian yang keras, tegas, dan penuh semangat.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 17 ayat 2 menjelaskan pengertian nelayan tradisional yaitu yang menggunakan kapal tanpa mesin, dilakukan secara turun temurun, memiliki daerah penangkapan ikan yang tetap dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. UU ini juga menyebutkan mengenai nelayan modern dan pengusaha perikanan sebagai pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Sistem pengelolaan sangat bergantung kepada sumberdaya pemanfaatannya dilakukan oleh nelayan dan pembudi daya ikan. 97 Ikan menjadi media utama dalam mencari nafkah dengan asumsi ikan di laut tidak akan pernah habis. Iklim yang tidak menentu menjadi problem utama bagi nelayan karena akses menuju laut sangat sulit dan sumber daya (ikan) menghindar lebih cepat.

Masyarakat nelayan dapat digolongkan menjadi 4 tingkatan yang dilihat dari kapasitas teknologi (alat tangkap dan armada), orientasi pasar dan karakteristik hubungan produksi, yaitu nelayan tradisional yang biasanya lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri dan tidak menggunakan mesin serta masih melibatkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja utama, teknologi penangkapan lebih maju dengan mengguanakan mesin dan berorientasi pada peningkatan keuntungan dan anak buah kapal tidak harus dari keluarga sendiri, dan skala usaha besar, jumlah tenaga kerja banyak dari anak buah kapal hingga manajer karena menggunakan struktur organisasi yang lebih kompleks, teknologi lebih

.

<sup>97</sup> Undang-Undang Perikanan 2007 (UU RI NO. 27 Th. 2007), (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 26.

modern dan kapasitas teknologi lebih memadai dalam memproduksi dengan berorientasi pada *profit-oriented*.

Adapun berbagai aspek-aspek masyarakat pesisir adalah sebagai berikut:<sup>98</sup>

# a. Sistem Pengetahuan

Pengetahuan umumnya didapatkan dari warisan orang tua atau pendahulu mereka berdasarkan pengalaman empiris. Kuatnya pengetahuan lokal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kelangsungan hidup mereka sebagai nelayan. Pengetahuan-pengetahuan lokal (*indigenous knowledge*) seperti teknik penangkapan ikan, teknik pemeliharaan sampan dan teknik selam-menyelam tersebut merupakan kekayaan intelektual mereka yang hingga kini terus dipertahankan.

## b. Sistem Kepercayaan

Secara teologis, nelayan masih memiliki kepercayaan cukup kuat bahwa laut memiliki kekuatan magis, sehingga diperlukan perlakuan-perlakuan khusus dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan agar keselamatan dan hasil tangkapan semakin terjamin. Tradisi tersebut antara lain tradisi suwonke suhu atau dukun-dukun dalam rangka mendapatkan keselamatan saat melaut dan memperoleh hasil tangkapan yang baik. Sistem kepercayaan hingga saat ini masih mencirikan kebudayaan nelayan. Namun dengan perkembangan teologis seiring meningkatnya tingkat pendidikan atau intensitas pendalaman terhadap

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> Ali Imron, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Klaster Ikan (Studi pada Masyarakat Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung) 2018, 156.

nilai-nilai agama, upacara-upacara tersebut bagi sebagian kelompok nelayan hanyalah sebuah *ritualisme*. Maksudnya, suatu tradisi yang terus dipertahankan meskipun telah kehilangan makna sesungguhnya. Jadi, tradisi tersebut dilangsungkan hanya sebagai instrument stabilitas sosial dalam komunitas nelayan.

## c. Peran Perempuan

Aktivitas ekonomi perempuan merupakan gejala yang sudah umum bagi kalangan masyarakat strata bawah, tak terkecuali perempuan yang berstatus sebagai istri nelayan. Istri nelayan umumnya selain banyak bergelut dengan urusan domestik rumah tangga juga tetap menjalankan fungsi-fungsi ekonomi baik dalam kegiatan penangkapan di perairan dangkal, pengolahan ikan maupun kegiatan jasa dan perdagangan. Menurut Pollnac dalam pembagian kerja keluarga nelayan adalah pria menagkap ikan dan anggota keluarga yang perempuan menjual ikan hasil tangkapan tersebut. Peran perempuan ini merupakan faktor penting dalam menstabilkan ekonomi pada beberapa masyarakat penagkap ikan karena pria mungkin menangkap ikan hanya kadang-kadang sementara perempuan bekerja sepanjang tahun. Istri nelayan pada umumnya hanya menjalankan fungsi domestik dan ekonomi, dan tidak sampai pada wilayah sosial politik. Namun sebenarnya isteri nelayan juga kreatif dalam menciptakan pranata-pranata sosial yang penting bagi stabilitas sosial pada komunitas nelayan. Hal ini tampak, misalnya pada pengajian,

arisan serta simpan pinjam yang juga memiliki makna penting dalam membantu dalam mengatasi ketidakpastian penghasilan ekonomi.

## d. Posisi Sosial Nelayan

Posisi sosial nelayan dalam masyarakat juga menarik dicermati secara kultural maupun struktural. Hal ini disebabkan banyak masyarakat nelayan yang memiliki status yang relatif rendah. Rendahnya posisi sosial nelayan juga diakibatkan keterasingan nelayan. Keterasingan tersebut menyebabkan masyarakat bukan nelayan tidak mengetahui lebih jauh bagaimana dunia nelayan itu serta sedikitnya waktu dan kesempatan nelayan untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan banyaknya alokasi waktu nelayan untuk kegiatan penangkapan ikan dari pada untuk bersosialisasi dengan masyarakat bukan nelayan yang memang secara geografis relatif jauh dari pantai.

Lingkungan yang pada di pemukiman masyarakat pesisir memberikan kesan yang negatif karena masih kumuh sehingga tingkat kesejahteraan masih rendah. Masyarakat pesisir memiliki pekerjaan yang sangat unik, karena ketergatungan pada musim, harga, dan pasar. Dengan kata lain, masyarakat pesisir memiliki karakter yang bergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:

a. Kehidupan masyarakat nelayan dan petani ikan menjadi amat tergantung pada kondisi lingkungan atau rentan pada kerusakan khususnya pencemaran atau degradasi kualitas lingkungan.

- b. Kehidupan masyarakat nelayan sangat tergantung pada musim. Ketergantungan terhadap musim ini akan sangat besar dirasakan oleh nelayan-nelayan kecil.
- c. Persoalan lain dari kelompok masyarakat nelayan adalah ketergantungan terhadap pasar. Hal ini disebabkan komoditas yang dihasilkan harus segera dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau membusuk sebelum laku dijual.
- Potensi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Lembaga Keuangan Syariah

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan salah satu konsepsi program Departemen Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2001 yang dirancang secara umum bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumberdaya lokal dan berkelanjutan, sehingga dapat mendorong dinamika pembangunan sosial ekonomi di kawasan pesisir. 99 Pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat pesisir akan mampu meningkatkan taraf hidup dan lebih mandiri karena program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dibuat untuk mensejahterakan masyarakat.

٠

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> Andreas dan Enni Savitri, peran pemberdyaaan masyarakat pesisir dan modal sosial, Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Kabupaten Meranti Dan Rokan Hilir, cetakan I agustus, 2019,

Kemandirian masyarakat adalah wujud dari pengembangan kemampuan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan dan memperbaiki material secara adil dan merata yang ujungnya berpangkal pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri berdiri pada satu pemikiran bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakatnya. 100 Kebebasan yang dimaksud adalah memudahkan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada sehingga akan terciptak optimalitas dalam produktivitas di tengah-masyarakat. Masyarakat pesisir yang sering termajinalkan akibat banyaknya peraturan pemerintah yang mendukung perusahaan-perusahaan besar membuat para nalayan kesulitan dalam mengelola sumber daya alam.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan, serta masih perlu usaha sungguh-sungguh untuk mewujudkannya<sup>101</sup> Pemberdayaan dalam dimensi ekonomi seperti ini dimaknai sebagai akses masyarakat atas sumber

-

Modim, Hi. Masita, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Panorama Pantai Disa, Kec. Sahu, Kabupaten Halmahera Barat), Skripsi: Universitas Hasanuddin, 2012, 55.

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> Lihat Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

pendapatan untuk hidup layak. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berdaya guna yakni melalui Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM). Pemerintah tentunya memiliki peranan penting sebagai pemegang kebijakan (regulator), penggerak (dinamisator) dan fasilitator dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui UKM.



#### **BAB III**

## HASIL DATA PENELITIAN

## A. Gambaran Umum Lokasi dan Obyek Penelitian

## 1. Desa Glodog

Dahulu kala hiduplah seorang dukun sakti yang bernama Ki Klelro dia mempunyai dua orang anak kembar laki-laki dan perempuan. Istri Ki Klero meninggal ketika melahirkan anak kembar tersebut, karena merasa kerepotan mengurus kedua anaknya sang dukun kemudian menitipkan anak perempuannya kepada temannya seorang pembuat keris pusaka yang bernama Empu Cangan di desa sebelah.

Singkat cerita setelah dua puluh tahun berlalu dan Ki Klero sudah meninggal dunia, anak laki-laki Ki Klero yang bernama Ngepreh sedang memancing di sungai tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang gadis yang bernama dewi bentaro dari desa sebelah dan setelah berkenalan kedua orang tua tersebut saling jatuh cinta, hubungan mereka berlangsung sampai beberapa tahun, sampai tiba saatnya Ngepreh melamar Dewi Bentaro.

Orang dewi bentaro yang ternyata adalah empu cangan terkejut setelah mendengar cerita calon menantunya bahwa dia adalah putra dari Ki Klero dukun sakti dari desa sebelah yang ternyata adalah ayah kandung dari dewi bentaro sendiri. Kemudian empu cangan memberitahu ngepreh bahwa dewi bentaro saudara kembarnya yang dulu di titipkan oleh Ki Klero kepadanya, mendengar cerita itu ngepreh marah, dia mengira itu hanya akalakalan empu cangan untuk menolak lamarannya.

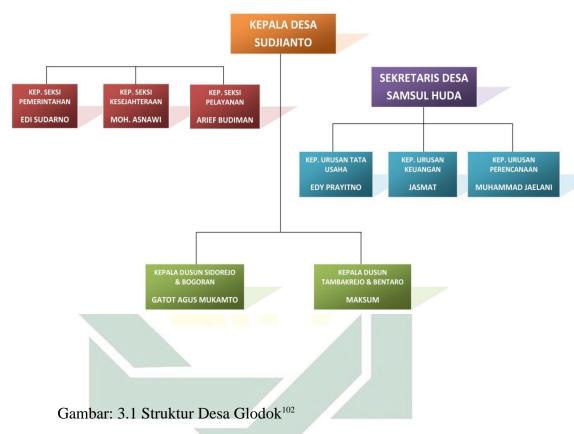
Kemudian ngepreh kabur bersama dewi bentaro dan menikah tanpa se izin empu cangan, hingga dikaruniai anak satu laki-laki dan satu perempuan, mpu cangan mendengar kabar itu empu marah bukan kepalang, ia kemudian mencabut kerisnya dan mengacungkannya ke utara yakni ketempat tinggal ngepreh dan dewi bentaro, dari ujung keris empu cangan keluarlah puluhan batu besar dan terbang ke arah tempat tinggal ngepreh dan dewi bentaro.

Ngepreh dan dewi bintaro terkejut mendengarkan suara gemuruh glodog-glodog-glodog di belakang rumahnya, kemudian ngepreh berlari sekuat tenaga menyelamatkan kedua anaknya dari hujan batu kiriman empu cangan, ia berhasil menyelamatkan diri namun sayang Dewi Bentaro istri tercinta yang juga saudara kandungnya tewas tertimbun batu besar itu. Mengetahui istrinya tewas oleh santet dari empu cangan, ngepreh pun marah dan mendatangi empu cangan untuk menuntut balas, terjadilah pertarungan yang sengit antara empu cangan dan ngepreh dan akhirnya ngepreh berhasil menusukkan kerisnya tepat dileher empu cangan. Empu canganpun roboh bersimbah darah dan sebelum meninggal sang empu mengeluarkan kutukan bahwa kelak jika penduduk desa nya dan desa tempat tinggal ngepreh menikah maka salah satu dari pasangannya akan mati mengenaskan.



# STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA GLODOG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN





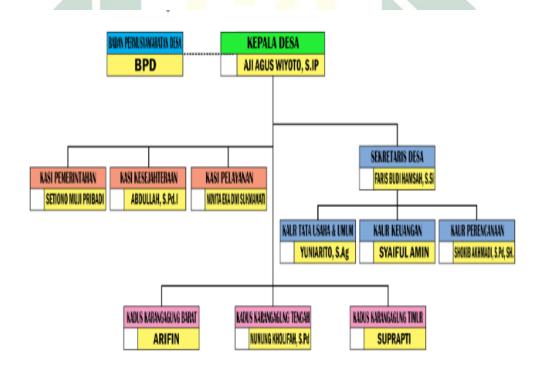
## 2. Desa Karangagung

Menurut cerita sesepuh masyarakat, nama Karangagung berasal dari bahasa jawa. Karang artinya bebatuan karang, Agung artinya air laut yang besar. Karang dan Agung mencerminkan kondisi sosio-kultural ekonomi desa. Karang dan Agung juga merupakan simbol karakter masyarakat desa yang Keras, Kuat, Ulet, dan Kokoh sekokoh batu karang. Dan memiliki semangat menggelora laksana

<sup>102</sup> Dokumentasi Desa Glodog

gelombang ombak besar (Agung) yang bisa menghanyutkan dan mengalahkan apa saja yang ada dihadapannya.

Desa Karangagung juga dikenal dengan sebutan Ngaglik. Terbagi menjadi 3 Wilayah Sejarah, wilayah barat Njangon, wilayah tengah Ngaglik dan wilayah timur Nyamplung. Desa Karangagung memiliki Tiga tempat bersejarah yaitu, *Pertama*, makam Sarah yang kini menjadi Balai dan Kantor Pemerintah Desa, diyakini warga masyarakat sebagai tempat keramat dan bernuansa mistis. *Kedua*, Pasar Desa yang dulunya bernama Pasar Kisik, sekarang tinggal puing-puing, dan telah dibangun kembali sebagai Gedung Serbaguna Desa Karangagung. *Ketiga*, Masjid Al-Asyhar yang terletak di Desa Karangagung sebelah barat.



Gambar: 3.2 Struktur Desa Karangagung<sup>103</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> Dokumen Desa Karangngagung.

## 3. BMT Surya Raharja

BMT Surya Raharja didirikan pada tahun 2011 di Pasar Pahing Palang. Dipelopori oleh Bapak Taufiqurrochman, S.Ag. Pada tanggal 5 Juli 2014 Koperasi BMT Surya Raharja telah resmi berbadan hukum dengan nomor pengesahan akta pendirian koperasi 19/BH/KDK.13.28/12VII/2014 atas nama Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah yang berkedudukan di Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Setelah diterbitannya peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Kecil dan Menengah Nomor: tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keungan Syariah Koperasi yang sudah berjalan pada saat peraturan Menteri ini berlaku. Akan tetapi melaksanakan usahanya dengan ketentuan wajib menyesuaikan anggaran dasar dengan peraturan ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya peraturan ini yaitu tanggal 8 Oktober 2015. maka pada tanggal 18 Januari 2016 KJKS (Koperasi Jasa dan Keuangan Syariah) BMT Surya Raharja berganti menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) BMT Surya Raharja.

Koperasi BMT Surya Raharja didirikan dengan maksud menggalang kerjasama para anggota yang memajukan kepentingan ekonomi anggota pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Selain itu, untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Saat ini, BMT Surya Raharja sudah memiliki kantor yang tetap berada di Jl. Gresik No.299 Gresik Gresikharjo Palang Tuban

a. Struktur BMT Surya Raharja

## Dewan Pengawas

- 1) Pengawas I: Taufiqurrochman S.Ag
- 2) Pengawas II: Drs. Kasuri S.pd
- 3) Pengawas III : Hikma Suryo Aji S.pd 4.

## Dewan pengurus

- 1) Ketua: Imam Nurosyidi M.Ag
- 2) Ketua: Tamtomo S.E
- 3) Sekertaris: Muhammad Wijaya S.E
- 4) Bendahara I: Rumikah S.E
- 5) Bendahara II : Moh. Taufiqurrahman
- 6) Penasehat dan pengawas Syariah : H.Fatturochman S.Ag M.pd.i

# b. Produk-produk BMT Surya Raharja

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Surya Raharja memiliki beberapa produk dalam operasionalnya. Adapun produk-produk tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Simpanan
  - a) Simpanan Mudharabah

Simpanan Mudharabah adalah simpanan yang terhimpun dari masyarakat yang bisa diambil sewaktu-waktu setiap hari kerja.

# b) Simpanan Haji

Simpanan Haji adalah simpanan yang diperuntukkan bagi anggota KSPPS BMT Surya Raharja untuk perencanaan ibadah haji. Berdasarkan pirinsip syariah dengan akad mudharabah. Minimal tabungan yang harus dimiliki oleh anggota sejumlah Rp. 25.000.000.00,- . Adapun pada produk ini terdapat beberapa keuntungan yaitu:

- Setoran lunas langsung didaftarkan ke perbankan mitra BMT Surya Raharja.
- Fasilitas <mark>tal</mark>ang<mark>an</mark> haji.

## c) Simpanan Qurban dan Aqiqah

Simpanan Qurban dan Aqiqah adalah produk simpanan yang ditujukan kepada anggota dalam menyiapkan dana qurban ataupun aiqah. Produk ini berdasarkan pirinsip syariah dengan akad mudharabah. Adapun pada produk ini terdapat beberapa keuntungan yaitu:

- Dana yang disimpan Insyaallah berkah dan bermanfaat.
- Penarikan dapat dilakukan 1 bulan sebelum waktu pelaksanaan aqiqah dan qurban.

## d) Simpanan Walimah

Simpanan walimah adalah simpanan ini diperuntukkan untuk anggota yang akan mempunyai hajat, baik khitan ataupun menikah, bagi hasil kompetitif dan bisa diambil sewaktu-waktu akan melaksanakan hajat.

## e) Simpanan Pendidikan

Simpanan yang terhimpun sari masyarakat dan dapat diambil saat awal semester pendidikan, yang merupakan simpanan khusus untuk keperluan pendidikan.

## f) Simpanan Perumahan

Simpanan perumahan adalah simpanan khusus untuk pembuatan atau renovasi rumah

## g) Arisan

Arisan berhadiah yang diundi setiap 8 bulan sekali sampai 30 hari. Bagi yang beruntung akan mendapakan hadiah sebesar Rp. 300.000,- dan berhak untuk tidak ikut lagi.

## h) Titipan Investasi

Simpanan ini diperuntukkan untuk anggota dan masyarakat umum yang ingin mengivestasikan hartanya di BMT Surya Raharja.

## i) Simpanan berjangka (deposito)

Simpanan yang didasarkan pada prinsip mudhorobah. Jenis simpanan investasi berjangka dengan waktu yang relatif lama dengan prinsip mudharabah meliputi:

• Simpanan Berjangka 3 Bulan (Nisbah 40%).

- Berjangka 6 Bulan 50 (Nisbah 50%).
- Simpanan berjangka 12 bulan 60 (Nisbah 60%).

## 2) Pembiayaan

#### a) Murabahah

Pembiayaan dengan sistem jual beli yang pembayarannya secara tunai pada saat jatuh tempo. BMT mendapatkan keuntungan dari selisih antara harga jual dengan harga belinya.

## b) Mudharabah

Pembiayaan untuk modal kerja atau investasi antara dua pihak, dimana BMT sebagai Shohibul Maal (penyedia modal) dan anggota sebagai Mudlorib (pengelola usaha) atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah yang disepakati bersama dalam akad perjanjian.

# c) Musyarakah

Pembiayaan investasi, dimana terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengelola usaaha bersama dengan modal yang telah disepakati. Bagi hasil dibagi sesuai dengan prosentase modal yang disetor.

## d) Hawalah

Pembiayaan untuk pengalihan utang atas barang dan jasa anggota kepada BMT dan selanjutnya anggota membayar langsung kepada BMT sesuai dalam akad perjanjian.

#### e) Ar Rahn

Pembiayaan gadai, BMT mendapat jasa dari masyarakat atas barang yang dititipkan/ digadaikan di BMT

## f) Qardul Hasan

Pembiayaan anggota yang bertujuan untuk kebajikan dengan pertimbangan sosial yang tidak dikenakan bagi hasil ataupun margin, anggota hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjamannya saja.

## 3) Jasa

- a) Pembayaran Rekening Listrik, Telepon, Speedy
- b) Pengurusan STNK dan BPKB
- c) Servis elektronok & Listrik (on call).

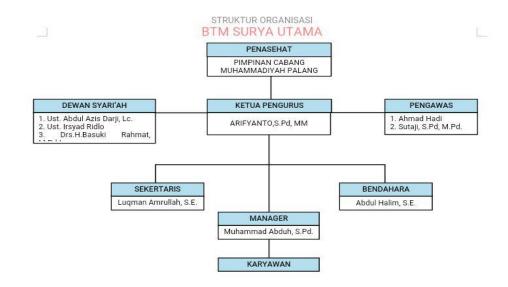
## 4. Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM) Surya Utama

KSPPS BTM Surya Utama merupakan koperasi primer yang didirikan oleh warga masyarakat, warga Persyarikatan serta Majelis. Ekonomi Muhammadiyah PDM Tuban yang kegiatan usahanya berdasarkan pola syari'ah. KSPPS BTM Surya Utama didirikan pada tanggal 2 April 2002, dengan Surat Keputusan Kepala Kantor dan UKM Kabupaten Tuban atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM Nomor: 188.2/41/BH/424.75/2002 tanggal 24 September 2002. Dinamakan BTM Surya Utama karena kata "Surya" berasal dari lambang logo Muhammadiyah, sedangkan kata "Utama" merupakan singkatan dari Maju, Dinamis, dan Amanah. Dengan moto amanah dan barokah yang dilihat dari dua sisi, yakni amanah dari penghimpunan dana yang berarti

bertanggungjawab dan dipercaya dalam menghimpun dana dari masyarakat. Barokah dari segi pembiayaan, dengan harapan pembiayaan yang diberikan kepada anggota menjadi barakah. 56 KSPPS BTM Surya Utama berlokasi di Tuban dikarenakan merupakan lokasi yang strategis berdekatan dengan pusat perdagangan, usaha-usaha industri kecil dan rumah tangga sehingga mempermudah untuk mengamati perkembangan ekonomi yang ada di masyarakat, juga mempermudah dalam pemasaran produk-produknya.

Produk yang dimiliki oleh BTM Surya Utama adalah dari penyaluran dana ada pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, IMBT, dan Qardh. Sedangkan untuk produk penghimpunan dana ada tabungan wadiah, deposito wadiah, dan berbagai produk lain seperti produk arisan dan talangan haji. KSPSS BTM Surya Utama memberikan pinjaman modal kepada para pengusaha kecil dan mikro dengan sistem bagi hasil dengan sistem syariah, terbukti KSPPS BTM Surya Utama makin berkembang dan diminati masyarkat sebagai lembaga keuangan alternatif.

## a. Struktur BTM Surya Utama



# Gambar: 3.3 Strutur BTM Surya Utama<sup>104</sup>

#### b. Produk-produk BMT Surya Utama

- 1) Musyarakah (Kemitraan atau Bagi Hasil) Musyarakah berasal dari kata syirkah yang artinya adalah bekerja sama. Musyarakah berarti akad antara orang-orang yang berserikat 58 dalam modal dan keuntungan. Dalam KSPPS BTM Surya Utama menggunakan akad Musyarakah betujuan untuk menambah penghasilan antara pemilik modal dan pengelola secara syariah dengan cara mengangsur. Besarnya nisbah bagi hasil yang ditetapkan di KSPPS BTM Surya Utamayaitu sebesar 2,5% per bulan, apabila seorang anggota tidak lagi aktif dalam bekerjasama tetap ada suatu bagi hasilnya yaitu sebesar 1,45% per bulan.
- 2) Mudharabah (Kemitraan atau Bagi Hasil) Produk simpanan yang inovatif dan kreatif yang mengerti dan memahami kebutuhan masyarakat. Simpanan mudharabah memberi keamanan dan keuntungan atas dana anggota. Dengan seluruh minimal Rp. 1.000.000,- anggota sudah memiliki kartu anggota. Keuntungan simpanan mudharabah di KSPPS BTM Surya Utama yaitu : 1) Dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*) 2) Bagi hasil otomatis dikreditkan ke SIWADA (simpanan wadiah) 3) Tidak dipungut administrasi 4) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan Besarnya nisbah bagi hasil yang ditetapkan di KSPPS BTM Surya

٠

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> Dokumentasi BTM Surya Utama

Utama yaitu sebesar 2,5% per bulan, apabila seorang anggota tidak lagi aktif dalam bekerjasama tetap ada suatu bagi hasilnya yaitu sebesar 1,45% per bulan. Bagi hasil yang kompetitif karena anggota akan memperoleh pendapatan tinggi dan dapat diberikan bagi hasil 59 spesial bagi anggota yang menempatkan dananya dalam jumlah tertentu. Untuk jangka waktu simpanan fleksibel, anggota dapat menentukan jangka waktu simpanan sesuai dengan kebutuhan keuangan anggota, untuk jangka waktu yang tersedia selama 3,6 bulan atau 12 bulan.

- 3) Murabahah (Jual Beli) Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Di KSPPS BTM Surya Madinah, murabahah ini seperti leasing, karena konsumtifnya lebih rendah. Besar keuntungannya sebesar 2,5%.
- 4) Ijarah Muntahia Bit Tamlik (Sewa Beli) Di KSPPS BTM Surya Utama banyak sekali yang melakukan pembiayaan IMBT, dengan berbagai kebutuhan secara garis besar digunakan untuk modal usaha, pembiayaan yang diajukan mulai dari Rp. 100.000,- dengan menggunakan jaminan BPKB atau surat tanah untuk menjamin apabila suatu saat nanti anggota tidak bisa melunasi pembiayaannya. Untuk harga jaminan harus lebih besar dari biaya pembiayaannya.
- 5) Qardul Hasan Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Di KSPPS BTM Surya Utama untuk yang digunakan untuk

sosial seperti pembangunan masjid cukup mengembalikan pokoknya saja.

6) Simpanan Al-Wadiah Hampir sama dengan tabungan atau rekening tabungan tanpa ada potongan adminstrasi. Setoran awal Rp. 10.000,-dan bisa lebih tergantung minat dari anggota untuk setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-. Bagi hasil dalam produk wadiah ini dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian dan dilakukan setiap akhir bulan dan langsung dikredit atau ditambahkan pada saldo tabungan yang tercatat pada pembukuan.

## B. Tingkat literasi Masyarakat Pesisr Pantai Utara Kabupaten Tuban

Peneliti untuk mendapatkan beberapa informasi yang kredibel dari informan. Maka dalam penelitian ini, peneliti memetakan beberapa sumber informasi yang dibutuhkan baik berupa data maupun informasi langsung dari informan. Berikut adalah tabel informan tingkat literasi keuangan syariah di pesisir Pantai Utara Kabupaten Tuban.

Tabel 3.1 Koding Informan

Nama	Informan	Instansi
A	BTM Surya Utama	LKMS
В	BMT Surya Raharja	LKMS
Kades Glodog	Tokoh Masyarakat Glodog	Desa
Kades Karangagung	Tokoh Masyarakat	Desa
	Karangagung	
Sukinten	Masyarakat 1	Warga Desa
Inawaroh	Masyarakat 2	Warga Desa

Kasmuah	Masyarakat 3	Warga Desa
Siti Kusnuriyah	Masyarakat 4	Warga Desa
Nawaroh	Masyarakat 5	Warga Desa
Iskandar	Millenial	Warga Desa

Literasi keuangan syariah merupakan suatu aktivitas yang berkenaan pada kemampuan seseorang memahami konsep-konsep lembaga keuangan yang berbasis syariah. Sehingga dari pengetahuannya bisa menerapkan secara benar dan terarah. Dari pentingnya literasi keuangan syariah diharapkan dapat digunakan secara tepat sasaran guna bisa mengangkat kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir pantai utara Kabupaten Tuban.

Dalam penelitian ini, peneliti wawancara dengan Kades Glodog. Karena informan ini tidak mengetahui apa itu literasi keuangan syariah maka peneliti menjelaskan secara detail terlebih dahulu sehingga beliau faham dan menghasilkan penuturan bahwa. 105

"Masyarakat desa glodog disini Pak, memang tergolong menengah kebawah. Namun juga sebagian dari mereka memiliki usaha yang dilengkapi dengan keahliannya tapi terhalang oleh modal usaha. Karena mereka itu sisa-sisa orang kuno jadi tidak mengetahui tatacara memproleh modal usaha padahal sekarang sudah banyak BMT disekitar desa ini."

Penjelasan menurut Kades Glodog adalah penghambat masyarakat dalam menggunakan produk-produk BMT adalah pengetahuan masyarakat. Sehingga masyarakat awam tidak mengetahui jelas tentang keberadaan lembaga keuangan syariah di desa nya. Namun berbeda lagi yang dituturkan oleh Kades Karangagung bahwa. 106

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> Kepala Desa Glodog, Wawancara, Kantor Desa, 10 Mei 2020.

<sup>106</sup> Kepala Desa Karangagung, Wawancara, Rumah Kepala Desa, 10 Mei 2020

"Disini Pak, masyarakatnya berpenghasilan menengah kebawah. Untuk bergabung menjadi nasabah itu rasa sulit karena mereka tergolong pendidikan kebawah yang tidak bisa baca tulis sehingga mau menggunakan layanan LKS saya rasa tidak mungkin. Terlebih juga disini Pak masyarakatnya masih kental dengan bang Titil yang gak repot Cuma kerumahnya pinjam uang langsung dikasih tanpa ada syarat yang berlaku."

Peneliti jelaskan menurut Kades Karangagung bahwa faktor penghambat pengetahuan masyarakat di Desa Karangagung adalah lemah nya pendidikan masyarakat dan sistem tradisional menggunakan jasa kredit rumahan yang dinilai gampang dan simpel. Selanjutnya peneliti bertamu ke tokoh pemuda atau millenial guna mencari informasi yang akurat tentang literasi keuangan dalam menggunakan produk BMT. Beliau menuturkan bahwa.<sup>107</sup>

"Warga disini Pak gak tau gitu-gituan Pak, mereka taklepas dari pekerjaan dan tdtak sempat untuk ikut bergabung. Karena mereka semangat untuk tahu nggak ada Pak. Yang dipikirkan hanya gimana caranya besok dapat uang, dapat bantuan dari pemerintah berupa dana sosial. Namun Pak tidak semuanya begitu ada sebagian mereka memanfaatkan adanya LKS sebagai alternatif ekonomi guna mendongkrak usahanya dengan pinjam ke BMT"

Penuturan dari tokoh kepemudaan bahwa di pantai pesisir ada sebagian yang tidak peduli dan ada juga yang memanfaatkan adanya LKS. Yang tidak peduli beranggapan bahwa keberadaannya tidak menjadi pengaruh untuk bisa berubah dari mata rantai keadaan ekonominya. Namun sebaliknya bagi sebagian yang memanfaatkan adanya LKS sebagai jalan alternatif ekonomi untuk turut membantu dalam kesulitan modal usahanya. Dari beberapa informan Kades Glodog, Karangagung peneliti simpulkan bahwa.

٠

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> Iskandar, Wawancara, Rumah Informan, 15 Mei 2020.

- Masyarakat tidak mengetahui apa itu Lembaga Keuangan Syariah atau BMT
- 2. Masyarakat tidak mengetahui nilai positif BMT untuk keuangan nya
- 3. Masyarakat tidak mengetahui produk-produk BMT
- 4. Masyarakat masih terjerumus pada kredit rumahan

Selanjutnya peneliti melanjutkan penelitian lapangan dengan mengunjungi beberapa masyarakat sekitar di 2 (dua) desa tersebut guna mendapatkan informasi yang mendalam terkait literasi keuangan syariah

SUKINTEN Perempuan Usia 30 Tahun Alamat Dusun Tambakrejo
 Desa Glodog, peneliti mencoba mencari informasi menurut
 pengetahuan tentang mengelola keuangan dan literasi keuangan syariah.
 Dituturkan oleh beliau yang aktivitas setiap harinya sebagai Penjual
 Sayur keliling bahwa.<sup>108</sup>

"Pendapatan Rp.1.500.000.-perbulan usaha ada kenaikan setelah memperoleh pembiayaan menjadi Rp.1.750.000.- per bulan, belum bisa mengelola keuangan karena kebutuhan keluarga yang belum mencukupi, belum bisa menabung secara rutin. literasi keuangan penting untuk mengambilan keputusan tidak pernah mengalami kredit macet tidak ada kendala akses pembiayaan di BMT"

"(lembaga keuangan BMT) tidak mengetahui / mengerti istilah pembiayaan syariah baik Murabahah musyarokah / mudharabah, Rahn syarat pinjaman KTP kartu keluarga dan jaminan tabungan diterangkan hak dan kewajiban saat meminjam tapi lupa tidak bisa menghitung margin percayabahwa BMT sebagai tempat meminjam yang mudah percaya amanah uangnya ditabung di BMT puas dan nyaman pinjam di BMT jika punya uang lebih digunakan untuk modal usaha menabung di BMT untuk berjaga-jaga mempunyai pinjaman di BMT dan mempunyai tabungan Rp.1.000.000,-kemudian puas dengan pelayanan BMT dan tidak mengalami kesulitan melakukan pembiayaan di BMT."

\_

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> Sukinten, *Wawancara*, Pinggir Jalan Desa Glodog, 20 Mei 2020.

2. Kemudian informan berikutnya adalah INAWAROH Perempuan Usia

34 Tahun Alamat Dusun Tambakrejo Desa Glodog. Beliau menuturkan tentang literasi dan pengelolaan keuangan syariah nya bahwa. 109

"Pendapatan Rp.2.100.000.-perbulan, usaha ada kenaikan setelah memperoleh pembiayaan menjadi Rp.3.000.000.- per bulan, kemudian belum bisa mengelola keuangan karena penghasilan pas pasan, literasi keuangan penting untuk pengetahuan tentang tidak pernah mengalami kredit macet, kemampuan keuangan menabung Rp10.000 per hari tidak ada kendala akses pembiayaan di BMT inklusi keuangan penting supaya bisa mengikuti jaman. Tidak mengetahui / mengerti istilah pembiayaan syariah baik Murabahah musyarokah / mudharabah, Rahn syarat meminjam ktp kartu keluarga jaminan Tabungan diterangkan hak dan kewajiban saat meminjam bisa menghitung margin percaya bahwa BMT sebagi tempat meminjam yang mudah percaya amanah uangnya ditabung di BMT puas dan nyaman pinjam di BMT jika punya uang lebih dig<mark>unakan untuk modal u</mark>saha menabung di BMT untuk berjaga-jaga <mark>mempunyai pinjaman</mark> di BMT dan mempunyai tabungan Rp.1.000.000,-di BMT puas dengan pelayanan BMT dan tidak mengalami kesulitan melakukan pembiayaan di BMT."

Selanjutnya peneliti mewawancari KASMUAH Perempuan Usia 57
 Tahun alamat Dusun Karangagung Barat RT 19 RW 04.<sup>110</sup>

"Penjual Ikan pendapatan Rp.1.600.000.-perbulan usaha ada kenaikan setelah memperoleh pembiayaan menjadi Rp.1.800.000.per bulan bisa mengelola keuangan dengan menyendirikan / menyisihkan uang untuk angsuran pembiayaan mempunyai tabungan Rp.1.000.000 literasi keuangan penting untuk pengetahuan pernah mengalami kredit macet (3 bulan karena musim sepi melaut) tidak ada kendala akses pembiayaan di BMT inklusi keuangan penting supaya bisa mendapatkan pinjaman pada saat memerlukan modal. tidak mengetahui / mengerti istilah pembiayaan syariah baik Murabahah musyarokah / mudharabah, Rahn jaminan pembiayaan BPKB atau sertifikat tanah diterangkan hak dan kewajiban saat meminjam tapi tidak paham yang penting dapat pinjaman bisa menghitung margin percaya bahwa BMT sebagai tempat meminjam yang mudah percaya amanah uangnya ditabung di BMT puas dan nyaman pinjam di BMT jika punya

<sup>110</sup> Kasmuah, Wawancara, Pasar Desa, 21 Mei 2020.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> Inawaroh, Wawancara, Tambakrejo, 20 Mei 2020.

uang lebih digunakan untuk modal usaha menabung di BMT untuk berjaga-jaga dan modal usaha mempunyai pinjaman di BMT malu menyebutkan nominalnya dan mempunyai tabungan Rp.1.000.000,- puas dengan pelayanan BMT dan tidak mengalami kesulitan melakukan pembiayaan di BMT."

4. Berikutnya peneliti juga mendapatkan informasi seputar literasi yang disampaikan oleh Ibu SITI KUSNURIYAH Perempuan Usia 38 Tahun Alamat Dusun Karangagung Barat RT 20 RW04 Penjual sayur matang dan bubur keliling.<sup>111</sup>

"Pendapatan Rp.1.700.000.-perbulan usaha ada kenaikan setelah memperoleh pembiayaan menjadi Rp.1.800.000.- per bulan mempunyai pinjaman di BMT bisa mengelola keuangan dengan menabung mempunyai tabungan Rp.2.000.000 di BMT literasi keuangan penting untuk pengetahuan inklusi keuangan penting supaya bisa dipercaya sama BMT dan bisa menyimpan uang di BMT dan bisa ambil tabungan sewaktu waktu jika memerlukan. tidak mengetahui / mengerti istilah pembiayaan syariah baik Murabahah musyarokah / mudharabah, Rahn bisa menghitung margin percaya bahwa BMT sebagai tempat meminjam yang mudah percaya aman uangnya ditabung di BMT jika punya uang lebih digunakan untuk modal usaha menabung di BMT untuk modal usaha mempunyai pinjaman di BMT dan mempunyai tabungan Rp.2.000.000,- puas denganpelayanan BMT."

 Agar mendapatkan sumber informasi yang kredibilitasnya tinggi maka peneliti melanjutkan menggali informasi dari NAWAROH Perempuan Usia 36 Tahun alamat Dusun Tambakrejo RT 3 RW6<sup>112</sup>

"Saya penjual nasi dan jajanan keliling pendapatan Rp.1.200.000.-perbulan usaha ada kenaikan setelah memperoleh pembiayaan menjadi Rp.1.800.000.- per bulan. tidak mempunyai pinjaman di BMT bisa mengelola keuangan dengan menabung mempunyai tabungan Rp.3.000.000 di BMT literasi keuangan penting untuk memutuskan meminjam inklusi keuangan penting supaya bisa menyimpan uang di BMT dan bisa kita ambil sewaktu waktu jika memerlukan. tidak mengetahui / mengerti istilah pembiayaan

.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> Siti Kusniyah, Wawancara, Jalanan Desa Karangung, 23 Mei 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup> Nawaroh, *Wawancara*, Tambakrejo, 23 Mei 2020.

syariah baik Murabahah musyarokah / mudharabah, Rahn bisa menghitung margin percaya bahwa BMT sebagai tempat meminjam yang mudah percaya aman uangnya ditabung di BMT jika punya uang lebih digunakan untuk modal usaha menabung di BMT untuk modal usaha mempunyai pinjaman di BMT malu menyebutkan nominalnya dan mempunyai tabungan Rp.3.000.000,- puas dengan pelayanan BMT."

Dari beberapa informan diatas, peneliti memberikan kesimpulan bahwa literasi keuangan syariah masih rendah hal ini bisa dilihat dari segi penggunan, pengelolan dan pengetahuan mereka yang tidak mengetahui dari produk produk lembaga keuangan syariah. Hal ini bisa menjadi penghambat menurut peneliti, karena bagaimanapun masyarakat sebagai pendukung dari majunya lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, peneliti melanjutkan turun kelapangan bertemu dengan beberapa kepala BMT yang ada di pesisir pantai utara. Dari sini peneliti ingin lebih mengetahui peran BMT pada literasi keuangan syariah. Disampaikan oleh Kepala BTM Surya Utama dalam penuturannya bahwa. 113

"Mas Johan aktifitas BMT guna berperan dalam literasi dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mas. Kami mengutus beberapa SDM BMT dengan menggandeng para pegiat ekonomi syariah untuk ikut serta dalam sosialisasi"

Kemudian disambung lagi dari penjelasan diatas tentang peran BMT dalam literasi yakni dipaparkan oleh Costumer Servis BTM Surya Utama, beliau menuturkan bahwa.<sup>114</sup>

"Selain itu mas Johan kami dilapangan dalam menawarkan produk selalu memberikan pemahaman tentang akad pembiayaan dan tabungan. Meskipun rasanya masyarakat belum begitu memahami secara detail."

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> Muhammad Abduh, Wawancara, Tuban, 25 Mei 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> CS BTM Surya Utama, Wawancara, BTM Surya Utama, 25 Mei 2020.

Disisi lain juga dijelaskan oleh Bagian Survey lapangan BTM Surya Utama bahwa beliau menambahkan tentang literasi keuangan syariah bahwa.<sup>115</sup>

"BTM Surya Utama itu mas pernah mengadakan pelatihan dan sosialisasi keuangan syariah mas Johan, itu yang hadir perkiraan 60 orang mas pada tahun 2018 se Kabupaten Tuban."

Pada kesempatan lain peneliti terus menggali peran BTM Surya Utama dalam literasi keuangan syariah. Kali ini peneliti bersama Dewan Pengawas Syariah BTM Surya Utama, beliau memberikan pemaparan bahwa.<sup>116</sup>

"Mas disini para Dewan Pengaeas Syariahnya mayoritas mempunyai jamaah pengajian dan sering mengisi beberapa acara keagamaan dari masjid ke masjid, kami mas selalu menyelipkan dalam beberapa kegiatan di masjid atau ditengah masyarakat tentang pentingnya penggunaan lembaga keuangan syariah seperti BMT. Namun atas dasar rendahnya pengetahuan mereka maka memang tidak ada hasil yang signifikan karena masyarakatnya masih terlalu awam bila dijelaskan beberapa akad yang menggunaka istilah arab."

Dari beberapa informan BTM Surya Utama bahwa peran BMT dalam literasi keuangan syariah telah dilaksanakan dengan berbagai cara dan kondisi yang tak menentu. Berbagai cara yang dimaksud peran BMT di literasi keuangan dengan cara edukasi dan sosialisasi langsung pada masyarakat ketika mengadakan acara pelatihan atau sosialisasi. Adapun berbagai kondisi yang dimaksud diatas adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna mengenalkan lembaga keuangan syariah guna mendapatkan hasil positif pada penggunan produk-produk di BTM Surya Utama.

.

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> Surveyor BTM Surya Utama, Wawancara, BTM Surya Utama, 25 Mei 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> Abdul Aziz, *Wawancara*, BTM Surya Utama, 25 Mei 2020.

Selain itu juga Kepala BTM Surya Utama juga menuturkan bahwa kami mempunyai program CSR yang salah satu tujuan nya untuk literasi keuangan syariah, beliau menyampaikan bahwa.<sup>117</sup>

"Disini mas banyak kegiatan masyarakat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dengan berbagai aktivitas yang direncanakan langsung oleh team manajemen BTM Surya Utama berupa pembagian sembako, khitan masal gratis dan bantuan kepada organisasi kepemudaan yang diajukan oleh panitia di setiap kegiatan tahunan."

Adapun sedikit berbeda peran BMT Surya Raharja dalam literasi keuangan dijelaskan oleh Kepala BMT Surya Raharja bahwa.<sup>118</sup>

"Kegiatan kami mas langsung turun kelapangan, promosi produk produk langsung sistem door to door, ke berbagai lembaga pendidikan, pasar, dan tempat wisata. Dengan cara diatas merupakan langkah konkrit mas guna memberikan manfaat kemasyarakat melalui proses sosialisasi secara langsung kelapangan."

Peneliti menyimpulkan bahwa antara dua BMT diatas memiliki cara tersendiri guna memberikan peran aktif dalam literasi keuangan syariah. Contoh saja BTM Surya Utama mereka lebih menekankan pada edukasi dan sosialisasi yang di bingkai dengan berbagai acara dan mengumpulkan khalayak banya. Namun berbeda kalau melihat BMT Surya Raharja bahwa peran aktif nya dalam literasi keuangan syariah memilih untuk direct meet dengan khalayak umum dengan memberikan penjelasan secara berbagai produkproduk keuangan syariah. Hal ini bisa di dukung dari data nasabah yang nantinya meneliti bisa menganalisa keefektifan keduanya dengan mendapatkan nasabah di setiap tahun.

-

<sup>&</sup>lt;sup>117</sup> Muhammad Abduh, *Wawancara*, BTM Surya Utama, 25 Mei 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> Kepala BMT Surya Raharja, *Wawancara*, BMT Surya Raharja, 26 Mei 2020.

Berikut adalah jumlah Nasabah BTM Surya Utama dan BMT Surya Raharja pada tahun 2018-2019, yakni sebagai berikut.

Tabel 3.2 Data Nasabah BTM Surya Utama dan BMT Surya Rahardja

Lembaga Keuangan Non Bank	Tahun 2018	<b>Tahun 2019</b>
BTM Surya Utama	8.106	9.448
BMT Surya Raharja	7.700	9.200

Sumber: Data di olah, BMT Surya Raharja dan BTM Surya Utama

Berdasarkan data diatas peneliti bisa memaparkan bahwa nilai efektif yang mengarah pada hasil data nasabah tidak terlalu memberikan perbedaan mencolok. Hal ini bisa ditarik benang merahnya bahwa peran BMT dalam literasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna memberikan pemahaman yang mendalam dalam memberikan inklusi keuangan syariah. Sehingga perlu adanya sinergi kedua nya antara BTM Surya Utama dan BMT Surya Raharja untuk terus selalu hadir masyarakat hingga kebiasaan yang mendarah daging berupa terbiasanya dengan tukang cicil atau dengan sistem konvensional bisa merubahnya.

# C. Tingkat Inklusi Keuangan Syariah Masyarakat Pesisir Tuban Dalam Menggunakan Produk BMT

Keuangan syariah mempunyai peran penting dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Fasilitas berupa layanan yang diberikan kepada masyarakat harus mampu menjangkau sampai pada wilayah terkecil di Indonesia, pelayanan tersebut dapat diukur dengan menggunakan tingkat inklusi keuangan yang berada ditengah-tengah masyarakat. Sistem keuangan syariah yang paling inklusif adalah memberikan dan mengalokasikan sumber daya yang produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu BMT yang tersebar kedaerah pesisir adalah BMT Surya Utama, tepatnya daerah pesisir Tuban. Menurut Bapak Abduh selaku manajer BMT Surya Utama mengatakan bahwa:

"Edukasi dan sosialisasi BMT dilakukan dengan cara menyebarkan SDM, jadi SDM kita disebar kelapangan untuk memberikan keterangan tentang produk pembiayaan dan simpanan melalui penawaran dan akad pembiayaan maupun tabungan".<sup>119</sup>

Edukasi dan sosialisai tersebut sangan penting bagi masyarakat agar masyarakat mampu memahami pentingnya produk-produk syariah. Selain itu juga, BMT juga diharapkan mampu membantu kehidupan masyarakat daerah pesisir menjadi lebih baik dari pada sebelumnya. Abduh juga menambahkan bahwa:

"Tahun 2018 BTM Surya Utama mengadakan pelatihan atau sosialisasi keuangan syariah yang di ikuti oleh 60 Koperasi di kabupaten Tuban". 120

Pelatihan tersbut diharapkan mampu memberikan pengetahuan tersendiri bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap BMT. Hal ini juga untuk memerangi praktek-praktek ribawi yang sudah tersebar di masyarakat. Sosialisasi berbasis pelatihan akan membuka pola pikir masyarakat bahwa BMT adalah alternatif paling efektif dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Segala aktivitas ekonomi akan didukung oleh produk pembiayaan yang terdapat di BMT Surya Utama. Disamping itu juga, terdapat pengajian-pengajian yang dilakukan disekitar masjid dalam rangka mengedukasi masyarakat dalam mengetahui lembaga

120 Ibid

\_

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> Muhammad Abduh, Wawancara, Manajer BTM Surya Utama Tuban, 25 Mei 2020.

keuangan syariah, sepertti yang dikatan Abduh selaku manajer BTM Surya Utama Bahwa:

"Dewan Syariah yang setiap memberikan pengajian diselupi dengan materi keuangan syariah melaui dakwah di beberapa masjid sekitar BTM Surya Utama. Materi ini biasanya diberikan pada penduduk yang tidak tau produk BMT. Pemintanya juga banyak karena pengajian ini sifatnya rutin dilakukann oleh pengurus masjid dengan penceramah yang berbeda-beda, tapi jika penceramahnya dari dewan syariah pengurus masjid memberikan pengumunan kepada penduduk karena kita sudah melakukan kerjasama dengan masjid". <sup>121</sup>

Bentuk dakwah melalui masjid akan memberikan dampak akselerasi bagi mereka dalam mengetahui dan memahami produk dan konsep lembaga keuangan syariah khususnya BMT. Konsep edukasi yang diberikan BMT kepada masyarakat tidak hanya melalui training tetapi juga menggunakan dakwah ke masjid-masjid sekitar BMT. Program ini adalah sebuah bentuk sosialisasi juga yang dilakukan oleh BMT karena banyak masyarakat yang masih belum paham tentang BMT. hal ini juga disampaikan oleh kepala Desa Karangagung bahwa:

"saya sering mengahdiri acara undangan dari BMT, kan BMT disini ini sering mengisi dimasjid kampung mas, jadi saya tau apa itu BMT. penduduk saya juga yang pinjam ke BMT karena kan disini banyak orang yang kekurangan modal jadi mereka pinjam ke BMT. ya dari pengajian dimasjid itu mas, jadi kan masyarakat tau apa itu BMT dan bagaimana cara pinjamnya bagaimana, semua itu biasanya dari BMT itu ada yang ke pasar begitu nawarin, ada yang juga ke rumah-rumah langsung karena kebetulan saya kepala desanya jadi saya tau apa yang dilakukan oleh masyarakat saya". 122

Kebutuhan masyarakat akan modal, peran BMT sangat besar dalam mememnuhi kebutuhan masyarakat akan modal. Proses sosialisasi dan edukasi terus dilakukan oleh BMT agar masyarakat lebih mengenal lembaga kauangan

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>122</sup> Aji Agus Wiyoto, *Wawancara*, Kepala Desa Karangagung, Tuban, 10 Mei 2020

syariah. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh BMT begitu agresif dalam mensosialisasikan produknya agar masyarakat tidak terjerat oleh praktekpraktek ribawi sehingga peran keberadaan BMT dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Masyarakat juga sangat apresiasi atas keberadaan BMT sebagai peminjam dana, hal ini disampaikan oleh Sukinten bahwa:

"percaya bahwa BMT sebagi temnpat meminjam yang mudah; percaya aman uangnya ditabung di BMT, Saya tau bmt ya dari pengajian di masjid saya itu mas. Dan tetanggga saya juga ada yang minjem ke BMT". 123

dengan kata lain, mekanisme iklusi yang dilakukan oleh BMT telah berhasil sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Masyarakat juga memiliki keyakinan bahwa BMT adalah tempat yang paling terpercaya dalam penyimpanan uang. Artinya BMT mempunyai peran penting dalam mengelola perekonomian masyarakat terutama masyarakat pesisir Tuban.

Lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan sistem inklusi keuangan. BMT sebagai lembaga keuangan non bank yang tugasnya memberikan pembiayaan untuk masyarakat menegah kebawah telah berkembang begitu pesat karena misi dasarnya adalah mengentaskan kemiskinan dan mensejahterkan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Agung sebagai Manajer Surya Raharja bahwa:

"Menambah anggota dengan cara memperkecil simpanan pokok sebesar Rp100.000,- dan simpanan wajib Rp,1.200,- supaya masyarakat berkesempatan menjadi anggota BMT sehingga bisa melakukan pembiayaan dan menabung di BMT.

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> Sukinten, Wawancara, Tuban, 20 Mei 2020.

Karena syarat melakukan pembiayaan adalah menjadi anggota terlebih dahulu. Kami juga Mendatangi sekolah sekolah untuk menawarkan produk tabungan dengan sistem jemput bola (SDM BMT mengambil tabungan ke peserta)".<sup>124</sup>

Sistem jemput bola *pick-up service* banyak memberikan keuntungan, tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan BMT tetapi juga mampu meningkatkan jumlah anggota sehingga masyarakat mampu berjalan sesuai dengan islam dalam melakukan aktivitas ekonominya. Pegawai-pegawai BMT Surya Raharja juga tidak hanya memberikan pembiayaan tetapi mereka juga memberikan edukasi tentang produk BMT dan memberikan motivasi agar usaha merek lebih baik. Sepertti yang dikatakan oleh Agung bahwa:

"SDM (Karyawan) lapangan menawarkan pembiayaan dan Tabungan kepada masyarakat pasar tradisional, pedagang keliling, usaha kecil, kelembaga pendidikan untuk menjemput tabungan dan lain-lain, menyebar brosur. Kita juga menerangkan produk BMT itu bagaimana dan memberikan motivasi kepada mereka agar usaha mereka bisa jalan terus, ini juga menjadi strategi kami untuk menanggulangi masyarakat agar membayar cicilan tepat waktu. Jadi usaha kalau tidak hati-hati bisa bangkrut maka dari itu kita mengedukasi dan memotivasi mereka, kalau mereka tidak bayar kita juga yang akan repot kan". 125

Pemasaran yang dilakukan oleh BMT Surya Raharja adalah memberikan penawaran produk ke pasar-pasar tradisional sehingga masyarakat menjadi tertarik untuk menggunakan jasa BMT. tidak hanya itu, pihak BMT juga menyebarkan brosur dan memberikan penjelasan tentang produk-produk yang terdapat pada BMT serta memberikan motivasi kepada masyarakat yang mempunyai usaha dan menjadi anggota BMT. motivasi ini penting dilakukan untuk mengantisipasi kredit macet, karena jika usaha yang dilakukan oleh

125 Ibid

\_

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup> Agung, Wawancara, Manajer BMT Surya Rahardja Tuban, 26 Mei 2020.

masyarakat memiliki kendala internal maka akan berdampak pada angsuran BMT. disamping itu juga, kita memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih antusias untuk menabung ke BMT. seperti yang dikatakan oleh Agung bahwa:

"Kita juga memperhatikan pelayanan mas, karena pelayanan ini penting. Kenapa di anggap penting karena jika masyarakat merasa dihormati dan dipermudah maka akan kembali lagi ke bmt sini". 126

Artinya, pelayanan yang baik akan memberikaan dampak yang baik kepada BMT, karena loyalitas masyarakat akan terbangun. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya minat masyarakat untuk menjadi anggota BMT. Berdasarkan wawancara menajer BTM Surya Utama bahwa:

"Masyarakat yang mempunyai rekening tabungan sebanyak 10.000 orang di 4 kantor cabang dan pusat, diantaranya 6.000 orang masyarakat pesisir yang mempunyai tabungan di BTM Surya Utama".<sup>127</sup>

Artinya lebih dari 50% masyarakat pesisir mempunyai tabungan di BTM Surya Utama. Mayoritas dari Anggota pemilik usaha yang ingin mengembangkan usahanya dan memperbaik kondisi ekonomi keluarganya. Seperti Kasmuah warga Desa Karangagung yang mengatakan bahwa:

"Penjual Ikan, pendapatan Rp.1.600.000.-perbulan; usaha ada kenaikan setelah memperoleh pembiayaan menjadi Rp.1.800.000.- per bulan; bisa mengelola keuangan dengan menyendirikan/menyisihkan uang untuk angsuran pembiayaan; mempunyai tabungan Rp.1.000.000. Mengetahui lembaga keuangan BMT tidak mengetahui/mengerti pembiayaan svariah istilah baik Murabahah musyarokah/mudharabah, Rohen; jaminan pembiayaan BPKB atau sertifikat tanah; diterangkan hak dan kewajiban saat meminjam tapi tidak paham yang penting dapat pinjaman; bisa menghitung margin; percaya bahwa BMT sebagi tempat meminjam yang mudah; percaya aman uangnya ditabung di BMT; puas dan nyaman pinjam di BMT; jika punya uang lebih digunakan untuk modal usaha; menabung di BMT untuk berjaga-jaga dan modal usaha; mempunyai pinjaman di BMT malu menyebutkan nominalnya dan mempunyai tabungan

\_

<sup>126</sup> Ibio

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup> Muhammad Abduh, Wawancara, Manajer BTM Surya Utama Tuban, 25 Mei 2020.

Rp.1.000.000,-; puas dengan pelayanan BMT; dan tidak mengalami kesulitan melakukan pembiayaan di BMT". 128

Kasmuah menyatakan bahwa pendapatanya meningkat setelah menerima bantuan pembiayaan dari BMT, dengan kata lain, visi misi dasar inklusi keuangan telah berhasil karena telah mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Keberadaan masyarakat pesisir yang kekurangan modal juga dirasakan oleh Siti Kusnuriyah seorang penjual sayur warga desa Karangagung yang menyatakan bahwa:

"Penjual sayur matang dan bubur keliling; pendapatan Rp.1.700.000.-perbulan; usaha ada kenaikan setelah memperoleh pembiayaan menjadi Rp.1.800.000.- per bulan; mempunyai pinjaman di BMT; bisa mengelola keuangan dengan menabung mempunyai tabungan Rp.2.000.000 di BMT dan percaya bahwa BMT sebagi tempat meminjam yang mudah; percaya aman uangnya ditabung di BMT". 129

BMT tidak hanya meningkatkan pendapatan Kusniyah tetapi juga mampu memberikan dampak pada psikolgisnya. Karena dengan sistem pelayanan yang baik, edukasi yang benar telah mampu membangun kepercayaan masyarakat akan pentingnya lembaga keuangan syariah sebagai inklusi keuangan. Inawaroh seorang penjual pentol dan gorengan warga Desa Glodog juga mengalami peningkatan pendapatan yang sangat signifikan, hal ini disampaikan dalam wawancaranya bahwa:

"Penjual pentol dan gorengan; pendapatan Rp.2.100.000.-perbulan; usaha ada kenaikan setelah memperoleh pembiayaan menjadi Rp.3.000.000.- perbulan percaya bahwa BMT sebagi tempat meminjam yang mudah; percaya aman uangnya ditabung di BMT; puas dan nyaman pinjam di BMT; jika punya uang lebih digunakan untuk modal usaha; menabung di BMT untuk berjaga-jaga; mempunyai pinjaman di BMT dan mempunyai tabungan

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup> Kasmuah, Wawancara, Tuban, 21 Mei 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> Siti Kusniyah, *Wawancara*, Jalanan Desa Karangung Tuban, 23 Mei 2020.

Rp.1.000.000,-di BMT; puas dengan pelayanan BMT; dan tidak mengalami kesulitan melakukan pembiayaan di BMT". 130

Keberadaan BMT telah merubah pendapatan masyarakat. Rata-rata masyarakat yang meminjam uang ke BMT untuk modal usaha telah mengalami peningkatan sehingga kondisi keuangan mereka menjadi lebih baik. Hal ini juga disampaikan oleh Sukinten seorang penjual sayur keliling bahwa:

"Penjual Sayur keliling; pendapatan Rp.1.500.000.-perbulan; usaha ada kenaikan setelah memperoleh pembiayaan menjadi Rp.1.750.000.- per bulan; belum bisa mengelola keuangan karena kebutuhan keluarga yang belum mencukupi; belum bisa menabung secara rutin". 131

Dengan demikian, BTM Surya Utama dan BMT Surya Raharja telah berperan secara optimal dalam mewujudkan inklusi keuangan di masyarakat, sehingga perekonomian masyarakat menjadi meningkat. Rata-rata pendapatan masyarakat (anggota pembiayaan) mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Oleh sebab itu, kesejahteraan masyarakat pesisir Tuban lebih terjamin dengan adanya BTM Surya Utama dan BMT Surya Raharja. Berdasarkan data dari BTM Surya Utama dan BMT Surya Raharja jumlah pembiayaan dan tabungan masyarakat meningkat mulai dari tahun 2015-2019, hal ini berdasarkan data anggota (pembiyaan dan tabungan) dua tahun terakhir sebagai berikut:

Lembaga Keuangan Non Bank	Tahun 2018	Tahun 2019
BTM Surya Utama	8.106	9.448
BMT Surya Raharja	7.700	9.200

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> Inawaroh, *Wawancara*, Tambakrejo Tuban, 23 Mei 2020.

.

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> Sukinten, Wawancara, Tuban, 20 Mei 2020.

Data diatas menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias untuk menggunakan produk BTM Surya Utama dan BMT Surya Raharja, baik produk untuk pembiayaan ataupun produk tabungan. Data tersebut adalah total nasabah jyang menggunakan produk BMT di daerah pesisir Tuban. Desa-desa pesisir Tuban meliputi Desa Glodog, Desa Karangagung dan Desa Palang. Namun peneliti hanya fokus pada Desa Glodog dan Desa Karangagung. Desa Karangagung memiliki total Kepala Keluarga (KK) sebanyak 2.811 KK. Dan jumlah penduduk 5.145 laki-laki dan 4.993 perempuan.

Dengan etimasi mayoritas masyarakat pesisir telah menggunakan produk keuangan syariah. Kemudahan akses menjadi hal terpenting untuk meningkatkan keinginan masyarakat unuk menggunakan jasa keuagan syariah. Hal ini disampaikan oleh Sukinten bahwa:

"Jadi saya itu bisa pinjam untuk usaha saya kalau ada uang lebih saya nabung di BMT. biasanya BMT itu keliling ke pasar kadang langsung ke rumah begitu mas jadi kalau gak bayar pembiayaan itu sungkan". 132

Kemudahan akses yang diberikan kepada masyarakat untuk menjangkau BMT telah memberikan value bagi perekonomian masyarakat. Sistem jemput bola yang diterapkan oleh BMT membuat masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan jasa keuangan syariah sehingga selain untuk mengajukan pembiayaan masyarakat juga memanfaatkan BMT untuk menyimpan kekayaanya dalam bentuk tabungan. Menurut Sukinten bahwa inklusi keuangan sangat penting, hal ini dinyatakan dalam wawancaranya:

.

<sup>132</sup> Ibid

"Menurut saya penting mas supaya bisa dipercaya BMT dan bisa pinjam dan nabung jadi kan bisa dapat modal uang tidak cepat habis. Uang juga aman kalau ditabung mas, pelayanan di BMT enak jadi kan tidak takut untuk pinjam soalnya orangnya baik-baik mas". <sup>133</sup>

Kepercayaan masyarakat terhadap BMT menjadi modal besar untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah. Pelayanan yang baik serta sikap pegawai yang ramah menjadi hal penting dalam membumikan keuangan syariah. Masyarakat juga menganggap bahwa BMT itu penting, dengan kata lain, tingkat inklusi keuangan itu tinggi karena manyoritas masyarakat mengetahui dan menggunakan jasa BMT.

# D. Implikasi Tingkat Litera<mark>si dan Inklusi Ke</mark>uangan Syariah Masyarakat Pesisir Pantai Utara Kabupaten Tuban Dalam Menggunakan Produk BMT

Literasi keuangan syariah masyarakat pesisir pantai berdasarkan research lapangan yang di sampaikan oleh beberapa informan bahwa masyarakat berada pada tataran menengah kebawah dalam mengetahui aspek aspek atau produk produk dan akad akad lembaga keuangan syariah. Hal ini akan terlihat pada dampak yang begitu terasa oleh lembaga keuangan syariah sendiri. Disampaikan oleh Kepala BTM Surya Utama dalam beberapa kesempatan di ruangannya. Bahwa beliau menuturkan.

"Mungkin ini dikarenakan adanya habits yang mendarah daging sehingga hal-hal yang baru dan benar menurut ajaran islam, masyarakat menampiknya. Disisi lain mas tingkat *knowledge* pada produk dan akad

<sup>133</sup> Ibid

rendah sehingga perlu digenjot kembali dengan cara persuasif yang tidak bisa dilakukan sekali dua kali." <sup>134</sup>

Senada dengan yang di tuturkan oleh kepala BTM Surya Utama, dalam beberapa waktu di sela sela kesibukannya menurut kepala BMT Surya Raharja bahwa. 135

"Gini mas, orang orang sekitar disini itu sulit sekali untuk mengetahui produk bahkan akad lembaga keuangan syariah. Faktor utama adalah bank konvensional lebih dulu hadir dibandingkan syariah, sehingga mereka merasa keberatan utk pindah ke yang lain karena dirasa enak padahal salah menurut ajaran islam. Dan ini merupakan tugas buat LKS guna lebih semangat lagi untuk mensosialisasikan atau mengadakan beberapa acara di masyarakat supaya membentuk sebuah pemahaman." <sup>136</sup>

Ditambahkan juga oleh Kepala Desa Glodog perihal dampak dari literasi keuangan syariah masyarakat pesisir pantai Tuban. Dituturkan oleh beliau bahwa.

"Begini mas literasi keuangan syariah ini akan memberikan dampak yang bagus dalam peningkatan ekonomi. Sehingga masyarakat mulai paham dan mengerti dalam mendapatkan informasi produk yang disebarkan melalui berbagai macam media baik brosur dan lain sebagainya. Jadi masyarakat yang menerima dengan bagus adanya literasi keuangan syariah akan bisa berdampak pada ekonominya karena bisa menjadi solusi dalam perekonomiannya bahkan dalam pengelolaan ekonominya, karena disana akan ada pendampingan langsung oleh pihak BMT." <sup>137</sup>

Senada juga yang dituturkan oleh Kepala Desa Karangagung bahwa dalam sela-sela kerjanya bahwa beliau menuturkan.

"Rugi sekali mas jika masyarakat tidak proaktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh BMT karena disana mempunyai nilai manfaat yang besar dan gratis juga. Padahal apabila melihat manfaatnya akan bisa menjadi acuan dan jawaban dalam permasalah ekonominya sebagai contoh

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup> ABduh, Wawancara, Manajer BTM Surya Utama Tuban, 26 Mei 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>135</sup> Muhammad Abduh, *Wawancara*, BTM Surya Utama, 27 Mei 2020.

<sup>136</sup> Ibio

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup> Kepala Desa Glodog, *Wawancara*, Kantor Desa, 10 Mei 2020.

tehnis dalam pengajuan pembiayaan di BMT dan pengenalan produknya."<sup>138</sup>

Dari pemaparan oleh Kepala BTM Surya Utama dan BMT Surya Raharja bisa disimpulkan bahwa ada 2 (dua) aspek dampak yang signifikan terhadap lembaga keuangan syariah. Yakni aspek knowledge dan agama, keduanya dijelaskan oleh masing-masing kepala desa bahwa pengetahuan (knowledge) masyarakat yang rendah itu akan berdampak sekali pada tumbuh kembangnya LKMS yakni BMT. Hal ini menjadi suatu kendala yang perlu dicari jalan keluarnya. Peneliti beranggapan bahwa kendala tersebut mendarah daging karena begitu lamanya mereka menjadi nasabah konvensional sehingga untuk mengetahui yang baru dan benar menurut ajaran islam akan sulit diterima. Aspek kedua yakni agama. Menjadi dampak karena kesadaran masyarakat yang rendah akan aturan syariat islam yang benar. Namun kembali ke atas bahwa dari knowledge yang rendah akan berdampak pada kesadaran masyarakat yang minim. Kemudian dari Kepala Desa Karangagung dan Kepala Desa Glodog juga bisa disimpulkan bahwa dampak ekonomi bila masyarakat memanfaatkan betul akan literasi keuangan syariah. Sehingga mereka yang mempunya masalah ekonomi untuk pertanian untuk perdagangan untuk mulai usaha nya bisa dijadikan jawaban untuk mengetahui beberapa produk dan jasa keuangan syariah.

Dilanjutkan pada upaya peningkatan literasi keuangan syariah di pantai pesisir utara Tuban, peneliti mendapati informan yang bisa menjelaskan tentang upaya atau peran LKMS dalam meningkatkan literasi keuangan syariah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup> Aji Agus Wiyoto, *Wawancara*, Kepala Desa Karangagung, Tuban, 10 Mei 2020

yakni Kepala BTM Surya Utama, Kepala BMT Surya Raharja dan Tokoh Kepemudaan.

Dituturkan oleh Tokoh Kepemudaan dalam sela-sela waktunya di bulan ramadhan bahwa.<sup>139</sup>

"Mas johan upaya untuk meningkatkan literasi setidaknya BMT bisa bersinergi dengan antar BMT, Masyarakat dan Pemerintah dalam mengadakan beberapa kegiatan literasi baik seminar, workshop dan lain sebagainya."

Senada dan menambahkan dari apa yang di sampaikan oleh informan sebelumnya, bahwa Kepala BTM Surya Utama dalam penuturannya menyampaikan bahwa. 140

"Mas johan selain itu, upaya untuk meningkatkan literasi bahwa dorongan masyarakat untuk proaktif dalam beberapa kegiatan sangat kami harapkan. Karena kesuksesan acara tergantung pada antusiasme masyarakat sehingga bila upaya itu dijalankan maka kendala-kendala yang ada dalam literasi bisa menjadi solusi dalam beberapa program kegiatan BMT di masyarakat."

Namun Kepala BMT Surya Raharja memberikan informasi berbeda terkait upaya meningkatkan Literasi Keuangan Syariah, beliau menuturkan bahwa.<sup>141</sup>

"Masyarakat pesisir itu merupakan kelompok masyarakat yang sebagian besar tergolong sebagai warga yang berpenghasilan rendah dan miskin. Sehingga upaya yang pas untuk meningkatkan literasi dengan kegiatan sosial masyarakat dengan mengaktifkan ZISWAK mas Johan, tapi kita tidak bisa jalan sendiri namun bersinergi dengan dinas koperasi, baznas, dan LAZ."

1

<sup>&</sup>lt;sup>139</sup> Iskandar, Wawancara, Tuban, 13 Mei 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup> Muhammad Abduh, *Wawancara*, Kantor BTM, 27 Mei 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup> Agung, *Wawancara*, Manajer BMT Surya Rahardja Tuban, 26 Mei 2020.

Dari beberapa informan diatas, peneliti berkesimpulan upaya atau peran untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di daerah pesisir memang dilaksanakan secara terprogram, BMT yang menjadi garda terdepan mampu menjadi sayap untuk bisa mengatur upaya itu terus berjalan guna meningkatkan literasi keuangan syariah. Karena dengan meningkatnya literasi keuangan syariah tersebut maka dampak pada aspek *knowledge*, agama dan ekonomi bisa menjadi jawaban atas semua kendala dilapangan dan kemaslahatan umat bisa diterima oleh masyarakat dari sinergi diatas. BTM Surya Utama dan BMT Surya Raharja hadir sebagai inklusi di tengah-tengah masyarakat desa. Berdasarkan wawancara dengan Agung bahwa:

"BMT menghimpun dana dari tabungan dari anggota (Masyarakat) dan pihak ketiga kemudian disalurkan lagi kemasyarakat dalam bentuk pembiayaan". 142

Kehadiran BMT telah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat desa pesisir Tuban. Produk-produk untuk pembiayaan dapat dimanfaatkan oleh setiap lapisan masyarakat seperti yang dikatakan oleh Agung bahwa:

"Rohen, Murabahah, Mudharabah, Qordul hasan, Wakalah (Cek/Giro). Tapi hampir 90 persen menerrapkan pembiyaan Rohen (gadai)". 143 "Untuk bisa mengajukan pembiayaan harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan membayar simpanan pokok dan bersedia membayar simpanan wajib sebesar Rp.1.200,- menyerahkan KTP, KK, menyerahkan jaminan BPKB sepeda motor/mobil dan sertifikat tanah atau bangunan". 144 Tabungan Wadia'ah (tidak mengikat) dengan akad Qordul Hasan dan "Musyarokah. Tabungan yang paling diminati adalah Qordul Hasan karena tanpa adanya bagi hasil/Margin. Dan tabungan ini bisa dijadikan jaminan saat anggota melakukan pembiayaan". 145

<sup>142</sup> Ibid

<sup>143</sup> Ibid

<sup>144</sup> Ibid

<sup>145</sup> Ibid

Kemudahan yang diberikan BMT sangat berdampak bagi minat masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan syariah. Salah satu kemudahan yang diberikan BMT adalah syarat-syarat yang mudah dan transaksi tidak harus dikantor. Hal ini dsampaikan oleh manajer BMT Surya Raharja bahwa:

"Pelayanan pembiayaan tidak harus dikantor tetapi bisa ditempat anggota bisa dipasar tempat mereka berjualan, di rumah". 146

Kemudahan dalam bertransaksi sangat membantu masyarakat karena kesibukan masyarakat dalam memperbaiki ekonominya. BMT Surya Raharja dan BTM Surya Utama juga menyalurkan dana-dana sosial untuk masyarakat. Dana sosial ini diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu sehingga mampu memberikan keringan dalam perekonomian keluarganya. Seperti yang dikatakan oleh Agung bahwa:

"Dana Sosial diambilkan dari margin pembiyaan melaui dana zakat yang disalurkan sendiri oleh BMT setiap tahunnya menyalurkan zakat Rp.130.000 per orang dan untuk fakir miskin Rp.125.000 sebanyak 40 keluarga". 147

Abduh juga menyampaikan bahwa ada dana sosial yang disalurkan ole BTM Surya Utama yang di khususkan untuk masyarakat dengan perkonomian rendah dengan perantara LAZIZMU dan ada yang didistribusikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan sosial:

"Dana Infak yang disalurkan melaui lembaga amal LAZISMU dialokasikan dari 3% dari pendapatan pembiayaan musyarokah dan 5% dari SHU Badan usaha BTM Surya Utama". 148

"Selain Pinjaman Qordul hasan yang tidak ada marginnya, Setiap tahun sekali membagikan sembako kepada warga sekitar yang tergolong

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup> Agung, Wawancara, Manajer BMT Surya Rahardja Tuban, 26 Mei 2020.

<sup>147</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup> Muhammad Abduh, Wawancara, Manajer BTM Surya Utama Tuban, 25 Mei 2020.

ekonomi tidak mampu sejumlah 200 orang dengan nilai nominal Rp60.000. Biaya Khitanan masal yang sudah dilakukan 4 btahun terakhir setiap tahunnnya sejumlah 22 anak. Bantuan bantuan kepada organisasi kepemudaan dan kegiatan kemasyarakatan memberikan bantuan setiap proposal yang masuk ke BTM Surya Utama baik hari kemerdekaan dan kegiatan-kegiatan lainnya". 149

Selain bantuan dari lembaga keuangan syariah non bank, masyarakat juga mendapat bantuan dari pemeriintah di antaranya:

"Di tahun 2013 masyarakat Desa Karangagung menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 90 Kepala Rumah Tangga dan ditahun 2019 bertambah menjadi 395 Kepala Rumah Tangga sampai dengan sekarang, program bantuan bersyarat (warga kurang mampu secara ekonomi didalam keluarganya diantaranya ada ibu hamil, anak balita, anak sekolah SD-SMA, Lansia dan disabilitas) bidang pendidikan dan kesehatan. Sumber bantuan dari pemerintah pusat melalui kemetrian sosial Republik Indonesia". 150

"Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Nasional 600, KK Tahun 2018 sd sekarang memberikan bantuan pangan melaui bank Himbara nilai bantuan Rp.110.000 perbulan dan januari 2020 bertambah menjadi Rp.150.000 per bulan, pengambilan berupa sembako (beras, telur dan lauk pauk), Sumber bantuan dari pemerintah pusat melalui kemetrian sosial Republik Indonesia". 151

"Jalin Matra 60 KK, Tahun 2018/2019, memberi bantuan peralatan/barang modal yang disesuaikan dengan pengajuan bantuan yang nilainya Rp.2.000.000,- Sumber bantuan Gubernur Jawa Timur". 152

"Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD), penerima sejumlah 21 KK, Tahun 2019, Sumber bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban". 153

Disamping itu juga pemerintah desa menggunakan badan usaha desa sebagai media dalam membantu masyarakat artinya masyarakat diberikan hasil bumdes tersebut hal ini disampaikan oleh kepada Desa Karangagung bahwa:

"Desa karangagung mempunyai BUMDes yang bernama "BAHARI SEJAHTERA" usaha bumdes antara lain: Gedung serba guna (*Sport Canter*) digunakan sarana olah raga; Pengelolaan Kios dan Los Pasar;

<sup>149</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>150</sup> Aji Agus Wiyoto, Wawancara, Kepala Desa Karangagung, Tuban, 10 Mei 2020

<sup>151</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>152</sup> Ibd

<sup>153</sup> Ibid

Pelayanan BPNT; Pengelolaan sampah masyarakat. Keuntungan bumdes 40% dialokasikan untuk bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu berupa paket sembako. Nilai bantuan per bulan 6 juta sampai 7 juta per bulan. Keuntungan bumdes 3 tahun terakhir tahun 2018 sejumlah 19 juta, tahun 2019 sejumlah 28 juta dan tahun 2020 sejumlah 75 juta". 154

Dengan adanya BUMDes yang diberikan oleh pemerintah desa tidak hanya mampu meningkautkan ekonomi desa karena 40% dari pendapatan BUMDES dialokasikan kepada masyarakat desa yang memiliki ekonomi rendah. Kebijakan ini sangat membantu sirkulasi ekonomi masyarakat jika menemukan kendala dalam mengatasi ekonomi keluarganya.

154 Ibid

#### **BAB IV**

#### ANALISA PEMBAHASAN

# A. Tingkat Literasi Keuangan Syariah Masyarakat Pesisir Pantai Utara Kabupaten Tuban

Salah satu kecerdasan yang harus dimiliki oleh manusia modern adalah kecerdasan finansial, yaitu kecerdasan dalam mengelola aset keuangan pribadi. Dengan menerapkan cara pengelolaan keuangan yang benar, maka seseorang diharapkan bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari uang yang dimilikinya. Dalam rangka mencapai kesejahteraan keuangan, seseorang perlu memiliki pengetahuan, sikap dan implementasi yang sehat. Sejauh mana pengetahuan, sikap dan implementasi seseorang dalam mengelola keuangan, dikenal dengan literasi finansial. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2013 menunjukkan bahwa Indonesia termasuk neara yang memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah diantara negara di sekitarnya. Terbukti dengan hasil survei nasional literasi keuangan yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2013 di 20 provinsi dengan 8.000 responden menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 21,8% dengan tingkat utilisasi 59,7 persen. <sup>155</sup>

Dari survei nasional OJK pada tahun 2013 senada dengan peneliti dapatkan dilapangan. Hal ini memperkuat apa yang menjadi hasil dari OJK dengan menggunakan direct meet bahwa masyarakat sangat lemah

<sup>155</sup> OJK.go.id

pengetahuannya tentang lembaga keuangan syariah. Namun disisi lain juga masyarakat mulai kembali pada lembaga keuangan syariah meskipun sebenarnya mereka masih awam dan tidak mengetahui persis tentang produk dan bahkan akad dengan berbagai sistem. Sehingga peneliti beranggapan bahwa LKMS menjadi kunci utama untuk menjadi garda terdepan sebagai pembangun literasi keuangan syariah guna bisa berperan di masyarakat dalam berbagai aktivitas masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala BMT bahwa BMT akan selalu berinovasi mencari strategi untuk menjadikan masyarakat faham dan memiliki nilai jual tinggi pada produknya di BMT. Dalam hal ini BMT akan menggandeng para penggiat ekonomi syariah, BAZNAS, dan beberapa tokoh desa untuk menciptakan strategi yang bisa tersentuh langsung oleh masyarakat.

Sejalan dengan Agustianto (*Directur Consulting*) pembangunan literasi keuangan syariah akan memberikan hasil manfaat yang bagus untuk masyarakat, LKMS dan pemerintah diantaranya adalah masyarakat mampu memilih dan memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai kebutuhan mereka, Masyarakat mampu melakukan perencanaan keuangan (*Financial Planning*) secara syariah dengan lebih baik, Masyarakat terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas (investasi bodong), Masyarakat mendapat pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan jasa keuangan syariah. Literasi keuangan syariah juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan syariah, mengingat masyarakat adalah pengguna produk dan jasa keuangan syariah.

Sehingga dari pernyataan Agustianto diatas bahwa Peran lembaga keuangan mikro syariah menjadi bagian penting bagi tercapainya cita-cita mulia mewujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Dana sosial yang telah berhasil dihimpun harus dikelola melalui perencanaan, pengorganisasi, pengawasan, dan pengendalian yang tepat. Lembaga keuangan mikro syariah diharapkan mampu menginventarisir kebutuhan masyarakat sehingga alokasi dana sosial menjadi efektif. <sup>156</sup>

Sehingga kegiatan dalam peran LKMS merupakan bagian yang tidak kala pentingnya untuk strategi pemasaran LKMS di masyarakat, dengan adanya hasil lapangan pada bab sebelumnya bahwa kendala utama adalah tingkat pemahaman atau pengetahuan yang rendah akan menjadi bumerang jika hal ini terus diabaikan oleh LKMS. Dinas Koperasi dalam hal ini pemerintah ikut proaktif dalam berbagai kegiatan di masyarakat dan sekaligus mendorong BMT untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau sosial.

Untuk mengetahui peran BMT dalam meningkatkan literasi keuangan anggotanya dilakukan wawancara dengan manajer BMT selaku nara sumber utama. Hasil wawancara yaitu BMT mimiliki peran sebagai pendidik, penyedia sarana prasarana, dan penyedia produk jasa keuangan untuk literasi keuangan anggota.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>156</sup> Masturin, Manajemen Modal Sosial Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat: Studi Pada Baitul Maal Wat Tamwil, *Jurnal Equilibrium*, volume 7, nomor 1, (Kudus, 2019)

Optimalisasi sosialisasi dan pengawasan dengan berbagai program peningkatan literasi keuangan. Optimalisasi dilakukan dengan edukasi dan sosialisasi mengenai pengendalian risiko untuk meningkatkan literasi keuangan anggota, BMT telah melaksanakan bebeberapa program yaitu program wajib menyimpan dana berupa dana dengan akad wadiah bagi anggota yang menerima pembiayaan guna meminimalisir risiko kredit, kebijakan dibukanya forum diskusi untuk memberi saran kepada anggota yang ingin berkonsultasi tentang bagaimana mengelola usaha mikronya agar menjadi mandiri guna meminimalisir risiko operasional, sosialisasi tentang strategi mengembangkan bisnis kecil oleh BMT kepada anggotanya supaya usaha mikro yang dijalani dapat terhindar dari risiko strategi yang tidak tepat.

Sosialisasi yang di lakukan BMT tidak hanya kepada masyarakat UMKM namun juga pada para intelek di Indonesia. Seperti siswa, mahasiswa, pondok pesantren, pendidik, dan PNS. Adapun sarana dalam meningkatkan literasi keuangan anggota dilakukan dengan beberapa kegiatan seperti : membentuk tim khusus (*fleksibel*) yang tugasnya memantau anggota yang berada dilapangan, seminar, sosialisasi kepada anggota pelaku UMKM dan para intelek baik di sekolah formal, informal, perguruan tinggi dan pondok pesantren. Edukasi pengendalian risiko ini dilakukan dengan maksud supaya terwujudnya tujuan dari BMT yaitu menjadikan anggotanya mandiri dalam perekonomian dan melek akan perekonomian yang akan berpengaruh pada meningkatnya literasi keuangan masyarakat.

Pendidikan dan pengembangan masyarakat tentang sistem keuangan syariah penting dilaksanakan untuk menunjukkan aksi nyata dalam bentuk edukasi dan sosialisasi. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing BMT memiliki variasi pola pendidikan dan sosialisasi. BMT Surya Raharja melakukan sosialisasi dengan membagikan brosur yang berisi sejarah, visi, misi, strategi, dan tujuan BMT serta produk-produk yang ditawarkan. BMT Surya Utama melaksanakan edukasi dan sosialisasi secara terintegrasi dengan kegiatan pemasaran dan melalui pertemuan per tiga bulan dengan masyarakat sekitar. BMT Surya Raharja juga membagikan brosur dan menyelenggarakan *public festival*. BMT Surya Utama melakukan sosialisasi terhadap calon nasabah terutama tentang perbedaan akad-akad pada sistem keuangan syariah dengan konvensional serta pemahaman tentang prinsip adil. Adapun BMT Surya Raharja tidak banyak melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi karena menganggap sulit untuk merubah *mindset* masyarakat.

Rencana yang telah dibingkai dalam kegiatan edukasi terhadap masyarakat tentang produk keuangan syariah sebenarnya dapat dilakukan secera terjadwal ataupun tidak. Karena kesulitan yang dihadapi oleh BMT pada umumnya ada pada mindset masyarakat pesisir yang masih tertanam dengan sistem keuangan konvensional. apabila fungsi lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT ini bisa diterima oleh masyarakat maka sistem keuangan yang dibangun arus bawah bukan tidak mungkin dapat membangun sistem perekonomian yang kuat. literasi keuangan syariah dilakukan dengan dua cara yaitu:

#### 1. Melalui media sosial

Sosialisasi melalui media sosial dan elektronik. Adapun media elektronik dilakukan melalui radio lokal dan media sosial dilakukan dengan website resmi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh BMT dapat di saksikan dan di dengar oleh setiap lapisan masyarakat. Salah satu kegiatan yang termuat dalam media sosial adalah kegiatan silahturahmi dan diskusi pengelolaan keuangan dengan antar BMT Jawa Timur, seminar di pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon adalah salah satu bentuk sinergi antar BMT dalam meningkatkan nilai manfaat, serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

## 2. Secara langsung

Sosialisasi secara langsung melalui dua sistem yaitu sosialisasi dilakukan oleh staf karyawan BMT yang bersifat *fleksibel* kepada anggota melalui kegiatan kemasyarakatan, dan yang kedua anggota yang datang ke kantor BMT untuk berkonsultasi secara langsung.

Selain itu untuk optimalisasi BMT yang menjadi salah satu pilar utama dalam tubuh BMT yakni dengan melakukan berbagai optimalisasi penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah bekerjasama dengan Badan Amil Zakat ataupun dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal ini merupakan bagian dari kontribusi BMT untuk membawa bangsa ini keluar dari lingkaran kemiskinan dan meningkatkan literasi keuangan syariah. BMT sangat berpengaruh dalam percepatan pertumbuhan UMKM masyarakat pesisir Tuban. Karena perannya sebagai intermediasi keuangan yang melakukan

penghimpun dana dari masyarakat dan penyalurkan dananya pada usaha-usaha yang bersifat produktif seperti UMKM. Untuk itu dalam pengembangan literasi keuangan syariah perlu adanya optimalisasi peran BMT yaitu memudahkan akses administrasi dalam menyalurkan dana kepada para pelaku usaha menengah kecil mikro, dalam membutuhkan modal atau pendanaan agar usahanya dapat berkembang dan berjalan lancar tanpa hambatan terutama dalam masalah permodalan.

Para pelaku UMKM di pesisir pantai utara Tuban mempunyai kendala dari segi permodalan dalam mengembangkan usahanya ketika mengajukan permohonan tambahan modal kepada BMT. Maka peran BMT dapat menjadi solusi dalam mendukung permodalan bagi para pelaku UMKM, oleh karena itu BMT harus mensetting persyaratan pengajuan tambahan modal lebih mudah dan sederhana dari pada di perbankan. Hal ini juga bisa menjadi salah satu peluang atau sebagai alternatif bagi UMKM agar lebih mudah dalam mengakses permodalan. Selain berperan buntuk membantu masalah permodalan bagi UMKM, lembaga keuangan mikro syariah khususnya BMT juga dapat meningkatkan dan menguatkan perekonomian masyarakat. Kemudahan untuk mengakses permodalan yang diberikan oleh BMT mendorong masyarakat untuk membuka usaha-usaha mikro baru. Melalui usaha-usaha ini ekonomi kerakyatan mengalami penguatan. Penguatan ekonomi kerakyatan ini akan memberikan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat.

Dengan demikian peran BMT juga dapat membantu upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah juga harus berpihak pada para pelaku usaha mikro, dimana jika itu dikembangkan dapat mengurangi pengangguran dan memperkuat perekonomian bangsa serta upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan akan terpenuhi.

Sehingga untuk terus mengembangkan keberlangsungan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah (BMT) ini perlu adanya peran dan dukungan dari pemerintah berupa sistem regulasi. Dimana jika sistem regulasi ini berpihak kepada lembaga keuangan mikro syariah dan terealisasikan dapat memperkuat lembaga BMT ini menjadi lembaga yang sehat dan mandiri.

# B. Tingkat Inklusi Keua<mark>ngan Syari</mark>ah Mas<mark>yar</mark>akat Pesisir Pantai Utara Kabupaten Tuban

Ketimpangan ekonomi menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk diselesaikan dengan cepat, karena akan mengganggu pemerataan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan ketimpangan ekonomi yang membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginisiasi inklusi keuangan. Dengan adanya inklusi keuangan diharapkan setiap lapisan masyarakat memiliki akses yang sama dalam menggunakan produk keuangan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mempersempit kesenjangan diantara orang kaya dan orang miskin.

Berdasarkan alasan tersebut, maka inklusi keuangan yang pro masyarakat miskin (pro-poor) dengan menghilangkan hambatan masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan. Paling tidak ada tiga dimensi inklusi keuangan yaitu di luar jangkauan (outreach), manfaat (usage), dan kualitas (quality) jasa keuangan. Dimensi outreach merupakan sejauh mana penerima dapat menjangkau inti layanan jasa keuangan. Kemudian dimensi usage mengukur kegunaan sistem keuangan yang tergambar melalui mesin ATM (Automatic Teller Machine), kantor cabang bank, deposan rumah tangga, dan peminjam. Sedangkan domensi quality level produk keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat menikmati fasilitas jasa keuangan secara utuh tanpa membedakan mana yang miskin dan kaya.

Masyarakat pesisir Tuban telah merasakan manfaat dari lembaga keuangan syariah non bank, dimana BTM Surya Utama dan BMT Surya Raharja yang bertempat di Desa Karangagung dan Desa Glodog telah mampu memaksimalkan fungsi dan peran sebagai inklusi keuangan untuk mensejahterakan masyarakat. hal itu terjadi karena BTM Surya Utama dan BMT Surya Raharja sudah menerapkan pilar pertama dari Strategi Nasional Inklusi Keuangan (SNIK) yaitu Edukasi keuangan adalah memberikan edukasi berupa wawasan dan pengeahuan tentang jasa layanan keuangan, serta kesadaran berkaitan dengan produk dan pentingnya jasa keuangan. Ruang lingkupnya meliputi edukasi terhadap variasi produk/jasa keuangan, edukasi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup> I Made Sanjaya dan Nursechafi, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, *Volume 18, Nomor 3, Januari 2016* 

risiko dari pengguanaan jasa keuangan, edukasi tentang perlindungan anggota, dan edukasi tentang keterampilan mengelola keuangan. <sup>158</sup>

Strategi inklusi direalisasikan karena pemerintah ingin meningkatkan kesehteraan masyarakat. dengan kata lain, masyarakat harus diberikan kesempatan yang sama dalam mengakses modal untuk kegiatan produktif tanpa adanya klasterisasi dari lembaga keuangan. Prinsipnya ada 2 (dua) alasan bagi masyarakat yang tidak punya akses kepada lembaga keuangan. Pertama, tidak mau karena alasan tidak perlu dan alasan agama, budaya dan lain-lain. Kedua, tidak mampu dengan alasan pendapatan rendah, risiko tinggi dan syarat tidak terpenuhi. Seperti yang tergambar dalam bagan berikut: 159



Gambar: 4.1 Akses Masyarakat

Gambar tersebut telah memberikan paparan yang jelas tentang alasan masyarakat yang tidak ingin menggunakan jasa lembaga keuangan. Persepsi

159 Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>158</sup> Group Pengembangan Keuangan Inklusif Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Nasional, *Strategy for Financial Inclusion Fastering Economic Growth and Accelerating Poverty Red uction*, Juni 2012, hal. 8.

tentang lembaga keuangan yang hanya digunakan oleh orang kaya masih melekat pada kehidupan masyarakat. oleh sebab itu, lembaga keuangan perlu melakukan langkah-langkah dalam mengantisipasi pemikiran masyarakat yang masih awam pada lembaga keuangan. Salah satu caranya dalah dengan mengedukasi masyarakat dengan baik dan benar dan memberikan pendampingan terhadap masyarakat.

Beberapa edukasi yang diberikan kepada masyarakat akan memberikan manfaat pengetahuan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Secara teoritis konsep yang diberikan oleh pemerintah tentang inklusi keuangan syariah tidak hanya terbatas pada pembiayaan dan tabungan tetapi lebih universal. Dimana, masyarakat di edukasi baik dari sisi produk, risiko, perlindungan anggota yang melakukan pembiayaan serta edukasi pengelolaan keuangan. penerepan konsep tersebutlah yang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. secara empiris, inklusi keuangan lebih kearah peningkatan anggota baik dalam simpanan dan pembiayaan. Menurut Agung sebagai manajer BMT Surya Raharja mengatakan bahwa:

"Kita juga menerangkan produk BMT itu bagaimana dan memberikan motivasi kepada mereka agar usaha mereka bisa jalan terus, ini juga menjadi strategi kami untuk menanggualngi masyarakat agar membeyar cicilan tepat waktu.<sup>160</sup>

Hal ini juga didukung oleh peryataan Abduh selaku manajer BTM Surya Utama yaitu:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>160</sup> Agung, *Wawancara*, Manajer BMT Surya Rahardja Tuban, 26 Mei 2020.

"Dewan Syariah yang setiap memberikan pengajian diselipi dengan materi pembiayaan syariah melaui dakwah di beberapa masjid sekitar BTM Surya Utama. Materi ini biasanya diberikan pada penduduk yang tidak tau produk BMT. Pemintanya juga banyak karena pengajian ini sifatnya rutin dilakuakan oleh pengurus masjid dengan penceramah yang berbeda-beda, tapi jika penceramahnya dari dewan syariah pengurus masjid memberikan pengumunan kepada penduduk karena kita sudah melakukan kerjasama dengan masjid". <sup>161</sup>

Pilar pertama dari SNIK yang telah diterapkan oleh lembaga keuangan syariah non bank telah memberikan dampak yang sangat signifikan kepada masyarakat. pengetahuan masyarakat tentang produk-produk keuangan syariah bertambah sehingga minat untuk melakukan pembiayaan dan menabung disana terbangun dengan baik. BMT dan BTM memberikan beberapa edukasi kepada masyarakat pesisir dengan konsep dakwah di masjid-masjid desa yang komparasikan dengan penjelasan produk dan keunggulan lembaga keuangan syariah. Disamping itu juga, pegawai BMT dan Lembaga BTM sering juga memberikan motivasi kepada masyarakat agar usaha yang dijalankan menjadi lebih baik dan mampu memenuhi tanggugannya. Kepala Desa Karangagung membenarkan bahwa lembaga keuangan syariah non bank telah menerapkan pilar pertama dari SNIK. Seperti yang dikatakan oleh kepala desa karangngagung bahwa:

"Saya sering menghadiri acara undangan dari BMT, dan BMT disini ini sering mengisi dimasjid kampung mas, jadi saya tau apa itu BMT. penduduk saya juga yang pinjam ke BMT karena kan disini banyak orang yang kekurangan modal jadi mereka pinjem ke BMT. ya dari pengajian dimasjid itu mas, jadi kan masyarakat tau apa itu BMT dan bagaimana cara pinjamnya bagaimana, semua itu biasanya dari BMT itu ada yang ke pasar begitu nawarin, ada yang juga ke rumah-rumah langsung karena

\_

<sup>&</sup>lt;sup>161</sup>Muhammad Abduh, Wawancara, Manajer BTM Surya Utama Tuban, 25 Mei 2020.

kebetulan saya kepala desanya jadi saya tau apa yang dilakukan oleh masyarakat saya".<sup>162</sup>

Terkait dengan tingkat inklusi masyarakat, BMT Surya Raharja dan BTM Surya Utama telah mampu meningkatkan jumlah anggota baik pembiayaan dan simpanan di daerah pesisir Tuban antara 2018 sampai 2019. Hal ini berdasarkan data anggota dari BTM Surya Utama dan BMT Surya Raharja. Adapau jumlah anggota sebagai berikut:



Gambar 4.2 Pertumbuhan Anggota<sup>163</sup>

Berdasarkan data di atas, persentase jumlah anggota keseluruhan dari BMT Surya Rahardja dan BTM Surya Utama mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Jumlah anggota BTM Surya Utama pada tahun 2018 adalah 8.104 dan pada tahun 2019 adalah 9.448, dengan kata

-

 $<sup>^{162}</sup>$  Aji Agus Wiyoto,  $\it Wawancara$ , Kepala Desa Karangagung, Tuban, 10 Mei2020

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup> Data Di Olah dari jumlah Nasabah BTM Surya Utama dan BMT Surya Rahardja

lain, terdapat kenaikan persentase anggota untuk daerah pesisir Tuban. Kenaikan persentase tersebut sekitar 16% dari total jumlah anggota yang terdiri dari simpanan dan pembiayaan pada tahun 2018-2019.

Sedangkan persentasi jumlah anggota dari BMT Surya Rahardja juga mengalami peningkatan yaitu padatahun 2018 sebanyak 7.700 dan pada tahun 2019 sebanyak 9.200. jika di persentasekan, kenaikan total anggota yang terdiri dari simpanan dan pembiayaan sebesar 19%. Dengan demikian, kinerja BTM Surya Utama dan BMT Surya Rahaja sebagai inklusi keuangan syariah non bank terbilang efektif karena dari tahun ke tahun minat masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan telah meningkat.

Berdasarkan metodologi yang dikembangkan oleh *Fair Finance Guide International* (FFGI) terdapat beberapa indikator dalam mewujudkna inklusi keuangan yang di ukur dalam penelitian ini.<sup>164</sup>

Tabel: 4.1 Pengukuran Inklusi Keuangan

No	Indikator FFGI dalam pengukuran inklusi keuangan	Prakti BT Uta	•	Praktik BMT Surya Raharja
1.	Lembaga keuangan	Pelayan	tersedia,	Pelayan tersedia,
	memiliki kebijakan, layanan dan produk	pada minimum	level	karena BMT Surya
	yang dikhususkan untuk	minimum	karena	Raharja sebagian
	masyarakat miskin dan kelompok marginal	sebagian	besar	besar pelayanan
		pelayanan		merupakan strategi

<sup>&</sup>lt;sup>164</sup> Rotue Nuraini Tampubolom, dkk, peran perbankan menuju keuangan inklusi di Indonesia (studi kasus penyaluran kredit usaha mikro melalui program kemitraan Kampoeng bNI Batik Tulis Lasem oleh Bank BMI 46), 2016-2017.

1

	merupakan strategi	inklusi keuangan
	inklusi keuangan	yang di <i>design</i>
	yang di <i>design</i>	untuk masyarakat
	untuk masyarakat	miskin dan
	miskin dan	kelompok usaha
	kelompok usaha	mikro kecil
	mikro kecil	menengah
	menengah	
2. Lembaga keuangan	Pelayan tersedia di	BMT Surya
memiliki cabang di perdesaan	daerah perdesaan	Rahardja memiliki
	guna menyetarakan	cabang disaerah
	pendapatan dan	desa pesisir Tuban
	tidak <mark>ada p</mark> erbedaan	demi menyetarakan
	antara orang miskin	pendapatan
	dan kaya	masyarakat
3. Lembaga keuangan	Informasi yang	BMT Surya Raharja
menginformasikan hak- hak anggota dan risiko	diberikan kepada	memberikan
dari pelayanan/produk	anggota sangat jelas	informasi yang jelas
yang ditawarkan	dan mendalam, hal	kepada calon
	ini untuk	anggota/anggota
	mengantisipasi	terkait produk,
	adanya pembiayaan	risiko dan lain-lain.
	macet bagi	Guna
	pengguna jasa	mengantisipasi
	pembiayaan	adanya pembiayaan
		macet di
		masyarakat
4. Persyaratan yang	Persyaratan yang	Persyaratan yang
diberikan oleh lembaga keuangan masih bersifat	tersedia untuk	tersedia untuk
local	masyarakat masih	masyarakat masih

		tergolong ringar	n tergolong ringan
		tanpa memberatka	n tanpa memberatkan
		masyarakat miskin	masyarakat miskin
5.	Lembaga keuangan	Sesuai dengar	n Sesuai dengan
	membebankan biaya yang sangat rendah	peraturan yang d	i peraturan yang di
		tetapkan oleh OJI	K tetapkan oleh OJK
		tentang inklus	i tentang inklusi
		keuangan adalal	h keuangan adalah
		masih berdasarka	n masih berdasarkan
		pada daya saing da	n pada daya saing dan
		kompetisi. Bank	- kompetisi. Bank-
		bank BUMN	N bank BUMN
	4	menj <mark>adi</mark> pesain	g menjadi pesaing
		dal <mark>am</mark> m <mark>em</mark> asarka	n dalam memasarkan
		produk BTM Sury	a produk BMT Surya
		Utama kepad	a Raharja kepada
		masyarakat	masyarakat

Sumber: Bank Indonesi, 2016.

Kegiatan BTM Surya Utama dan BMT Surya Raharja sebagai inklusi keuangan yang meng-handle kaum marginal di daerah pedesaan sangat efektif. Pasalnya masyarakat yang semula tergantung kepada rentenir terkait dengan permodalan usaha sekarangg sudah beralih kepada BMT Surya Raharja dan BTM Surya Utama. Strategi nasional inklusi keuangan telah memberikan dampak yang positif kepda msyarakat sehingga 5 (lima) indikator dalam FFGI mampu terpenuhi dengan baik oleh BTM Surya Utama dan BMT Surya Raharja.

# 1. Kebijakan pelayanan dan produk

BTM Surya Utama dan BMT Surya Raharja sama-sama memberikan sebuah produk yang dikhususkan untuk membantu masyarakat miskin. produk-produk yang dikeluarkan diharapkan mampu mengakselerasi kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat pesisir Tuban.

## 2. Cabang di Pedesaan

BTM Surya Utama dan BMT Surya Raharja sama-sama memiliki cabang di pedesaaan sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengaksesnya. Kemudahan dalam mengakses lembaga keuangan akan mampu meningkatkan minat masyarakat dalam melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah baik dari segi simpanann ataupun pembiayaan.

## 3. Transparansi informasi kepada anggota

BTM Surya Utama dan BMT Surya Raharja sangat transparan dalam memberikan informasi seputar produk, dan lain-lain. Hal inilah yang telah memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah. Tidak ada istilah konspirasi ataupun spekulasi dalam mengaplikasikan produk-produk di BTM Surya Utama dan BMT Surya Raharja.

## 4. Syarat pengajuan pembiayaan dan simpanan

BTM Surya Utama dan BMT Surya Raharja juga sama-sama memberikan syarat yang mudah dalam mengajukan pembiayaan dan simpanan agar masyarakat tidak merasa diberatkan dan menjadi lebih mudah dalam mengjangkau produk-produk tersebut. Syarat-syarat tersebut masih bersifat

lokal karena sasaran utama inklusi keuangan adalah pedesaan yang masyarakatnya masih termaginalkan.

### 5. Beban biaya

BTM Surya Utama dan BMT Surya Raharja sama-sama memberikan beban biaya yang tidak berat, karena melihat kondisi lingkungan yang berada di pedesaan. Kuantitas dan kualitas kehidupan yang berbeda dengan masyarakat desa menjadi pertimbangan utama dalam menentukan beban biaya masyarakat. oleh sebab itu, BTM Surya Utama dan BMT Surya Raharja mengantisipasi tersebut dengan memberikan biaya yang rendah kepada anggota/masyarakat.

# C. Implikasi Tingkat Literasi Terhadap Inklusi Keuangan Syariah Masyarakat Pesisir Tuban.

Literasi keuangan syariah merupakan titik tumpu LKMS dalam memberikan atau membuat program dalam beberapa kegiatan masyarakat pesisir pantai Tuban yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Dalam hal ini akan berdampak pada tiga aspek yakni *knowledge*, agama dan ekonomi. Yang dijelaskan sebagai berikut:

# 1. Aspek Knowledge

Aspek *knowledge* merupakan aspek pengetahuan yang berkait sejauh mana masyarakat mengetahui pada sesuatu yang menjadi pembahasan. Telah diketahui di bab sebelumnya bahwa literasi keuangan syariah dalam mengetahui produk keuangan syariah masyarakat pantai pesisir utara Tuban bisa dikatakan rendah, rendah tersebut berdasarkan hasil lapangan bahwa

memang sebagian besar tidak mengetahui produk produk LKMS BMT sehingga hal ini menjadi kendala bagi keberlangsungan BMT dalam mengembangkan lembaga keuangan nya.

Aspek *knowledge* dalam literasi keuangan syariah akan berbanding lurus apabila adanya perubahan pola pikir masyarakat untuk berusaha untuk mengetahui dari produk produk lembaga keuangan syariah, sehingga dampak itu akan menjadi barometer pada *fitback* atau profit BMT di setiap periodenya.

## 2. Aspek Agama

Islam adalah agama yang mudah dan tidak mempersulit pada ummatnya. Mudah sulitnya tergantung pada diri masing-masing, apakah mereka mau terus belajar atau mereka mau mengabaikan sebagian dari aktivitas hidup nya yang salah menurut ajaran agamanya.

Kesadaran masyarakat pesisir utara yang rendah hal ini bisa dilihat pada hasil penelitian bahwa mereka tidak mengetahui tentang akad yang digunakan dalam transaksi simpanan, pembiayaan dan lain sebagainya. Dampak dari aspek agama ini menggiring masyarakat berada pada jalan yang telah diajarkan oleh syariat dengan menjauh dari sistem ribawi dengan bergabung pada lembaga keuangan syariah atau dikenalnya BMT.

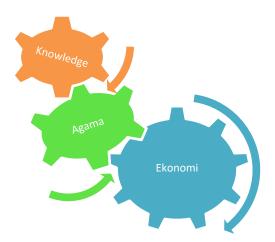
# 3. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi merupakan melihat ekonomi masyarakat dari sisi memanfaatkan adanya literasi keuangan syariah. Ekonomi masyarakat dalam menjalankan pertaniannya, perdagangannya, usahanya terbelit dengan

permasalahan ekonomi. Dan ini merupakan kendala bagi masyarakat pesisir pantai utara Tuban. Pengelolaan keuangan yang terbatas oleh masyarakat akan menjadi penghambat pada kemajuan perdagangannya dan usahanya. Pengelolaan tersebut akan bisa didampingi oleh pihak lembaga keuangan apabila masyarakat bisa menerima perubahan adanya lembaga keuangan syariah dengan beralih pada sistem keuangan yang benar sesuai ajaran syariat.

Dampak literasi keuangan syariah pada aspek ekonomi akan memberikan signal positif pada ekonomi masyarakat pesisir pantai utara Tuban, namun disisi lain membawa perubahan ekonomi masyarakat dengan perubahan pendapatan yang dihasilkan. Karena permasalahan ekonomi akan terus menghantui jika tidak ada intervensi lembaga yang lebih memahami secara tehnis. Ketiga aspek yang menjadi implikasi dalam meningkatkan literasi keuangan syariah saling berkaitan satu sama lain. Hal ini digambarkan dalam gambar 4. 3 berikut.

Gambar: 4.3 Hasil Literasi Masyarakat Pesisir



Berdasarkan gambar diatas hakikat dari implikasi literasi keuangan syariah akan terus berdampak pada warna biru. Artinya *knowledge* adalah dasar, Agama merupakan tuntunan dan ekonomi merupakan sumber kehidupan. Maksud dari pada *Knowledge* sebagai dasar adalah pengetahuan masyarakat yang rendah harus bisa memanfaatkan waktu untuk selalu ikut aktif dari beberapa kegiatan literasi keuangan syariah, mereka dari berbagai *background* bisa kerjasama dalam saling memberitahu atas produk produk yang telah difahami.

Dari dasar ini akan beranjak pada aspek agama, tidaklah rugi pengetahuan tentang literasi sesungguhnya merupakan ajaran syariat islam. Karena didalamnya akan diberikan wawasan tentang transaksi ribawi, akadakad transaksi di BMT dan lain sebagainya. Sehingga dari keduanya ini akan menghasilkan perubahan ekonomi berupa dampak aspek ekonomi yang maju.

Ketiga aspek diatas juga berjalan dengan adanya upaya atau peran LKMS dalam meningkatkan literasi keuangan syariah. Adapun peran untuk membangun literasi keuangan syariah tersebut terbagi sebagai berikut.

## 1. Sinergi antar BMT

Erat tangan antar BMT merupakan sinergi atau kerjasama bersama guna saling mendorong dan mendukung kegiatan literasi keuangan syariah di masyarakat. Antar BMT ini akan menjadi penerang pada kemajuan LKMS di masyarakat pesisir utara Tuban dengan mengadakan atau berinovasi

dalam mengedukasi masyarakat baik secara *direct meet* atau kegiatan yang mengumpulkan khalayak banyak.

### 2. Sinergi BMT dengan Pemerintah

Sinergi BMT dengan Pemerintah merupakan dua tangan yang berbeda tapi saling membantu satu sama lain. Begitu juga dalam literasi keuangan syariah, pemerintah ikut andil melalui Dinas Koperasi untuk bisa intervensi dalam meningkatkan literasi keuangan syariah. Karena sangat naif sekali jika diabaikan sinergi ini akan ada suatu kemajuan LKMS jika tidak menggalakkan kegiatan literasi keuangan syariah.

# 3. Sinergi BMT dengan Desa

Adapun sinergi desa diharapkan turut melancarkan dan memudahkan dalam kegiatan LKMS di desa baik yang dilaksanakan secara *direct meet* atau dilaksanakan secara *private door to door*.

Jika semua elemen mampu mengoptimalkan ruang geraknya maka tujuan inklusi keuangan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar menjadi lebih baik mampu tercapai. Manfaat yang diperoleh dari inklusi keuangan dapat dilihat juga dari penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan tingkat kemiskinan serta mampu meminimalisir kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Hal ini bisa terjadi karena peningkatan inklusi satu persen akan mampu memacu pertumbuhan ekonomi sampai 0,03 persen.

Pembaiayaan usaha mikro dan usaha kecil (UMK) menjadi prioritas utama dalam strategi nasional inklusi keuangan (SNIK). Untuk mendukung tujuan tersebut maka dirancang sebuah strategi keuangan yang nantinya

mampu mendukung ekonomi masyarakat terutama masyarakat perdesaan. Salah satu keuangan yang berperan penting dalam mewujudkan itu adalah keuangan syariah. Operasionalnya sangat melarang riba dan mengutamakan usaha-usaha produktif. Dalam ayat al qur'an disebutkan, yang artinya:

"... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S al Baqarah (2):275). 165

Ayat tersebut melarang keras terhadap praktek ribawi karena dampaknya sangat berbahaya bagi ekonomi dan sosial. Disamping itu juga, orang yang memakan riba akan seperti mayat hidup yang berjalan di dunia. Oleh sebab itu, Allah memberikan solusi konstruk dalam menyelesaikan problematika tersebut dengan konsep jual beli. Keuangan syariah menerapkan pinsip-prinsip syariah yang dibentuk dengan beberapa model instrumen keuangan syariah seperti Baitul Mal Wal Tamwi (BMT) Surya Raharja dan Baitul Tanwil Muhammadiah (BTM) Surya Utama.

Hadirnya BMT Surya Raharja dan BTM Surya Utama ditengah-tengah masyarakat perdesaan menjadi skema nyata dari identitas jasa keuangan inklusif yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan usaha-usaha produktif di masyarakat desa. Tujuan yang dimaksud disini adalah sebagaimana yang ditulis oleh Nusron Wahid, yaitu:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>165</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya,2:275.

- Menjadikan keuangan inklusif sebagai satu usaha untuk membuka eksklusivitas lembaga keuangan yang pada umumnya hanya memberi permodalan kepada pihak-pihak yang dianggap bankable.
- 2. Menetapakan niat dalam menjalankan keuangan inklusif, yaitu niat kesediaan untuk memasukkan pihak non bankable yang selama ini dieksklusi atau dipinggirkan dari lembaga keuangan untuk dikategorikan kembali sebagai pihak yang layak dan patut mendapatkan berbagai jasa layanan keuangan.<sup>166</sup>

Dengan kata lain, akses masyarakat desa kepada lembaga keuangan syariah akan lebih mudah dengan memasukkan konsep BMT Surya Raharja dan BTM Surya Utama ke tengah-tengah masyarakat desa. Pemberian pinjaman yang relatif rendah akan mempermudah bagi usaha mikro kecil dalam mengembangkan usahanya sehingga pendapatan akan ikut meningkat. Semua itu dilakukan atas dasar tolong menolong sesama manusia. Dalam al qur'an disebutkan yang artinya:

"Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikandan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan (Q.S. Al Maidah, (5): 2). 167

Penjelasan diatas mengindikasikan larangan pada penggunaan dan transaksi yang mengandung unsur jual beli produk haram. Peran literasi dalam

<sup>&</sup>lt;sup>166</sup> Nusron Wahid, Keuangan Inklusif: Hegemoni Keuangan, 64-65.

<sup>&</sup>lt;sup>167</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya,5:2.

hal ini sangat penting karena masyarakat mampu memfilter transaksi haram dan halal dan mampu meningkatkan pendapatannya. Konsep al qur'an tersebut dapat di arahkan kepada kegiatan produktif yang dalam jangka panjang akan mampu membuka lapangan pekerjaan baru sehingga konsep tolong menolong dapat terwujud, hal ini mampu diterapkan oleh masyarakat desa pesisir pantai utara Tuban yang notabene masyarakat *unbanked*, dengan adanya keuangan syariah akses keuangan semakin mudah sehigga pendapatan mereka meningkat. Adapun perubahan yang dirasakan oleh nasabah setelah melakukan pembiayaan, yakni sebagai berikut:

Tabel: 4.2
Kesejahteraan Masyarakat Sebelum Dan Sesudah Melakukan
Pembiayaan

	Kondisi Sebalum	Kondisi Sesudah	
Narasumber	Melakukan Pembiayaan	Melakukan Pembiayaan	
Sukinten	Seorang penjual sayur	Pasca melakukan	
	keliling dengan	melakukan pembiayaan,	
	pendapatan Rp. 1.500.000	Ibu Sukinten mengalami	
	perbulan.	kenaikan pada	
		pendapatannya yaitu Rp.	
		1.700.000.	
Inawaroh	Seorang penjual gorengan	Setelah melakukan	
	yang memiliki pendapatan	pembiayaan, Ibu	
	Rp. 2.100.000 perbulan	Inawaroh pendapatannya	
	sebelum melakukan	mengalami peningkatan	
	pembiayaan.	menjadi Rp. 3.000.000	
		perbulan.	
Kasmuah	Seorang penjual Ikan yang	Setelah mendapatkan	

	memiliki pendapatan Rp.	pembiayaan, Kasmuah	
	1.600.000 perbulan	mampu meningkatkan	
	sebelum melakukan	pendapatannya menjadi	
	pembiayaan.	Rp. 1.800.000 perbulan.	
Siti Kusnuriyah	Seorang penjual sayur dan	Setelah melakukan	
	bubur keliling dengan	pembiayaan, Ibu Siti	
	pendapatan rata-rata Kusnuriyah		
	perbulan sebesar Rp.	pendapatannya	
	1.700.000. sebelum	mengalami peningkattan	
	melakukan pembiayaan	sebesar Rp. 1.800.000	
		perbulan.	
Inawaroh	Seorang penjual nasi dan	Setelah melakukan	
	jaja <mark>na</mark> n keliling	pembiayaan pendapatan	
	mempunya pendapatan	Ibu Inawaroh mengalami	
	sebesar Rp. 1.200.000	peningkatan sebesar Rp.	
	p <mark>er</mark> bulan sebe <mark>lu</mark> m	1.800.000 perbulan.	
	melakukan pembiayaan	4	
	kepada Lembaga		
	keuangan.		
Mahnin	Sorang penjahid yang	Setelah mendapatkan	
	pendapatan perbulannya	pembiayaan pendapatan	
	sebesar 1.400.000	Ibu Mahnin mengalami	
	perbulan	peningkatan sebesar	
		2.000.000 perbulan.	
Astutik	Seorang penjual jajanan	Setelah mendapatkan	
	keliling yang	pinajaman dari BMT	
	pendapatannya sebesar	pendapatannya	
	Rp. 1.600.000 perbulan	mengalami peningkatan	
		sebesar Rp. 2.100.000	
		perbulan	
	I .	1	

Munasri	Seorang penjual jajanan	Setelah mendapatkan
	diruah dengan pendapatan	pembiayaan incomenya
	perbulan Rp. 1.700.000	mengalami peningkatan
	perbulan	sebesar Rp.2.000.000
		perbulan
Udin	Seorang tukan becak dan	Setelah mendapatkan
	pemberi jasa layanan	pinjaman pendapatannya
	mengantar galon dan	mengalami peningkatan
	kebutuhan rumah tangga	menjadi 1.200.000
	lainnya. Sebelum	perbulan
	melakukan pinjaman	
	pendapatannya rata-rata	
	1.000.000 perbulan.	
Murdoyo	Seorang pemberi jasa	Setelah melakukan
	a <mark>ng</mark> kutan ikan. Sebe <mark>lu</mark> m	pembiayaan kepada BTM
	mendapatkan pembiayaan	pendapatnnya mengalami
	kepada BTM	peningkatan sebesar Rp.
	pendapatannya Rp.	3.000.000 perbulan
	2.500.000 perbulan.	
Hasan	Seorang penjual es tebu	Setelah mendapatkan
	yan memiliki pendapatan	pinjaman kepada BTM
	1.500.000 perbulan	pendapatannya meningkat
		menjadi 2.000.000
		perbulan.
	dialah handasankan hasil wawana	

Sumber: Data diolah berdasarkan hasil wawancara dengan anggota pembiayaan

Kemudahan akses terhadap lembaga keuangan telah memberikan perubahan kepada pendapatan masyarakat desa. Layanan jasa keuangan yang tersedia dianggap sebuah alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi

keinginan untuk kepemilikan barang atau pelaksanaan kegiatan tertentu maupun dalam upaya mengembangkan usaha yang dimiliki. Layanan tersebut ditawarkan oleh BMT Surya Raharja dan BTM Surya Utama kepada masyarakat Desa Karangagung dan Desa Glodog, namun belum semua masyarakat mengetahui berbagai jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal tersebut.

Walaupun pemahaman literasi masyarakat relatif rendah, tetap penggunaan akan produk-produk BMT Surya Raharja dan BTM Surya Utama masih relatif tinggi. Hal ini terjadi karena manyoritas masyarakat sangat kekurangan modal dalam mengembangkan usahanya. Hadirnya BMT Surya Raharja dan BTM Surya Utama di tengah-tengah masyarakat desa telah mampu menghidupkan siklus ekonomi masyarakat. Para UKM di daerah pesisir pantai Utara Kabupaten Tuban pendapatannya meningkat secara signifikan sehingga ekonomi keluarga menjadi lebih baik. Tidak hanya itu, kualitas pengetahuan tentang lembaga keuangan dan berdagang secara islami ikut meningkat. Hal itu dikarenakan adanya pendekatan persuasif oleh pihak BTM Surya Utama dan BMT Surya Raharja.

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Temuan penelitian ini berhubungan dengan implikasi tingkat literasi terhadap inklusi keuangan syariah masyarakat pesisir pantai utara Kabupaten Tuban yang didasarkan pada rumusan permasalahan dan data yang dikumpulkan dilapangan. Maka, kesimpulan dari hasil dan pembahasan adalah sebagai berikut:

- 1. Tingkat literasi keuangan syariah di masyarkat pesisir pantai utara Kabupaten Tuban masih terbilang rendah karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui esensi dari literasi keuangan syariah. Oleh sebab itu, Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) Surya Raharja dan BTM Surya Utama menggunakan strategi berbasis sosialisasi, edukasi, dan kegiatan sosial dalam meningkatkan literasi keuangan dengan pengetahuan keuangan, berkaitan keterampilan yang keuangan, keyakinan keuangan, sikap keuangan dan prilaku keuangan. Syariah (LKMS) Adanya Lembaga Keuangan Mikro memberikan sebuah pengetahuan baru bagi masyarakat pesisir Tuban tentang pentingnya akses jasa keuangan syariah, layanan keuangan syariah danpengelolaan keuangan syariah yang baik.
- Inklusi keuangan yang berada dipedesaan telah mampu merubah kualitas hidup masyarakat. pendapatan masyarakat meningkat seiring dengan adanya kemudahan akses masyarakat kepada lembaga

keuangan non bank (BTM Surya Utama dan BMT Surya Raharja. Jumlah penabung di BTM Surya Utama meningkat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2018jumlah anggota sebanyak 8.104 dan pada tahun 2019 jumlah anggota meningkat menjadi 9.448, dengan kata lain, terdapat kenaikan persentasi anggota untuk daerah pesisir pantai utara Kabupaten Tuban. Kenaikan persentase tersebut sekitar 16% dari total jumlah anggota yang terdiri dari simpanan dan pembiayaan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Untuk jumlah anggota dari BMT Surya Raharja juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2018 sebanyak 7.700 anggota dan pada tahun 2019 jumlah anggota naik menjadi 9.200. jika di prosentasikan, kenaikan total anggota yang terdiri dari tabungan dan pembiayaan sebesar 19%. Dengan kata lain, strategi nasional inklusi keuangan telah berhasil di implementasikan pada masyarakat desa berkat kerjasama pada semua pihak.

3. Pengetahuan masyarakat pesisir pantai utara Kabupaten Tuban tentang literasi keuangan syariah masih sangat minim / rendah tetapi tidak sebanding dengan tingkat inklusi keuangan syariah masyarakat pesisir pantai utara Kabupaten Tuban yang tinggi, hal itu disebabkan adanya pelayanan yang baik, kemudahan masyarakat dalam mengakses pembiayaan dari masyarakat, biaya yang rendah serta kepercayaan dari masyarakat untuk menyimpan uangnya pada lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berada di masyarakat pesisir pantai utara

Kabupaten Tuban. Serta program-program edukasi yang dilakukan BMT Surya Raharja dan BTM Surya Utama akan berdampak pada tiga aspek yaitu *knowledge*, agama dan ekonomi. Hal terbukti bahwa masyarakat masih sangat dominan menggunakan produk lembaga keuangan dalam mengembangkan usahanya sehingga sumber modal dapat diperoleh secara Islami. Ekonomi masyarakat juga meningkat karena manyoritas masyarakat desa yang menggunakan pembiayaan ke BMT Surya Raharja dan BTM Surya Utama meningkat sangat signifikan. Karena tujuan BMT Surya Raharjaa dan BTM Surya Utama sebagai lembaga inklusif adalah membuka kran eksklusivitas bagi masyarakat pedesaan dan memberikan kelayakan bagi masyarakat desa untuk mendapatkan permodalan dari lembaga jasa keuangan syariah.

#### B. Saran

## 1. Kepada Pemerintah

Pemerintah harus mendiskusikan kembali terkait dengan kebutuhan masyarakat akan literasi keuangan dalam menunjang kegiatan keuangan inklusif sehinggan tujuan dari Stategi Nasional Inklusi Keuangan (SNIK) dapat tercapai secara optimal.

## 2. Kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah

a. Pengurus Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) harus mampu melakukan kemitraan dengan pemerintah, swasta,

masyarakat dan perguruan tinggi dalam mengedukasi masyarakat terkait dengan literasi keuangan.

b. Pengurus Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) harus mampu mendoktrin masyarakat tentang pentingnya inklusi keuangan dalam membantu perekonomian keluarnganya.

# 3. Perguruan Tinggi

Harus mampu menjadii fasilitator dalam memgedukasi masyarakat dan menyakinkan masyarakat akan pentingnya lembaga keuangan syariah dalam mengembang usaha mikro kecil di daerah pesisir pantai utara Kabupaten Tuban.

# 4. Masyarakat

- a. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) harus amanah jika mendapatkan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) untuk mengembangkan usahanya
- b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) harus mendukung segala program yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam membumikan keuangan syariah di daerah pesisir pantai utara Kabupaten Tuban.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku

- Afifudin , Beni Ahmad Soebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Arikunto, S, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Arikunto, S, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Beik, Irfan Syauki, Laili Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Burhan Mugin, *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publ;ik* dan ilmu social lainnya, Jakarta:Jakarta Putra Grafika, 2007.
- Darsono Dkk, *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia*. Yogyakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program Ibm Spss 21. Edisi 7*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2013.
- Hery, Akuntansi Syariah, Jakarta: PT Grasindo, Anggota IKAPI, 2018.
- Huda, Nurul dan Muhammad Heykal, *Lembaga keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Imaniyati, Neni Sri. Aspek-aspek Hukum BMT. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010.
- Kusumaningtuti, Cecep Setiawan, *Literasi Dan Inklusi Keuangan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Lexyj. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2017.
- M.Nur Riyanto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah* Bandung:CV. Pustaka Setia, 2017.
- Manurung, Adler Haymans, Reksa Dana Investasiku, Jakarta: Kompas, 2012.
- Mustafa, Said Insya. Reformasi Lembaga Keuangan Usaha Mikro Menuju Pola Syariah. Malang: Empat Dua, 2018.

- Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam;Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ridwan, Ahmad Hasan. Manajemen BMT. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Roetanto, Apriliani. Literasi Keuangan. Yogyakarta: Istana Media, 2017.
- Satria, A. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo, 2002.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif & Rnd, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (kualitatif, Kuantitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan), Bandung: IKAPI, 2019.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. Metode Peneliti<mark>an Kombinasi (Mix M</mark>ethods), Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhardi, Didik. DKK. Literasi Financial. Jakarta: Kemendikbud, 2017.
- Suhardi, Didik. DKK. Literasi Financial. Jakarta: Kemendikbud, 2017.
- Supriharyono, konservasi ekosistem sumberdaya hayati di wilayah pesisir dan laut tropis. Yogyakarta, pustaka pelajar, 2007.
- Susyanti, Jeni. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang : Empat Dua, 2016.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Cet Ke 6*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- Wahid, Nusron. keuangan inklusif membongkar hegemoni keuangan. Jakarta: Gramedia. 2014.

## Jurnal

Agrawal, Amol, "Economic Research: The Need For Financial Inclusion With An Indian Perspective. Mumbai: Idbi Gilts Paper, (2008)

- Andreas dan Enni Savitri, peran pemberdyaaan masyarakat pesisir dan modal sosial, Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Di Kabupaten Meranti Dan Rokan Hilir, cetakan I agustus, 2019.
- Andrianto, Afrian. *Tingkat Kemiskinan Masyarakat Pesisir* (Studi Kasus di Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran). SKRIPSI. Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017.
- Atkinson, A. Dan Messy, F. Promoting Financial Inclusion Through Financial Education: Oecd/Infe Evidence, Policies And Practice. Oecd Working Papers On Finance, Insurance And Private Pensions, No. 34, (2013), Oecd Publishing.
- Bank Indonesia, "Plot Project Peningkatan Akses keuangan kelompok masyarakat atau kelompok pelaku usaha melalui pemanfaatan produk/jasa layanan keuangan syariah", 2017.
- Bps, "Persentase Penduduk Miskin September 2017 Mencapai 10,2%. (Online)" (<a href="https://www.Bps.Go.ld/Pressrelease/2018/01/02/1413/Persentase-Penduduk-Miskin-September-2017-Mencapai-10-12-Persen.Html">https://www.Bps.Go.ld/Pressrelease/2018/01/02/1413/Persentase-Penduduk-Miskin-September-2017-Mencapai-10-12-Persen.Html</a>, Diakses Tanggal 03 Februari 2020).
- Budiman, Mochammad Arif., Mairijani., Mahyuni., Herlinawati, Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Di Lingkungan Perguruan Tinggi: Studi Pada Politeknik Negeri Banjarmasin. Prosiding Seminar Nasional. Banjarmasin: Politeknik Negeri Banjarmasin, (2018).
- Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM, Booklet Keuangan Iklusif, 2019..
- Group Pengembangan Keuangan Inklusif Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Nasional, Strategy for Financial Inclusion Fastering Economic Growth and Accelerating Poverty Red uction, (Juni 2012).
- Hamzah, Amir, "Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Syariah di Kalangan Tenaga Pendidik Kabupaten Kuningan", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Volume 7 (2), (2019).
- Imron, Ali. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengembangan Klaster Ikan (Studi pada Masyarakat Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung). SKRIPSI. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar LampunG 2017.

- Jauhari, Soufwan. keuangan inklusif untuk pemberdayaan Masyarakat melalui pengembangan usaha Mikro (Studi Kasus di Lembaga Manajemen Infaq Kota Kediri) (*Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018)
- Joshi, Deepali Pant, "Financial Inclusion And Financial Literacy. Rbi-Oecd Seminar. India: Reserve Bank Of India, (2011).
- Khatimah, Husnul. analisa efektivitas inklusi keuangan di BMT syariah Riyal. Jurnal ilmiah ekonomi manajemen dan kewirausahaan Optimal" Vol 10, No 2, (September 2016).
- Khotimah, Husnul, analisis efektivitas inklusi keuangan di bmt syariah riyal, *jurnal ilmiah ekonomi manajemen dan kewirausahaan* "optimal" •vol.10, no. 2• september (2016).
- Leeladhar, V, "Taking Banking Services To The Common Man-Financial Inclusion. India: Reserve Bank Of India Bulletin, (2006).
- Lihat Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Lusardi Et Al, Financial Literacy Among The Young, Journal Of Consumer Affairs Volume 44 Issue 2, (2010), 50-51.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S, Financial Literacy Around The World: An Overview. *Journal Of Pension Economics And Finance*, 10 (04), (2007).
- Mardani, D. A. Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia. al-Afkar *Journal for Islamic Studies*, Vol. 1. No. 2, (2018, January), 104-119.
- Masturin, Manajemen Modal Sosial Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat: Studi Pada Baitul Maal Wat Tamwil, *Jurnal Equilibrium*, *volume 7, nomor 1, 2019*.
- Modim, Hi. Masita, Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Panorama Pantai Disa, Kec. Sahu, Kabupaten Halmahera Barat), Skripsi: Universitas Hasanuddin, Makasar, 2012, 55.
- Nasution, Anriza Witi. Marlya Fatira AK. Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan dan Perbakan Syariah, *Jurnal Equilibrum* Volume 1 Nomor 7 (September, 2019), 40-63.

- Nasution, Anriza Witi., Fatira, Marlya, "Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan dan Perbakan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 7, Nomor 1, (2019).
- Nasution, Hairatunnisa. "Analisis Financial Inclusion Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Medan (Studi Kasus Pembiayaan Mikro Sumut Sejahtera Ii Di Bank Sumut Syariah)." TESIS, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2017.
- Nengsih, Novia. Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia, *Jurnal Etikonomi*, Vol 14 No 2 (Oktober 2015), 223-224.
- OJK & Kemendagri, Buku Pedoman Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta, 2016.
- Oktavianti, Veny. "Pengaruh Literasi Keuangan Dan Persyaratan Kredit Terhadap Akses Kredit Formal Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Surabaya." Tesis, Fakultas Teknologi Industri, 2017.
- Otoritas Jasa Keuangan, Perencanaan Keuangan Seri Literasi Keuangan, 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, 2014.
- Otoritas Jasa Keuangan, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) revisit. 2017
- Otoritas jasa Keuangan,"Lembaga Keuangan Mikro" <a href="https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx">https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx</a> (23 Desember 2018)
- Rodika, Deri Ofit. "implementasi inklusi keuangan melalui pembiayaan warung mikro di bank syariah mandiri ke curup," SKRIPSI. Jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (iain) curup 2018.
- Sanjaya dan Nursechafi, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 18, Nomor 3, Januari 2016.
- Siregar, Rizal Ma'ruf Amidy, "Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pedagang Pasar Di Kota Padang Sidimpuan", *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 4, No. 2, (2018).
- Umar, A. I., Index Of Syariah Financial Inclusion In Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 20 (july 2017), 100-126.

Ummah, Bintan Badriatul, dkk. Analisis inklusi keuangan dan pemerataan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembanguan*, Vol 4, No 1, (2015).

#### WAWANCARA

Agung, Manajer BMT Surya Raharja, Wawancara, Tuban, 26 Mei 2020.

Aji Agus Wiyoto, Kepala Desa Karangagung, Wawancara, Tuban, 10 Mei 2020

Hilmi, Surveyor BTM Surya Utama, Wawancara, Tuban, 25 Mei 2020.

Inawaroh, Anggota BMT Surya Rahardja, Wawancara, Tuban, 20 Mei 2020.

Iskandar, Anggota BMT Surya Rahardja, Wawancara, Tuban, 15 Mei 2020.

Kasmuah, Anggota BTM Surya Utama, Wawancara, Tuban, 21 Mei 2020.

Muhammad Abduh, Manajer BTM Surya Utama, Wawancara, Tuban, 25 Mei 2020.

Siti Kusniyah, Anggota BTM Surya Utama, Wawancara, Tuban, 23 Mei 2020.

Sudjianto, Kepala Desa Glodok, Wawancara, Tuban, 10 Mei 2020.

Sukinten, Anggota BMT Surya Rahardja, Wawancara, Tuban, 20 Mei 2020.

Sulis, Costumer Servise BTM Surya Utama, Wawancara, Tuban, 25 Mei 2020.

#### **Internet**

- Agustianto, Membangun Literasi Keuangan Syariah di Indonesia, dalam www.iqtishadconsulting.com, diakses pada tanggal 5 April 2020 pukul 11.00 WIB.
- Imron," Kemiskinan Tuban Rangking Lima Se- Jawa Timur. (Online)", (<a href="http://Suarabanyuurip.Com/Kabar/Baca/Kemiskinan-Tuban-Rangking-Lima-Se-Jatim">http://Suarabanyuurip.Com/Kabar/Baca/Kemiskinan-Tuban-Rangking-Lima-Se-Jatim</a>, Diakses Tanggal 03 Februari 2020).
- Wihandono, "Angka Kemiskinan Turun Tipis, Tuban Tetap 5 Kabupaten Termiskin Di Jawa Timur. (Online)", (<a href="https://www.Bangsaonline.Com/Berita/40865/Angka-Kemiskinan-Turun-">https://www.Bangsaonline.Com/Berita/40865/Angka-Kemiskinan-Turun-</a>

<u>Tipis-Tuban-Tetap-5-Besar-Kabupaten-Termiskin-Di-Jatim, Diakses</u> Tanggal 03 Februari 2020).

www.aboutbanking.com.

www.bi.go.id.

www.fiskaldepkeu.go.id.

